

LAPORAN PEREKONOMIAN

Provinsi Maluku Utara



Agustus 2025

VISI, MISI, DAN NILAI STRATEGIS BANK INDONESIA

VISI

Menjadi bank sentral digital terdepan dengan tata kelola kuat yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara *emerging markets* untuk Indonesia maju.

MISI

1. Mencapai stabilitas nilai rupiah melalui efektivitas penetapan dan pelaksanaan kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
2. Memelihara stabilitas sistem pembayaran melalui penetapan kebijakan, pengaturan, perizinan, penyelenggaraan, pengawasan sistem pembayaran, dan pengelolaan uang rupiah, termasuk memfasilitasi percepatan ekonomi dan keuangan digital dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
3. Turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui penetapan dan pelaksanaan kebijakan makroprudensial dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
4. Turut mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan Pemerintah pusat dan daerah, otoritas atau lembaga terkait, dan/atau mitra strategis lain, serta kerja sama internasional;
5. Turut meningkatkan pendalaman pasar keuangan melalui pengaturan, pengawasan, dan pengembangan pasar uang dan pasar valas, termasuk infrastrukturnya, untuk memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan mendukung pembiayaan ekonomi nasional;
6. Turut meningkatkan inklusi ekonomi-keuangan, dan keuangan berkelanjutan, baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah, serta perlindungan konsumen melalui perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja Bank Indonesia; dan
7. Mewujudkan bank sentral berbasis digital dalam kebijakan dan kelembagaan, yang mengutamakan Sistem Tata Kelola Kebijakan dan Kelembagaan Bank Indonesia yang baik dan profesional, melalui pengelolaan organisasi dan sumber daya.

NILAI STRATEGIS

Nilai-nilai strategis Bank Indonesia adalah: (i) kejujuran dan integritas (*trust and integrity*); (ii) profesionalisme (*professionalism*); (iii) keunggulan (*excellence*); (iv) mengutamakan kepentingan umum (*public interest*); dan (v) koordinasi dan kerja sama tim (*coordination and teamwork*) yang berlandaskan keluhuran nilai-nilai agama (religi).

KATA PENGANTAR

Berdasarkan UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Bank Indonesia bertujuan untuk mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas Sistem Pembayaran, dan turut menjaga Stabilitas Sistem Keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Sejalan dengan tujuan tersebut, keberadaan Kantor Perwakilan Bank Indonesia merupakan bagian dari jaringan kerja Bank Indonesia yang berperan sebagai pelaksana kebijakan serta sebagai corong terdepan komunikasi kebijakan Bank Indonesia di daerah.

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara dalam pelaksanaan tugasnya memberikan masukan dengan menyusun dan menerbitkan Laporan Perekonomian Provinsi Maluku Utara, yang pokok bahasannya terdiri atas Perkembangan Ekonomi, Perkembangan Inflasi Regional, Kinerja Perbankan dan Sistem Pembayaran Provinsi Maluku Utara, serta Prospek Ekonomi. Kajian ini diolah berdasarkan data dan informasi di daerah untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan moneter Bank Indonesia dan diharapkan dapat menjadi salah satu bahan informasi bagi penentu kebijakan di daerah.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan perekonomian ini masih ditemukan banyak kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kami senantiasa mengharapkan kritik dan saran serta kerja sama dari semua pihak agar kualitas dan manfaat laporan ini menjadi semakin baik di waktu yang akan datang.

Akhirnya, kepada pihak-pihak yang membantu tersusunnya laporan ini, kami sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih.

Ternate, Agustus 2025

KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA
PROVINSI MALUKU UTARA

ttd.

Dwi Putra Indrawan
Kepala Perwakilan

DAFTAR ISI

VISI, MISI, DAN NILAI STRATEGIS BANK INDONESIA	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GRAFIK	viii
INDIKATOR EKONOMI DAN PERBANKAN PROVINSI MALUKU UTARA	1
RINGKASAN EKSEKUTIF	2
BAB 1 PERKEMBANGAN EKONOMI	6
1.1 Kondisi Umum	7
1.2 Perkembangan PDRB dari Sisi Pengeluaran.....	10
1.2.1 Konsumsi Rumah Tangga dan Pemerintah	13
1.3.2 Kegiatan Ekspor – Impor	15
1.2.3 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	19
1.3 Perkembangan PDRB dari Sisi Lapangan Usaha.....	21
1.3.1 LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.....	25
1.3.2 LU Perdagangan Besar dan Eceran	26
1.3.3 LU Pertambangan dan Industri Pengolahan	26
BAB 2 KEUANGAN PEMERINTAH	29
2.1 Gambaran Umum.....	30
2.1.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah APBD Se-Provinsi Maluku Utara	30
2.1.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah APBD Se-Provinsi Maluku Utara.....	31
2.2 APBD Provinsi Maluku Utara Tahun 2025	32
2.2.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah APBD Provinsi Maluku Utara.....	32
2.2.2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah APBD Provinsi Maluku Utara.....	36

2.3 APBD 10 Kabupaten/ Kota Di Maluku Utara Tahun 2025	38
2.3.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah APBD Kabupaten/Kota	38
2.3.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah APBD Kabupaten/Kota	41
2.4 Rekening Pemerintah	43
BAB 3 PERKEMBANGAN INFLASI PROVINSI MALUKU UTARA	45
3.1 Kondisi Umum Inflasi IHK Maluku Utara	46
3.2 Perkembangan Inflasi IHK Maluku Utara	47
3.3 <i>Tracking</i> Inflasi Triwulan III 2025	49
3.4 Koordinasi Pengendalian Inflasi di Maluku Utara	50
BAB 4 ANALISIS STABILITAS KEUANGAN DAERAH	57
4.1 Asesmen Sektor Rumah Tangga	58
4.1.1 Kondisi Terkini dan Sumber Kerentanan Sektor Rumah Tangga	58
4.1.2 Kinerja Keuangan dan Intermediasi Perbankan pada Sektor Rumah Tangga	60
4.2 Asesmen Sektor Korporasi	64
4.2.1 Kondisi Terkini dan Sumber Kerentanan Sektor Korporasi	64
4.2.2 Penyaluran Kredit pada Sektor Korporasi	65
4.3 Asesmen Institusi Keuangan (Perbankan)	68
4.3.1 Perkembangan Kinerja Perbankan	68
4.3.2 Intermediasi Perbankan	69
4.3.3 Perbankan Syariah	70
4.4 Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM	72
4.4.1 Akses Keuangan kepada UMKM	72
BAB 5 PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN	75
5.1 Perkembangan Sistem Pembayaran Tunai	76
5.1.1 Perkembangan Transaksi Pembayaran Tunai	76
5.1.2 Upaya Menjaga Kebutuhan Uang Tunai	76
5.2 Perkembangan Sistem Pembayaran Non Tunai	77

5.2.1 Perkembangan Transaksi Kliring	77
5.2.2 Perkembangan Transaksi RTGS	78
5.2.3 Perkembangan Transaksi BI-Fast.....	79
5.2.4 Perkembangan Implementasi Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK)	79
5.2.5 Perkembangan Penggunaan QRIS	80
5.2.6 Perkembangan Transaksi E-Commerce	82
BAB 6 KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN	84
6.1 Perkembangan Ketenagakerjaan	85
6.2 Tingkat Kesejahteraan Daerah	88
6.3 Profil Kemiskinan Daerah	91
6.4 Profil Pembangunan Manusia	94
BAB 7 PROSPEK PEREKONOMIAN.....	97
7.1 Prospek Pertumbuhan Ekonomi	98
7.1.1 Sisi Pengeluaran	99
7.1.2 Sisi Lapangan Usaha	100
7.2 <i>Outlook</i> Inflasi Daerah	101
DAFTAR ISTILAH	105
DAFTAR SINGKATAN	108

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 PDRB Seluruh Provinsi di Indonesia pada Triwulan II 2025	7
Gambar 3.1 HLM TPID Halmahera Tengah	52
Gambar 3.2 Gerakan Pangan Murah di Pulau Taliabu menjelang Idul Adha.....	52
Gambar 3.3 Optimalisasi Lahan Sawah di Halmahera Tengah	53
Gambar 3.4 Podcast Terkait Pengendalian Inflasi di RRI Ternate.....	53
Gambar 3.5 Distribusi Ikan pada Program INSANG	53
Gambar 3.6 Serah Terima Fasilitas <i>Cold Storage</i> & Sarana Pendukung	53

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 PDRB Provinsi di Sulampua hingga Triwulan II 2025	9
Tabel 1.2 Pertumbuhan dan Andil PDRB Sisi Penggunaan	12
Tabel 1.3 Pertumbuhan Sektoral PDRB Sisi Lapangan Usaha	21
Tabel 2.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Seluruh Pemda	30
Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Seluruh Pemda.....	31
Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Utara	33
Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara.....	36
Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota Maluku Utara.....	38
Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Kab/Kota.....	41
Tabel 3.1 Inflasi tahunan (yoy) triwulan II 2024 – triwulan II 2025 Maluku Utara	49
Tabel 4.1 Jumlah Rekening Perbankan Masyarakat Berdasarkan Kelompok Nilai.....	62
Tabel 4.2 Kondisi Likuiditas Korporasi	64
Tabel 6.1 Perkembangan Ketenagakerjaan di Maluku Utara (Ribu Jiwa)	86
Tabel 6.2 Nilai Tukar Petani (NTP) Rata-rata Sulampua	89
Tabel 6.3 Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Keparahan Kemiskinan (P2) di Maluku Utara	94

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Ekspor-Impor LN Maluku Utara s.d. Triwulan II 2025	12
Grafik 1.2 Pangsa PDRB Sisi Pengeluaran pada Triwulan II 2025	13
Grafik 1.3 Konsumsi Pemerintah pada Triwulan II 2025	15
Grafik 1.4 Perkembangan Volume Ekspor LN	17
Grafik 1.5 Perkembangan Nilai Ekspor LN	17
Grafik 1.6 Perkembangan Volume Impor LN	19
Grafik 1.7 Perkembangan Nilai Impor LN	19
Grafik 1.8 Persentase Nilai Impor Komoditas Tertinggi di Maluku Utara Triwulan II 2025	19
Grafik 1.9 Perkembangan Belanja Modal di Maluku Utara	20
Grafik 1.10 Andil Pertumbuhan Sektoral PDRB Sisi Lapangan Usaha Triwulan II 2025	Error!
Bookmark not defined.	
Grafik 1.11 Perkembangan Pertumbuhan Kredit Pertanian dan Perikanan Maluku Utara	26
Grafik 1.12 Perkembangan Volume Ekspor Produk Nikel di Maluku Utara	28
Grafik 1.13 Perkembangan Nilai Ekspor Produk Nikel di Maluku Utara	28
Grafik 2.1 Perubahan proporsi APBD akun pendapatan tahun 2024 dan 2025	32
Grafik 2.2 Perubahan struktur APBD akun belanja tahun 2024 dan 2025	32
Grafik 2.3 Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Utara	34
Grafik 2.4 Persentase Realisasi Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara (Kumulatif)	37
Grafik 2.5 Proporsi Anggaran Pendapatan Daerah Spasial di Maluku Utara	39
Grafik 2.6 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota Maluku Utara	41
Grafik 2.7 Proporsi Anggaran Belanja Daerah Spasial Kabupaten/Kota Tahun 2025	42
Grafik 2.8 Persentase Realisasi Belanja Daerah APBD Kab/Kota Maluku Utara	43
Grafik 2.9 Perkembangan DPK Pemda di Perbankan Maluku Utara (dalam Miliar Rupiah)	44
Grafik 3.1 Laju Inflasi Tahunan (yoy) Maluku Utara Dibandingkan dengan Nasional	46
Grafik 3.2 Perbandingan Inflasi Gabungan Kota IHK Provinsi di Sulampua	47
Grafik 4.1 Kontribusi Konsumsi Rumah Tangga pada PDRB Maluku Utara	58
Grafik 4.2 Perkembangan IKK, IKE, dan IEK	59
Grafik 4.3 Ekspektasi Konsumen Terhadap Kondisi Ekonomi 6 Bulan Mendatang	60
Grafik 4.4 Pangsa DPK Perseorangan dan Bukan Perseorangan di Maluku Utara	61
Grafik 4.5 Komposisi DPK Perseorangan di Maluku Utara	62
Grafik 4.6 Pangsa Kredit Perseorangan Berdasarkan Jenis Pengguna	64
Grafik 4.7 Perkembangan Kredit berdasarkan Sektor Ekonomi	65

Grafik 4.8 Perkembangan Kredit Korporasi Berdasarkan Jenis Penggunaan	66
Grafik 4.9 NPL Kredit Korporasi	67
Grafik 4.10 NPL Kredit Korporasi per Kategori Debitur.....	67
Grafik 4.11 Perkembangan Aset Bank Umum di Maluku Utara	68
Grafik 4.12 Perkembangan DPK di Maluku Utara (Miliar Rupiah)	69
Grafik 4.13 Perkembangan Kredit di Maluku Utara (Miliar Rupiah).....	69
Grafik 4.14 Perkembangan LDR Bank Umum di Maluku Utara	70
Grafik 4.15 Perkembangan Perbankan Syariah	72
Grafik 4.16 Perkembangan Penyaluran Kredit UMKM dan Non UMKM	73
Grafik 4.17 Perkembangan Pangsa Kredit UMKM dan Non UMKM Maluku Utara	74
Grafik 5.1 Perkembangan Transaksi Tunai di Maluku Utara s.d Periode Triwulan II 2025.....	76
Grafik 6.1 Perkembangan TPT dan TPAK Maluku Utara.....	87
Grafik 6.2 Jumlah Tenaga Kerja pada Lapangan Pekerjaan Utama (Ribuan Jiwa)	88
Grafik 6.3 Perkembangan NTP	89
Grafik 6.4 NTP per Subsektor di Maluku Utara.....	89
Grafik 6.5 Pertumbuhan Gini Rasio Provinsi Maluku Utara selama 12 Tahun Terakhir	90
Grafik 6.6 Perbandingan Gini Ratio Provinsi di Indonesia untuk Periode Semester I 2025.....	91
Grafik 6.7 Jumlah Penduduk Miskin	92
Grafik 6.8 Persentase Jumlah Penduduk Miskin Desa dan Kota.....	92
Grafik 6.9 Garis Kemiskinan Makanan dan Bukan Makanan Desa dan Kota	93
Grafik 6.10 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Maluku Utara, 2023-2024	96
Grafik 7.1 Perkembangan PDRB Maluku Utara dan Proyeksinya	99

INDIKATOR EKONOMI DAN PERBANKAN PROVINSI MALUKU UTARA

A. Inflasi dan PDRB

INDIKATOR	2024								2025			
	TW I	%yoy	TW II	%yoy	TW III	%yoy	TW IV	%yoy	TW I	%yoy	TW II	%yoy
Indeks Harga Konsumen	106,70		108,20		108,66		108,31		109,23		110,19	
Laju Inflasi Tahunan (% yoy)		3,57		3,21		3,56		1,50		2,32		2,01
PDRB - harga konstan (Rp miliar)	12.488,62	11,88	13.348,75	10,76	12.994,10	4,42	16.337,25	27,27	16.765,78	34,58	17.630,67	
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.552,00	3,46	1.610,44	4,82	1.654,70	6,58	1.628,09	3,45	1.613,96	3,99	1.647,54	2,58
Pertambangan dan Penggalian	2.510,17	17,68	2.503,78	0,07	2.280,70	(10,47)	3.413,49	33,33	3.724,71	48,38	4.020,27	60,57
Industri Pengolahan	3.587,08	10,55	4.251,46	17,06	4.226,10	9,88	6.126,21	58,27	6.309,99	75,30	6.701,87	57,51
Pengadaan Listrik, Gas dan Produksi Es	10,42	21,87	10,23	8,67	10,70	9,45	17,15	65,26	17,24	65,34	17,35	69,59
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,07	6,17	7,18	9,49	7,10	6,69	7,49	4,67	7,65	8,12	7,67	6,85
Konstruksi	552,05	8,02	569,69	9,74	568,40	7,78	600,89	7,21	569,83	3,22	622,14	9,21
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.498,90	18,52	1.505,65	15,97	1.508,30	12,13	1.571,13	10,84	1.625,41	9,17	1.640,35	8,95
Transportasi dan Pergudangan	405,10	12,16	412,20	6,95	416,30	2,36	430,68	5,22	441,68	9,03	446,00	8,20
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	33,40	3,17	34,52	7,85	33,90	3,48	34,47	2,12	34,57	3,51	35,11	1,73
Informasi dan Komunikasi	377,65	2,85	381,47	3,30	384,60	3,78	386,54	3,67	389,45	3,12	390,71	2,42
Jasa Keuangan dan Asuransi	265,24	10,41	268,27	10,21	288,00	16,53	318,46	26,47	301,86	13,78	292,12	8,89
Real Estate	8,84	4,83	9,07	7,19	9,20	6,92	9,41	8,77	9,43	6,62	9,47	4,35
Jasa Perusahaan	25,08	5,86	25,30	6,06	25,40	2,76	26,03	4,52	26,54	5,79	26,95	6,52
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.191,01	18,35	1.283,32	25,17	1.105,70	4,93	1.283,23	1,32	1.226,74	4,57	1.282,51	(0,06)
Jasa Pendidikan	234,22	1,69	241,62	2,93	238,80	1,60	242,53	2,37	243,80	4,09	246,56	2,04
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	166,37	2,21	169,72	3,38	171,10	2,60	173,98	3,15	175,02	5,20	175,54	3,43
Jasa lainnya	64,01	5,14	64,82	5,42	65,00	3,73	67,46	6,55	68,00	6,23	68,49	5,67
Konsumsi Rumah Tangga	4.094,09	4,05	4.230,28	4,94	4.146,92	4,43	4.402,03	6,21	4.295,60	4,92	4.424,22	4,58
Konsumsi Lembaga Nonprofit Rumah Tangga	114,28	19,75	110,97	9,61	109,24	9,10	114,20	0,32	113,54	(0,65)	112,93	1,77
Konsumsi Pemerintah	1.569,33	7,47	2.140,88	8,50	2.287,77	14,56	3.299,02	24,21	1.724,19	9,87	2.068,02	-3,40
Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	5.473,08	11,99	6.475,08	13,99	6.626,67	5,30	7.979,99	9,94	6.551,10	19,70	7.448,67	15,04
Perubahan Inventori	362,80	(316,28)	132,63	57,66	68,29	17,20	(316,11)	579,92	(168,27)	(146,38)	(320,47)	-341,62
Ekspor Barang dan Jasa	30.514,09	3,23	36.151,83	14,67	33.795,15	6,09	42.689,67	19,12	46.126,79	51,17	48.176,88	32,58
Impor Barang dan Jasa	29.654,46	3,66	35.893,91	14,52	34.039,92	6,94	41.831,55	12,67	41.857,10	41,15	44.279,57	40,21

B. Perbankan

INDIKATOR	2024								2025			
	TW I	%yoy	TW II	%yoy	TW III	%yoy	TW IV	%yoy	TW I	%yoy	TW II	%yoy
Bank Umum												
Total Aset (Rp Miliar)	17.064,72	7,56	17.268,96	7,95	18.301,44	10,14	18.523,47	10,92	18.322,50	7,37	19.109,43	10,66
DPK (Rp miliar)	12.896,77	26,18	13.424,39	25,88	12.623,82	15,77	12.636,92	9,01	13.214,60	2,46	15.091,47	12,42
- Giro	4.851,46	92,39	5.030,83	77,69	4.045,96	26,22	3.533,93	12,02	4.111,98	(15,24)	5.703,87	13,38
- Tabungan	6.283,00	7,97	6.677,32	11,17	6.794,23	14,26	7.395,46	10,94	7.326,35	16,61	7.558,92	13,20
- Deposito	1.762,31	(6,26)	1.716,24	(6,06)	1.783,64	1,78	1.707,54	(3,61)	1.776,27	0,79	1.828,68	6,55
Kredit (Rp miliar)	14.941,22	5,87	15.099,35	5,43	16.107,41	9,80	16.041,58	7,90	15.951,83	6,76	15.981,42	5,84
- Modal Kerja	3.160,63	4,33	3.201,63	2,83	3.135,85	(1,09)	3.006,31	(6,81)	3.072,61	(2,79)	3.074,60	(3,97)
- Investasi	2.441,04	5,97	2.382,29	5,14	3.180,81	31,27	3.224,88	34,23	3.079,01	26,14	2.982,46	25,19
- Konsumsi	9.339,55	6,38	9.515,44	6,40	9.790,75	7,87	9.810,39	6,19	9.800,21	4,93	9.924,36	4,30
LDR (%)	115,80		112,48		127,60		126,94		120,51		105,90	
NPL Korporasi (%)	2,45		2,64		1,81		1,93		1,99		2,11	

C. Sistem Pembayaran

INDIKATOR	2023								2024								2025			
	TW I	%yoy	TW II	%yoy	TW III	%yoy	TW IV	%yoy	TW I	%yoy	TW II	%yoy	TW III	%yoy	TW IV	%yoy	TW I	%yoy	TW II	%yoy
Inflow (Rp miliar)	850,3	30,6	612,3	-10,3	403,7	-38,6	342,5	11,3	813,5	-4,3	703,6	14,9	504,8	25,0	306,5	-10,5	655,5	-19,4	560,24	-0,20
Outflow (Rp miliar)	466,3	55,9	1170,7	10,3	639,7	-28,3	1153,2	-11,5	639,9	37,2	1224,6	4,6	870,9	36,1	1335,9	15,8	837,2	30,8	477,09	-0,61
Nominal Kiring (Rp miliar)	514,2	-28,9	466,0	-36,6	459,9	-27,3	482,4	-31,1	364,0	-29,2	424,3	-8,9	489,7	6,5	576,9	19,6	433,6	19,1	439,22	3,52
Nominal RTGS (Rp miliar)	2179,2	-70,0	1965,7	-31,0	1704,2	-47,7	1842,0	-30,4	1489,0	-31,7	1836,0	-6,6	1830,0	7,4	2504,0	35,9	2403,1	61,4	2028,012	10,46

RINGKASAN EKSEKUTIF

Perkembangan Ekonomi Daerah

Perekonomian Provinsi Maluku Utara pada triwulan II 2025 tumbuh sebesar 32,09% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 34,58% (yoy). Namun demikian, Maluku Utara menjadi provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia pada triwulan II 2025, di atas Sulawesi Tengah dan Kepulauan Riau. Meningkatnya ketidakpastian global pada triwulan II 2025 sejalan dengan penerapan tarif Trump menjadi faktor penahan laju pertumbuhan Maluku Utara.

Dilihat dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi didorong oleh komponen ekspor barang dan jasa sejalan dengan produksi komoditas hilirisasi nikel yang meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Dari sisi konsumsi, perlambatan konsumsi rumah tangga dan pemerintah seiring normalisasi konsumsi pasca HBKN Idul Fitri 2025 turut berpengaruh terhadap tertahannya laju pertumbuhan ekonomi pada triwulan II 2025.

Keuangan Pemerintah

Anggaran Pendapatan Daerah pada tahun 2025 secara agregat mencapai Rp16,17 triliun. Di sisi lain, Anggaran Belanja Pemerintah Daerah secara agregat mencapai Rp16,99 triliun. Pagu Anggaran Belanja tahun 2025 turun 0,97% (yoy) dibandingkan anggaran setelah perubahan tahun 2024. Dari nominal tersebut, 79,91% atau Rp13,58 triliun merupakan APBD Kabupaten/Kota dan sisanya 20,09% atau Rp Rp3,41 triliun merupakan APBD Provinsi Maluku Utara.

Sampai dengan triwulan II 2025 total realisasi belanja daerah secara agregat mencapai 25,80% dari pagu anggaran atau lebih rendah dibandingkan triwulan II 2024 yang berhasil merealisasikan sebesar 27,54% dari anggaran. Penurunan realisasi belanja terhadap pagu anggaran, terjadi pada realisasi belanja APBD Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Lebih lanjut realisasi APBD Kabupaten/Kota tercatat 25,83%, lebih tinggi dibandingkan realisasi APBD Provinsi yang sebesar 25,67% dari pagu anggaran.

Perkembangan Inflasi Daerah

Inflasi IHK Maluku Utara pada triwulan II 2025 tercatat sebesar 2,01% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan I 2025 sebesar 2,32% (yoy). Kelompok penyumbang inflasi terbesar sepanjang triwulan II 2025 adalah Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau mengalami inflasi tertinggi, tercatat sebesar 4,08% (yoy) dan andil inflasi sebesar 1,39% (yoy). Kemudian disusul oleh Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga dengan inflasi sebesar 4,17% (yoy) dengan andil inflasi sebesar 0,80% (yoy). Selanjutnya, Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya mengalami inflasi sebesar 5,45% (yoy) dengan andil inflasi sebesar 0,39% (yoy). Dari sisi komoditas, penyumbang andil inflasi tertinggi sepanjang triwulan II 2025 adalah komoditas bahan bakar rumah tangga, emas perhiasan, kontrak rumah, ikan bakar, dan kangkung.

Secara akumulasi sampai dengan Juli 2025, tercatat Maluku Utara mengalami inflasi sebesar 2,13% (ytd). Tekanan inflasi sepanjang triwulan berjalan diperkirakan akan mengalami penurunan dibandingkan triwulan II 2025. Penurunan tekanan inflasi terutama disebabkan normalisasi harga komoditas cabai rawit diakibatkan mulai stabilnya pasokan dari daerah sentra produksi dan penyesuaian ke bawah harga BBM nonsubsidi sejalan dengan penurunan harga minyak dunia.

Analisis Stabilitas Keuangan Daerah

Ekonomi Maluku Utara tumbuh impresif pada triwulan II 2025 seiring dengan pertumbuhan industri pertambangan nikel yang berdampak positif terhadap kinerja perbankan khususnya pada ekspansi penyaluran kredit. Kinerja penyaluran kredit ke sektor pertambangan dan pertanian di Maluku Utara menunjukkan pertumbuhan positif pada triwulan II 2025.

Secara keseluruhan NPL kredit di Maluku Utara masih berada di bawah 5%. NPL kredit non-UMKM mengalami sedikit kenaikan dari 0,04% pada triwulan I 2025 menjadi 0,06% pada triwulan II 2025. Sementara itu, NPL pada kredit UMKM mengalami kenaikan dari 3,54% pada triwulan I 2025 menjadi 3,66% pada triwulan II 2025. Hal ini

mengindikasikan bahwa stabilitas sistem keuangan di Provinsi Maluku Utara pada triwulan II 2025 masih terus terjaga di tengah pertumbuhan positif penyaluran kredit.

Perkembangan Sistem Pembayaran

Sepanjang triwulan I 2025 terjadi net outflow di Maluku Utara seiring HBKN Idul Fitri 1446 H yang jatuh pada Bulan Maret. Dari sisi non tunai, transaksi RTGS, SKNBI, dan APMK mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya, namun tetap tumbuh secara yoy. Transaksi digital seperti penggunaan QRIS dan e-commerce terus mencatatkan pertumbuhan positif dari bulan ke bulan. Terdapat peningkatan sebesar 94% (yoy) untuk frekuensi transaksi dan 78% (yoy) untuk nominal transaksi E-Commerce selama triwulan I 2025.

Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Maluku Utara pada Semester I 2025 tercatat sebesar 4,26% meningkat sebesar 0,23 basis poin dibandingkan periode pencatatan Semester II 2024 yang tercatat sebesar 4,03%. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) masyarakat Maluku Utara juga mengalami penurunan yang sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan Angkatan Kerja. Hal ini mengindikasikan adanya pergeseran preferensi terhadap pekerjaan, dimana individu menunggu untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih sesuai atau enggan bekerja di sektor informal.

Pada triwulan II 2025 Indeks Nilai Tukar Petani (NTP) yang menjadi salah satu parameter kesejahteraan petani di Maluku Utara memperoleh indeks 107,26, angka tersebut menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 103,12. NTP Provinsi Maluku Utara pada triwulan II 2025 berada pada peringkat ke-8 (delapan) dari 14 (empat belas) provinsi di wilayah Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua).

Prospek Perekonomian

Perekonomian Provinsi Maluku Utara pada tahun 2025 diproyeksikan tumbuh tinggi dan mengalami peningkatan pertumbuhan dibanding tahun 2024. Pertumbuhan

ekonomi ditopang oleh peningkatan pada industri pertambangan dan pengolahan nikel. Dari sisi pengeluaran, perekonomian pada tahun 2025 didorong oleh pertumbuhan ekspor luar negeri yang dipengaruhi oleh proses hilirisasi tingkat lanjut produk olahan nikel. Dari sisi LU, sektor industri pengolahan serta pertambangan dan penggalian diperkirakan masih menjadi sektor utama yang menopang pertumbuhan ekonomi pada tahun berjalan.

Inflasi Maluku Utara pada tahun 2025 diperkirakan akan berada dalam rentang target inflasi nasional walaupun di tengah berbagai faktor risiko seperti adanya peningkatan harga bahan bakar rumah tangga jenis minyak tanah yang terjadi akibat adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan dan kuota yang dialokasikan. Adapun, beberapa faktor kebijakan Pemerintah seperti efisiensi anggaran dan penyesuaian harga BBM nonsubsidi diperkirakan turut mempengaruhi inflasi pada tahun 2025.

BAB 1 PERKEMBANGAN EKONOMI

“PDRB Maluku Utara pada Triwulan II 2025 tumbuh 32,09% (yoy)”



RINGKASAN

Perekonomian Provinsi Maluku Utara pada triwulan II 2025 tumbuh sebesar 32,09% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 34,58% (yoy). Meskipun demikian, Maluku Utara menjadi provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia pada triwulan II 2025, di atas Sulawesi Tengah dan Kepulauan Riau. Perlambatan pertumbuhan ini terutama disebabkan oleh melambatnya pertumbuhan industri pengolahan khususnya pengolahan nikel.

Dilihat dari sisi pengeluaran, perlambatan pertumbuhan perekonomian disebabkan oleh melambatnya ekspor barang dan jasa khususnya produk olahan nikel. Dari sisi konsumsi, perlambatan konsumsi rumah tangga dan pemerintah sejalan dengan normalisasi konsumsi pasca HBKN Idul Fitri 2025 turut berpengaruh terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi pada triwulan II 2025.

Pertumbuhan yoy
Triwulan II 2025
32,09%

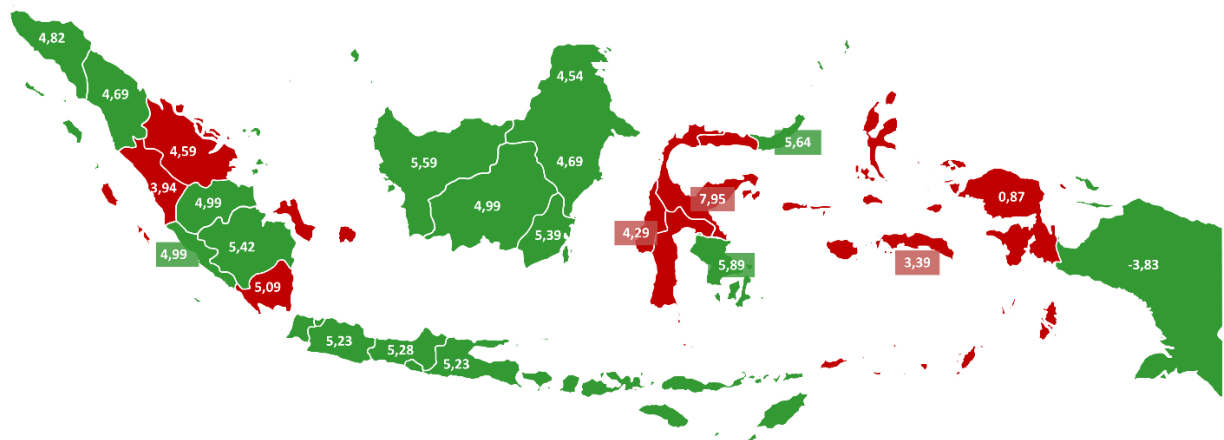
Pertumbuhan qtg
Triwulan II 2025
5,03%

1.1 Kondisi Umum

Ekonomi Provinsi Maluku Utara pada triwulan II 2025 kembali tumbuh tinggi sebesar 32,09% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat tumbuh sebesar 34,58% (yoy). Meskipun melambat, pertumbuhan ekonomi Maluku Utara pada triwulan II 2025 tercatat sebagai pertumbuhan tertinggi di Indonesia.

Perlambatan ekonomi Maluku Utara disebabkan oleh melambatnya sektor industri dan ekspor produk olahan nikel. Secara nasional, mayoritas provinsi mencatatkan pertumbuhan positif sejalan dengan perekonomian nasional yang tumbuh positif pada triwulan II 2025.

Pada lingkup wilayah Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua), akumulasi pertumbuhan ekonomi untuk triwulan II 2025 tercatat sebesar 5,12% (yoy), mengalami akselerasi dibandingkan triwulan I 2025 yang tumbuh sebesar 5,03% (yoy). Akumulasi pertumbuhan Sulampua tercatat menyamai pertumbuhan ekonomi nasional yang mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,12% (yoy). Dilihat dari sebarannya, dari 10 (sepuluh) provinsi yang ada di Sulampua, 3 (tiga) provinsi mengalami peningkatan pertumbuhan dan 7 (tujuh) provinsi mengalami penurunan pertumbuhan. Adapun capaian pertumbuhan ekonomi seluruh provinsi di Indonesia dapat dilihat pada gambar 1.1.



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Gambar 1.1 PDRB Seluruh Provinsi di Indonesia pada Triwulan II 2025

Ekonomi Provinsi Maluku Utara yang tumbuh tinggi pada Triwulan II 2025 digerakkan oleh sektor industri pengolahan

khususnya komoditas nikel. Dilihat dari sisi pengeluaran, komponen ekspor barang dan jasa mencatatkan pertumbuhan sebesar

33,26% (yoy), melambat dibanding triwulan I 2025 yang tumbuh sebesar 51,17% (yoy). Perlambatan ini disebabkan oleh melambatnya sektor industri pengolahan nikel dan ekspor produk olahan nikel.

Di sisi lain, mayoritas komponen konsumsi turut mengalami perlambatan pada triwulan II 2025. Komponen konsumsi pemerintah melambat sejalan melambatnya realisasi belanja APBD pemerintah. Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) juga melambat seiring mendekatnya waktu smelter yang akan *commissioning* pada semester II 2025.

Mengikuti perlambatan ekspor, impor barang dan jasa tercatat tumbuh sebesar 23,36% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 41,15% (yoy). Di lain sisi, komponen konsumsi Rumah Tangga (RT) tercatat mengalami penurunan pertumbuhan dibandingkan triwulan sebelumnya, sejalan normalisasi konsumsi pasca HBKN Idul Fitri 2025.

Ditinjau dari sisi Lapangan Usaha (LU), 4 (empat) LU tercatat mengalami peningkatan pertumbuhan sementara 13 (tiga belas) LU mengalami penurunan pertumbuhan. LU pertambangan dan LU industri pengolahan yang merupakan penyumbang ekonomi terbesar di Maluku Utara memimpin angka pertumbuhan pada triwulan II 2025. LU Pertambangan tumbuh sebesar 60,57% (yoy) sementara LU Industri

Pengolahan tumbuh sebesar 57,51% (yoy). LU pengolahan mengalami perlambatan dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 75,30% (yoy), sejalan dengan perlambatan permintaan global akan produk turunan nikel. Hal ini sejalan dengan meningkatnya kegiatan operasional penambangan bijih nikel serta mulai beroperasinya tambang nikel baru di Halmahera Selatan. Di sisi lain, LU Pertambangan dan Penggalan tumbuh 60,57% (yoy), mengalami peningkatan pertumbuhan dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 48,38%. Hal ini sejalan dengan meningkatnya kegiatan operasional penambangan bijih nikel serta mulai beroperasinya tambang nikel baru di Halmahera Selatan.

Tabel 1.1 PDRB Provinsi di Sulampua hingga Triwulan II 2025

Provinsi	TW II 2024	TW I 2025	TW II 2025
Maluku Utara	10.76	34.58	32.09
Sulawesi Tengah	9.75	8.69	7.95
Sulawesi Tenggara	5.54	5.66	5.89
Sulawesi Utara	5.13	5.62	5.64
Gorontalo	3.82	6.07	5.14
Nasional	5.05	4.87	5.12
Sulawesi Selatan	4.98	5.78	4.94
Sulawesi Barat	4.30	4.83	4.29
Maluku	3.12	5.07	3.39
Papua Barat*	21.11	17.87	0.87
Papua*	4.37	-12.98	-3.83

* gabungan Provinsi Papua dan Papua Barat Daya

** gabungan Provinsi Papua, Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan

Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, diolah

: akselerasi dibanding triwulan sebelumnya
 : deselerasi dibanding triwulan sebelumnya

Berdasarkan Tabel 1.1 terlihat bahwa tiga provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi pada triwulan II 2025 di Sulampua secara berurutan ialah Maluku Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Ditinjau dari sektor utamanya, ketiga provinsi tersebut ditopang oleh tingginya aktivitas pada sektor hulu hingga hilir pengolahan komoditas hasil tambang. Di Maluku Utara, pertumbuhan ditopang oleh komoditas nikel. Hilirisasi yang sedang berlangsung memberikan nilai tambah dalam negeri bagi produk olahan nikel. Pertumbuhan ini memberikan momentum untuk mewujudkan sinergi positif di antara pelaku usaha, pemerintah daerah, maupun masyarakat di lingkungan pertambangan dan industri pengolahan. Sinergi tersebut antara lain berupa pemberdayaan sektor pertanian,

perikanan, dan perkebunan di sekitar kawasan industri untuk memenuhi kebutuhan pangan di kawasan industri, kemudian penggunaan jasa maupun produk masyarakat sekitar pada kawasan industri, serta kerja sama dengan pemerintah daerah yang diharapkan mampu menghadirkan *multiplier effect* pada sektor-sektor non tambang lain seperti UMKM. Dengan demikian, adanya iklim investasi yang baik akan mendorong tingkat pemenuhan tenaga kerja domestik untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di *smelter* sehingga dapat menciptakan ekosistem perputaran uang yang tertransmisikan dengan baik di berbagai lapisan masyarakat yang kemudian berdampak pada pertumbuhan inklusif.

Kedepannya, LU pertambangan dan penggalian serta LU industri pengolahan

diproyeksikan masih akan menjadi lapangan usaha utama yang menyumbangkan angka pertumbuhan ekonomi tertinggi bagi Provinsi Maluku Utara. Hal tersebut sejalan dengan semakin optimalnya aktivitas hilirisasi nikel yang memberikan nilai tambah lebih tinggi. Dengan demikian, berdasarkan pemantauan kondisi perekonomian Maluku Utara pada triwulan berjalan, pertumbuhan positif diperkirakan masih akan terus berlanjut pada triwulan III 2025. Hal ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor, antara lain peningkatan nilai tambah produk olahan nikel di Maluku Utara, realisasi ekspansi produksi produk olahan nikel seperti nikel sulfat dan kobalt sulfat sebagai produk lanjutan dari produk *Mixed Hydroxide Precipitate* (MHP), produksi perdana prekursor nikel sebagai salah satu komponen baterai EV, penambahan lini produksi pada *smelter* pirometalurgi dan hidrometalurgi di Halmahera Selatan dan Halmahera Tengah, serta ekspansi pertambangan nikel di Halmahera Timur. Faktor selanjutnya adalah optimalisasi produksi *smelter* eksisting yang telah beroperasi di Maluku Utara. Hal ini disinyalir akan memberikan dampak positif terhadap LU industri pengolahan dan ekspor di Maluku Utara. Selanjutnya, komponen konsumsi RT diperkirakan akan tumbuh positif sejalan dengan Bantuan Subsidi Upah (BSU) dari pemerintah yang mulai digulirkan sejak Juni 2025. Sementara itu, pertumbuhan lebih lanjut dapat tertahan oleh

perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok, dimana perang dagang tersebut dapat mempengaruhi permintaan produk turunan nikel sehingga berpengaruh terhadap kinerja industri pengolahan maupun ekspor LN di Maluku Utara.

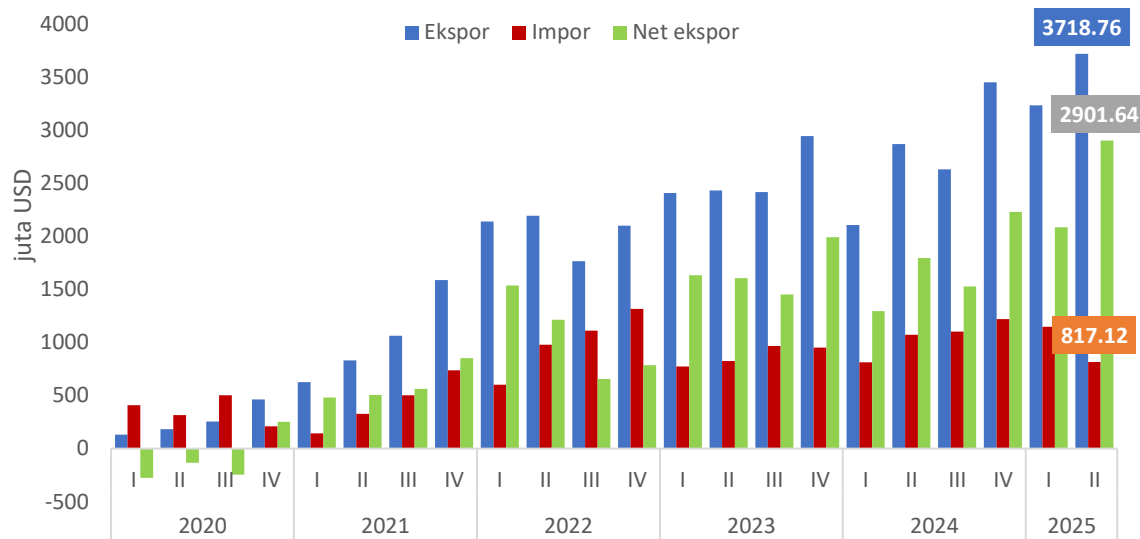
1.2 Perkembangan PDRB dari Sisi Pengeluaran

Dari sisi pengeluaran, perlambatan pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh melambatnya ekspor barang dan jasa pada triwulan II dibanding triwulan sebelumnya. Kendati demikian, komponen ekspor barang dan jasa secara agregat masih memberikan andil yang paling besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku Utara dari sisi pengeluaran. Pada triwulan II 2025, ekspor barang dan jasa mengalami pertumbuhan sebesar 33,26% (yoy), melambat dibandingkan triwulan I 2025 yang tumbuh sebesar 51,17% (yoy). Perlambatan komponen ekspor dipengaruhi oleh melambatnya permintaan akan produk olahan nikel di Maluku Utara. Kendati demikian, penambahan lini produksi dan *commissioning* *smelter* pada triwulan II 2025 menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekspor produk nikel. Selain itu, pertumbuhan ekspor sejalan dengan optimalisasi produksi *feronikel*, *nickel matte*, *Mixed Hydroxide*

Precipitate (MHP), nikel sulfat, dan *Nickel Cobalt Manganese* (NCM) dari smelter pirometalurgi dan hidrometalurgi yang berada di Halmahera Tengah dan Halmahera Selatan.

Hilirisasi lebih lanjut di Maluku Utara memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekspor. Salah satunya realisasi produk olahan nikel lanjutan dari *smelter* hidrometalurgi di Halmahera Tengah yang telah mengekspor produk nikel sulfat dan kobalt sulfat ke Tiongkok. Kemudian, adanya ekspor perdana *Nickel Plate* dan *Electrolyte Cobalt* yang merupakan salah satu komponen baterai EV turut meningkatkan nilai jual yang lebih tinggi bagi produk olahan nikel di Maluku Utara. Pertumbuhan ekspor pada triwulan II 2025 disebabkan oleh optimalisasi smelter yang telah *commissioning* pada triwulan – triwulan sebelumnya serta penambahan lini produksi dan smelter baru pada triwulan II 2025. Kendati demikian, perang dagang yang memanas antara Amerika Serikat dan Tiongkok mempengaruhi permintaan Tiongkok terhadap produk turunan nikel yang berasal dari Maluku Utara, mengingat sebagian besar produk turunan nikel dari Maluku Utara diekspor ke Tiongkok.

Dari sisi komponen impor barang dan jasa, pada triwulan II 2025 tercatat tumbuh sebesar 23,36% (yoy), mengalami perlambatan dibandingkan dengan triwulan I 2025 yang tumbuh sebesar 41,15% (yoy). Hal ini dipengaruhi oleh perlambatan impor komoditas mesin atau pesawat mekanik, mesin atau peralatan listrik mendekati smelter yang akan *commissioning* pada semester II 2025, serta peningkatan impor bahan kimia untuk pengolahan bijih nikel. Sumber pertumbuhan impor utamanya dipengaruhi oleh impor komoditas mesin atau pesawat mekanik, mesin atau peralatan listrik, sebagai salah satu alat operasional *smelter* di Maluku Utara. Sejalan dengan impor barang dan jasa yang mengalami perlambatan pada triwulan II 2025, Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTB) Provinsi Maluku Utara mengalami pertumbuhan sebesar 15,04% (yoy), melambat dibanding triwulan I 2025 yang tumbuh sebesar 19,70% (yoy). Perlambatan aliran investasi yang masuk dipengaruhi sejalan dengan melambatnya impor mesin dan peralatan mekanik untuk pembangunan smelter. Adapun nilai ekspor-impor LN Maluku Utara dan selisihnya ditunjukkan pada **grafik 1.1**.



Sumber: Bea Cukai, diolah

Grafik 1.1 Ekspor-Impor LN Maluku Utara s.d. Triwulan II 2025

Tabel 1.2 Pertumbuhan dan Andil PDRB Sisi Penggunaan

Komponen	Pertumbuhan (% , yoy)		Andil (%)	
	TW I 2025	TW II 2025	TW I 2025	TW II 2025
Ekspor Barang dan Jasa	51.17	33.26	125.17	90.08
Impor Barang dan Jasa	41.15	23.36	-97.76	-66.19
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	9.87	-3.40	1.24	-0.55
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4.92	4.58	1.62	1.45
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	-0.65	1.77	-4.33	0.01
Pembentukan Modal Tetap Bruto	19.70	15.04	8.64	7.29
P D R B	34.58	32.09	34.58	32.09

Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, diolah

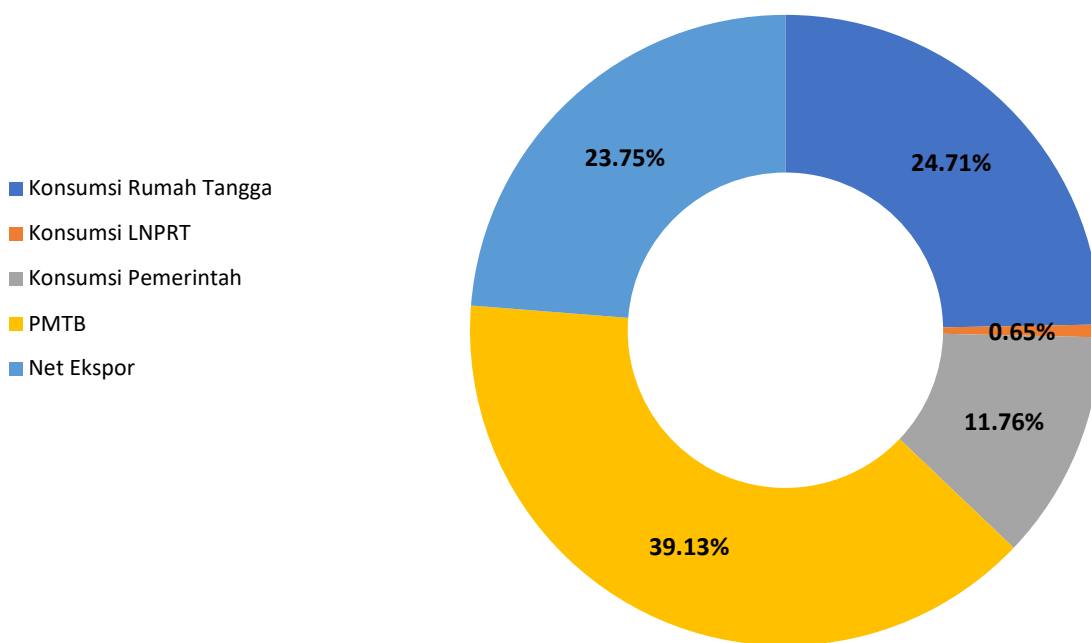
Ditinjau dari andil setiap komponen pengeluaran, ekspor masih menjadi komponen yang memberikan kontribusi positif tertinggi pada triwulan II 2025, disusul dengan PMTB. Tingginya andil ekspor mencerminkan masih kuatnya permintaan global akan produk olahan nikel. Perlambatan PMTB tercermin dari realisasi PMA/PMDN yang mengalami kontraksi

sebesar -37,94% (yoy) pada triwulan II 2025 melambat dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 37,76% (yoy). Selain itu, kebutuhan bahan kimia untuk pengolahan bijih nikel yang masih kuat turut mendorong pertumbuhan impor Maluku Utara.

Dilihat dari pangsa pertumbuhan ekonomi masing-masing komponen

pengeluaran, terlihat bahwa pada triwulan II 2025 ekspor masih menjadi komponen yang memberikan kontribusi paling tinggi dengan pangsa sebesar 213,36%, diikuti oleh PMTB dengan pangsa sebesar 39,13%. Pada sisi

sebaliknya, impor memiliki pangsa negatif sebesar 186,41%. Sebaran pangsa komponen PDRB Provinsi Maluku Utara dari sisi pengeluaran dapat dilihat pada **grafik 1.2**.



Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, diolah

Grafik 1.2 Pangsa PDRB Sisi Pengeluaran pada Triwulan II 2025

1.2.1 Konsumsi Rumah Tangga dan Pemerintah

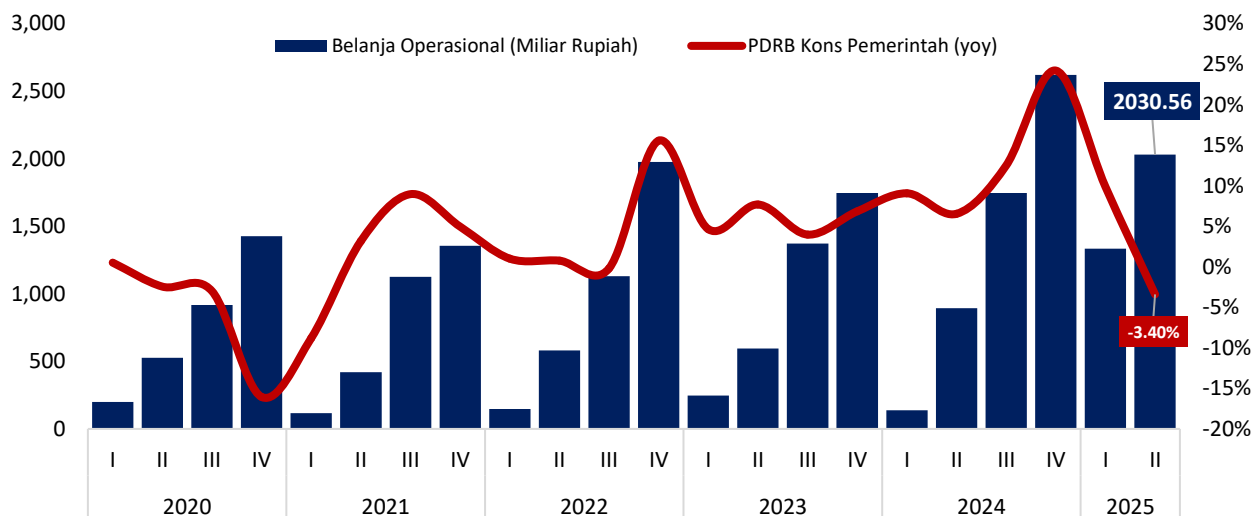
Pada triwulan II 2025 komponen konsumsi pemerintah tetap tumbuh sejalan dengan realisasi belanja pemerintah khususnya belanja operasional. Selanjutnya konsumsi rumah tangga mengalami perlambatan seiring dengan normalisasi tingkat

konsumsi masyarakat pasca Ramadhan dan HBKN Idul Fitri 2025. Pada triwulan II 2025 komponen konsumsi pemerintah mengalami kontraksi sebesar -3,40% (yoy), mengalami perlambatan dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 9,87% (yoy). Perlambatan tersebut disinyalir seiring penurunan realisasi belanja operasional dan modal dibandingkan periode periode yang sama pada tahun

sebelumnya. Adapun realisasi Belanja Pemerintah serta pertumbuhan konsumsi pemerintah dapat dilihat pada Grafik 1.3.

Konsumsi rumah tangga pada triwulan II 2025 mengalami perlambatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada triwulan II 2025, konsumsi rumah tangga tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 4,58% (yoy), mengalami perlambatan dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,92% (yoy). Perlambatan konsumsi rumah tangga terjadi seiring normalisasi tingkat konsumsi rumah tangga pasca HBKN Idul Fitri 2025. Di sisi lain, komponen konsumsi lembaga non-profit rumah tangga (LNPRT) mengalami pertumbuhan sebesar 1,77% (yoy) meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami kontraksi sebesar -0,65% (yoy). Pertumbuhan ini sejalan dengan meningkatnya bantuan sosial yang diberikan akibat bencana alam yang terjadi pada triwulan II 2025 di Maluku Utara.

Pertumbuhan pada komponen konsumsi rumah tangga juga terkonfirmasi dari pertumbuhan kredit konsumsi di Maluku Utara. Pada triwulan II 2025, kredit konsumsi di Maluku Utara mengalami pertumbuhan sebesar 4,04% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,40% (yoy). Kemudian, DPK pada triwulan II 2025 mencatatkan pertumbuhan 7,05% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 9,07% (yoy). Hal ini dapat dipandang sebagai indikasi masyarakat memilih untuk berbelanja secara bijak. Survei Konsumen Bank Indonesia pada triwulan II 2025 turut mengonfirmasi pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK), Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE), dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) masih dalam zona optimis, yakni di atas 100 dan cenderung stabil dibandingkan triwulan sebelumnya.



Sumber: Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara, Pemerintah Daerah Provinsi

Grafik 1.3 Konsumsi Pemerintah pada Triwulan II 2025

Pada triwulan III 2025, seluruh komponen konsumsi diperkirakan akan tetap tumbuh positif. Adanya pemberian Bantuan Subsidi Upah (BSU) dari pemerintah yang telah bergulir diperkirakan menjadi faktor pendorong pertumbuhan konsumsi rumah tangga ke depan. Kemudian, konsumsi LNPRRT diperkirakan tetap stabil pada triwulan III 2025

Selanjutnya, konsumsi pemerintah diperkirakan mengalami perlambatan pada triwulan III 2025. Hal ini sejalan dengan realokasi anggaran belanja pemerintah yang telah berjalan pada triwulan - triwulan sebelumnya.

1.3.2 Kegiatan Ekspor – Impor

Pada triwulan II 2025 komponen pengeluaran ekspor mengalami perlambatan dibandingkan triwulan I 2025, komponen impor juga turut mengalami perlambatan dibandingkan

triwulan sebelumnya. Pada triwulan II 2025, ekspor barang dan jasa mengalami pertumbuhan sebesar 33,26% (yoy), mengalami perlambatan dibandingkan triwulan I 2025 yang tumbuh sebesar 51,17% (yoy). Perlambatan ekspor barang dan jasa disebabkan oleh melambatnya ekspor komponen baterai EV seperti MHP dan nikel sulfat. Kendati demikian, adanya penambahan lini produksi dan *commissioning* smelter pada triwulan II 2025 di Halmahera Tengah serta ekspor perdana *nickel plate* dan *electrolyte cobalt* menjadi faktor pendorong kinerja ekspor nikel.

Adapun nilai ekspor LN sepanjang triwulan II 2025 berdasarkan Ditjen Bea Cukai tercatat sebesar US\$ 3.718,76 juta, meningkat dibandingkan triwulan I 2025 yang tercatat sebesar US\$ 3.232,89 juta, dengan komoditas ekspor utama dari Maluku Utara antara lain besi dan baja, nikel dan

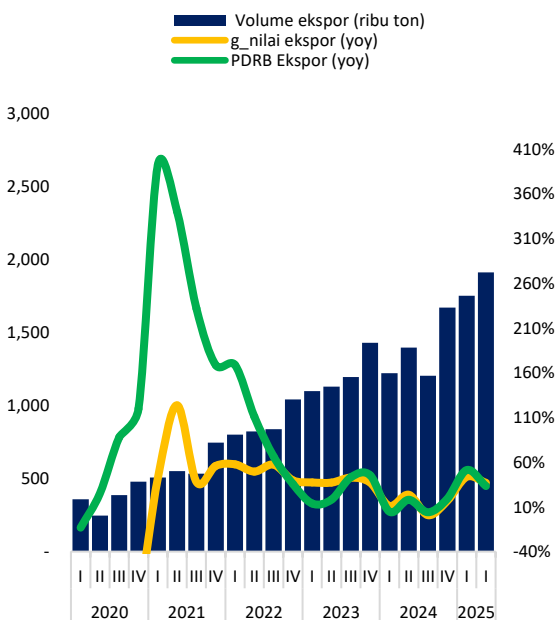
barang daripadanya, bahan kimia anorganik, serta logam tidak mulia lainnya.

Dilihat dari komoditas ekspor luar negeri Maluku Utara, saat ini didominasi oleh ekspor produk olahan nikel yang pada triwulan II 2025 memiliki pangsa sebesar 99,95% dibandingkan dengan total ekspor. Produk utama yang memberikan kontribusi terhadap ekspor di Maluku Utara adalah feronikel yang merupakan produk hilirisasi nikel. Hilirisasi nikel turut mengalami perkembangan, saat ini telah terdapat ekspansi produksi produk olahan nikel yang memberikan nilai tambah lebih tinggi seperti nikel sulfat, *electrolyte cobalt*, *nickel plate* dan prekursor nikel. Selain itu, *smelter* di Maluku Utara juga telah mengekspor komoditas *Mixed Hydroxide Precipitate* (MHP), nikel sulfat, *electrolyte cobalt*, *nickel plate* dan prekursor nikel yang merupakan produk antara untuk memproduksi baterai kendaraan listrik.

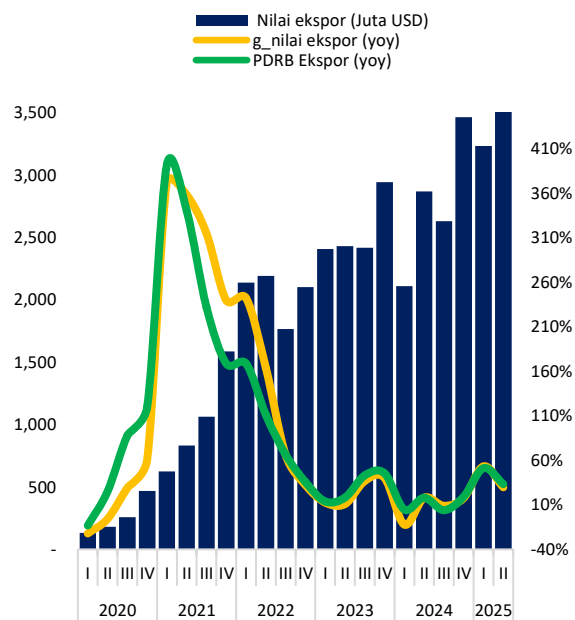
Saat ini, terdapat *smelter* yang memproduksi prekursor nikel dan telah melakukan ekspor perdana pada triwulan I 2025, serta *smelter* yang telah memproduksi *nickel plate* dan *electrolyte cobalt* dan melakukan ekspor perdana pada triwulan II 2025. Prekursor nikel, *nickel plate*, dan *electrolyte cobalt* merupakan pengolahan nikel lebih lanjut sebagai salah satu komponen baterai kendaraan listrik dan memiliki nilai jual lebih tinggi dibanding nikel sulfat dan kobalt sulfat yang juga merupakan

produk olahan nikel. Kemudian, penambahan realisasi *smelter* pirometalurgi di Halmahera Tengah juga turut meningkatkan kapasitas produksi produk *nickel matte* di Maluku Utara. *Nickel matte* merupakan salah satu produk antara yang bisa menjadi bahan baku untuk baterai kendaraan listrik maupun bahan baku pembuatan besi dan baja. Hal ini merupakan indikasi bahwa peningkatan kualitas hilirisasi yang terus berkembang tidak hanya terbatas pada komoditas feronikel namun terus diolah hingga menjadi produk antara maupun produk hilir. Dengan demikian, hasil pengolahan sumber daya alam di Maluku Utara akan semakin memberikan nilai tambah yang lebih tinggi bagi perekonomian Maluku Utara dan Indonesia.

Pada triwulan II 2025, selain komoditas produk olahan nikel, ekspor LN Maluku Utara juga mencakup komoditas non-tambang seperti kayu yang diproduksi di wilayah Taliabu, serta komoditas perikanan yang dihasilkan dari hampir seluruh wilayah perairan Maluku Utara yang memiliki permintaan cukup tinggi dari negara – negara tujuan ekspor khususnya negara di kawasan Asia. Sejumlah komoditas, seperti loin tuna beku dan tuna sirip kuning merupakan komoditas non tambang yang rutin di ekspor dari Maluku Utara. Perkembangan nilai dan volume ekspor LN Maluku Utara pada triwulan II 2025 dapat dilihat pada Grafik 1.4 – Grafik 1.5



Sumber : Bea Cukai Maluku Utara, diolah
Grafik 1.4 Perkembangan Volume Ekspor LN



Sumber : Bea Cukai Maluku Utara, diolah
Grafik 1.5 Perkembangan Nilai Ekspor LN

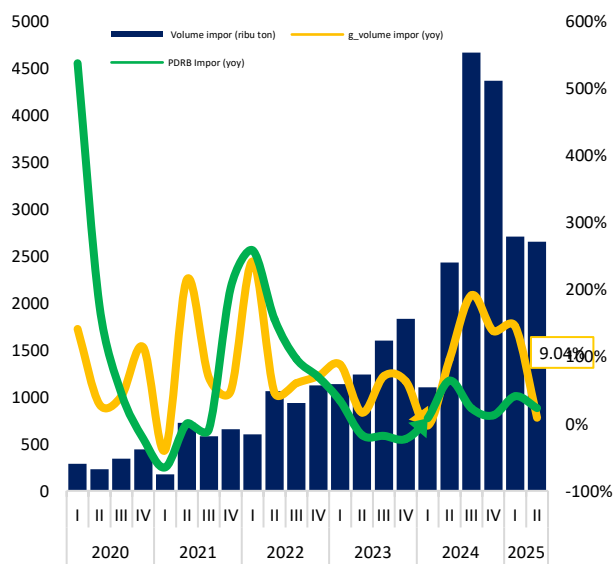
Komponen impor barang dan jasa, pada triwulan II 2025 tercatat tumbuh sebesar 33,26% (yoy), mengalami perlambatan dibandingkan dengan triwulan I 2025 yang tumbuh sebesar 51,17% (yoy). Sementara berdasarkan data dari Ditjen Bea dan Cukai, impor LN Provinsi Maluku Utara tercatat sebesar US\$ 817,12 juta, melambat dibandingkan triwulan I 2025 yang tercatat sebesar US\$ 1.147 juta. Hal ini dipengaruhi oleh perlambatan impor mesin dan peralatan mekanik untuk pembangunan smelter menjelang smelter yang akan *commissioning* pada semester II 2025. Kemudian, impor berbagai produk kimia dan

bahan kimia anorganik untuk proses pengolahan nikel menjadi faktor pertumbuhan impor. Hal ini memberikan indikasi bahwa optimalisasi produksi smelter baru dan eksisting di Maluku Utara terus ditingkatkan pada triwulan II 2025. Jika dilihat dari andil, ekspor barang dan jasa memberikan andil sebesar 90,09% sementara impor barang dan jasa memberikan andil sebesar -66,20%.

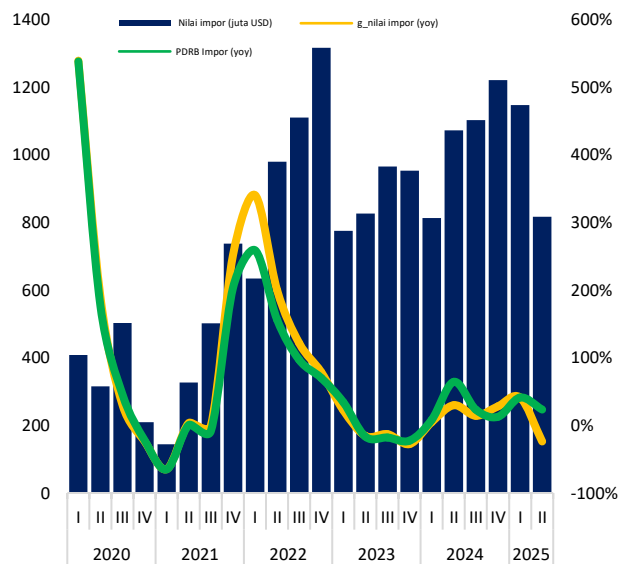
Pada triwulan II 2025, sumbangan impor LN Maluku Utara masih tetap didominasi oleh komoditas mesin dan peralatan mekanis dengan andil hingga 40,60% dari total impor, diikuti oleh garam,

belerang, batu dan semen sebesar 13,81% dari total impor, bahan bakar mineral sebesar 10,55% dari total impor, serta bijih logam, terak, dan abu sebesar 9,42% dari total impor. Andil mesin dan peralatan mekanis serta bagiannya yang masih tinggi memberikan indikasi bahwa aktivitas pertambangan dan industri pengolahan produk nikel di Maluku Utara masih terus berkembang. Selain itu, kebutuhan bahan bakar mineral diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah *smelter* yang memproduksi, serta

optimalisasi *smelter* eksisting yang sudah beroperasi di Maluku Utara. Hal ini sejalan dengan meningkatnya kebutuhan bahan bakar untuk menjalankan mesin *smelter* yang beroperasi 24 jam nonstop, serta peningkatan kebutuhan bahan kimia yang digunakan dalam proses pengolahan bijih nikel menjadi produk turunannya tersebut. Perkembangan nilai dan volume impor LN Maluku Utara serta andil 5 komoditas impor LN utama pada triwulan II 2025 dapat dilihat pada Grafik 1.6 – Grafik 1.8.



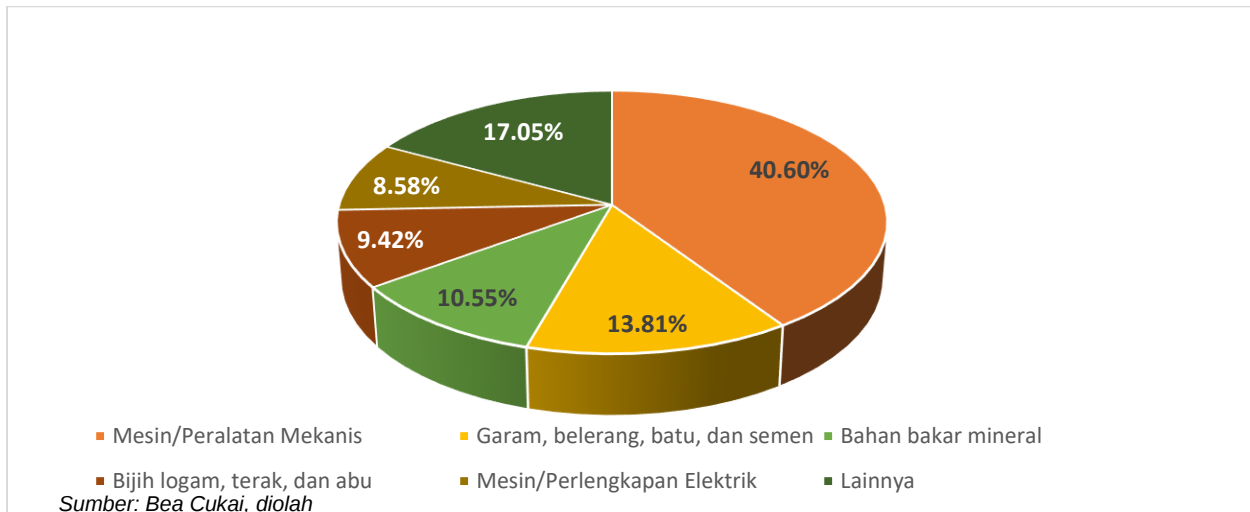
Sumber : Bea Cukai Maluku Utara, diolah



Sumber : Bea Cukai Maluku Utara, diolah

Grafik 1.6 Perkembangan Volume Impor LN

Grafik 1.7 Perkembangan Nilai Impor LN



Grafik 1.8 Persentase Nilai Impor Komoditas Tertinggi di Maluku Utara Triwulan II 2025

Pada triwulan III 2025, ekspor LN di Maluku Utara diproyeksikan masih tetap tumbuh positif. Hal ini sejalan dengan masih tingginya permintaan akan produk olahan nikel di Maluku Utara. Peningkatan permintaan ini juga didorong oleh optimalisasi produksi *smelter* pirometalurgi dan hidrometalurgi di Halmahera tengah dan Halmahera Selatan. Selanjutnya, realisasi peningkatan nilai tambah dalam negeri produk hilirisasi nikel yang sudah berlangsung disinyalir akan turut mendorong peningkatan ekspor di Maluku Utara. Pada triwulan III 2025, volume ekspor produk feronikel diperkirakan akan meningkat sejalan dengan realisasi *smelter* pirometalurgi di Halmahera Tengah dan Selatan yang telah beroperasi pada triwulan I 2025 dan triwulan II 2025. Hal ini disinyalir turut mendorong pertumbuhan ekspor LN Maluku Utara pada triwulan berjalan.

1.2.3 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

Pada triwulan II 2025 komponen PMTB Maluku Utara mengalami pertumbuhan sejalan dengan adanya realisasi pembangunan penambahan lini produksi *smelter* nikel. Pertumbuhan PMTB Maluku Utara pada triwulan II 2025 tercatat tumbuh positif sebesar 15,04% (yoy), mengalami perlambatan dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 19,70% (yoy). Pertumbuhan PMTB di Maluku Utara pada triwulan II 2025 terutama didorong oleh berlanjutnya investasi dalam pembangunan lini produksi *smelter* nikel. Realisasi investasi ini tercermin dari masih tingginya impor barang modal dan bahan baku industri yang masih berlangsung hingga triwulan II 2025. Hal yang sama juga terlihat dari investasi berupa sejumlah proyek-proyek Penanaman Modal Dalam

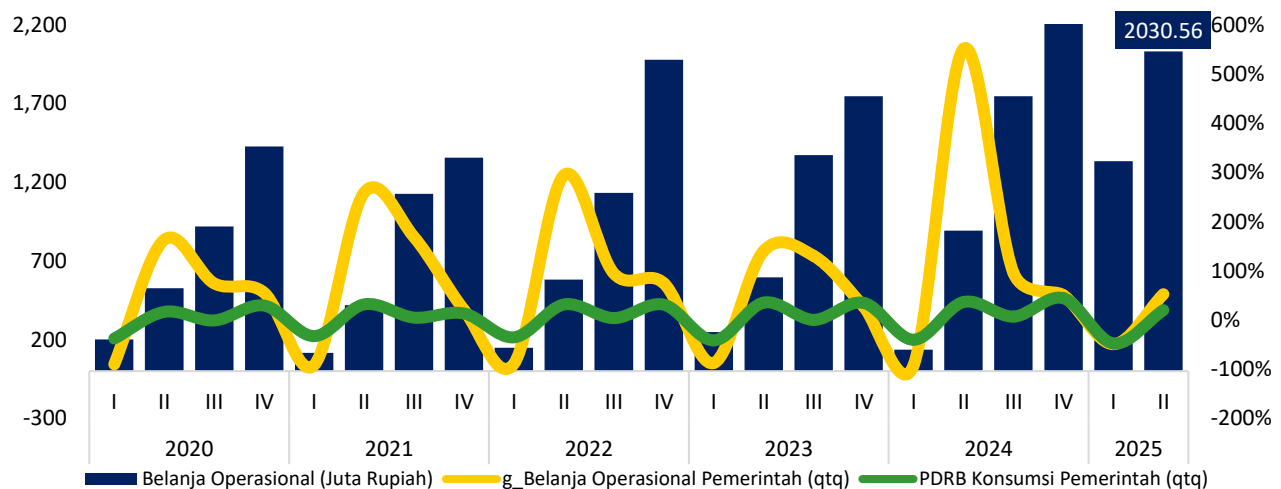
Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) yang masih tinggi.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM), pada triwulan II 2025 nilai investasi yang masuk ke Maluku Utara mencapai Rp 19 Triliun yang terdiri atas Rp17,66 Triliun investasi melalui PMA serta Rp1,34 Triliun investasi melalui PMDN. Investasi PMA di Maluku Utara hingga triwulan II 2025 masih terus didominasi oleh sektor industri logam dasar, barang logam, mesin dan peralatannya yang dimanfaatkan dalam mendukung hulu-hilir aktivitas industri pengolahan nikel.

Selanjutnya, indikator lain yang dapat dijadikan parameter dalam mengidentifikasi

tingkat investasi di Maluku Utara ialah realisasi belanja modal Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara. Pada triwulan II 2025, realisasi belanja modal pemerintah masih bertumbuh, terlihat pada Grafik 1.9. Hal ini memberikan indikasi proyek yang didanai oleh pemerintah masih berjalan.

Dilihat dari pertumbuhan tahunan, PMTB pada triwulan III 2025 diperkirakan akan mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan oleh rencana hilirisasi produk turunan yang terus berkembang setiap tahunnya. Kemudian, kebutuhan pembangunan *smelter* hidrometalurgi yang akan masuk fase *commissioning* pada tahun 2025 dapat menjadi faktor pendorong kinerja PMTB ke depan.



Sumber: DJPb Kanwil Maluku Utara, diolah

Grafik 1.9 Perkembangan Belanja Modal di Maluku Utara

1.3 Perkembangan PDRB dari Sisi Lapangan Usaha

Dilihat dari sisi lapangan usaha, mayoritas lapangan usaha (LU) utama di Maluku Utara mencatatkan pertumbuhan positif pada triwulan II 2025. Lapangan usaha utama yang menjadi penyumbang PDRB terbesar di Maluku Utara, yaitu LU industri pengolahan mencatatkan pertumbuhan tinggi meskipun mengalami perlambatan dibandingkan triwulan sebelumnya.

Dari 17 (tujuh belas) LU penyumbang pertumbuhan ekonomi dari sisi lapangan usaha, terdapat 4 (empat) lapangan usaha yang tercatat mengalami peningkatan pertumbuhan dan 13 (tiga belas) LU tercatat mengalami perlambatan. Dari tiga belas LU yang mengalami perlambatan, perlambatan pada LU Pengolahan menjadi faktor pendorong perlambatan perekonomian Maluku Utara pada triwulan II 2025, mengingat LU Pengolahan memiliki andil tertinggi sebesar 18,33%. Adapun pertumbuhan masing-masing LU pada triwulan II 2025 dapat dilihat pada tabel 1.3.

Tabel 1.3 Pertumbuhan Sektoral PDRB Sisi Lapangan Usaha

No	Lapangan Usaha	Growth (% , yoy)		
		TW II 2024	TW I 2025	TW II 2025
1	Pertanian	4.54	3.99	2.58
2	Pertambangan	0.07	48.38	60.57
3	Industri Pengolahan	17.16	75.30	57.51
4	Listrik & Gas	8.67	65.34	69.59
5	Pengadaan Air & Sanitasi	9.49	8.12	6.85
6	Konstruksi	9.74	3.22	9.21
7	Perdagangan	15.97	9.17	8.95
8	Transportasi	6.95	9.03	8.20
9	Akomodasi & Restoran	7.85	3.51	1.73
10	Informasi dan komunikasi	3.30	3.12	2.42
11	Jasa Keuangan	10.21	13.78	8.89
12	Real Estate	7.19	6.62	4.35
13	Jasa Perusahaan	6.06	5.79	6.52
14	Administrasi Pemerintahan	25.17	4.57	-0.06
15	Jasa Pendidikan	2.93	4.09	2.04

16	Jasa Kesehatan	3.38	5.20	3.43
17	Jasa lainnya	5.42	6.23	5.67
PDRB		10,75	34,58	32,09

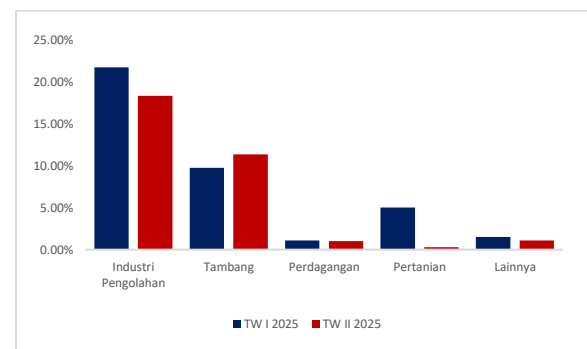
Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, diolah

■ : akselerasi dibanding triwulan sebelumnya
■ : deselerasi dibanding triwulan sebelumnya

LU industri pengolahan masih tetap menjadi kontributor terbesar dalam catatan pertumbuhan ekonomi Maluku Utara triwulan II 2025, yang tercermin dari tingginya andil LU tersebut pada capaian PDRB Provinsi Maluku Utara. Pada triwulan II 2025, empat lapangan usaha utama dengan andil tertinggi ialah LU industri pengolahan dengan penyumbang andil tertinggi yaitu sebesar 18,36%, diikuti dengan LU pertambangan dan penggalian yang memberikan andil sebesar 11,36%, LU perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor dengan andil sebesar 1,01%, serta LU pertanian dengan andil sebesar 0,28%.

Pertumbuhan ekonomi Maluku utara pada triwulan II 2025 mengalami perlambatan yang disebabkan oleh meningkatnya ketidakpastian global seiring penerapan tarif Trump yang memberikan dampak kepada komoditas utama ekspor Maluku Utara yaitu produk olahan nikel seperti feronikel dan MHP. Kendati demikian, kegiatan pengolahan bijih nikel tersebut tetap menjadi faktor pendorong peningkatan kebutuhan bijih nikel dari sisi LU pertambangan karena mendorong

peningkatan aktivitas penambangan bijih nikel sehingga mengurangi ketergantungan impor bijih nikel dari wilayah lain. Selain itu, adanya realisasi ekspansi produk olahan nikel yang memiliki nilai tambah lebih tinggi, juga turut mendorong kinerja LU industri pengolahan. Kemudian, LU perdagangan besar dan eceran juga tetap tumbuh tinggi meskipun mengalami perlambatan secara moderat pada triwulan II 2025. Perlambatan ini sejalan dengan normalisasi belanja masyarakat pasca HBKN Idul Fitri 2025. Kemudian, pada triwulan II 2025, rata-rata NTP Provinsi Maluku Utara tercatat sebesar 107,26, meningkat dibandingkan triwulan I 2025 yang tercatat sebesar 105,21. Peningkatan NTP tersebut menjadi faktor pendorong kinerja LU pertanian, kehutanan dan perikanan pada triwulan laporan.



Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah

Grafik 1.10 Andil Pertumbuhan Sektoral PDRB Sisi Lapangan Usaha Triwulan II 2025

Pertumbuhan LU industri pengolahan yang memberikan andil cukup tinggi bagi pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku Utara mengindikasikan adanya peluang untuk mendorong pertumbuhan pada sektor lapangan usaha lainnya. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif tentunya tetap menjadi harapan setiap lapisan masyarakat maupun pemerintah dan pelaku usaha di Maluku Utara. Melalui perluasan sektor pertambangan dan industri pengolahan tersebut, *multiplier effect* diharapkan dapat hadir melalui terciptanya lapangan-lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat yang berada di wilayah lingkaran tambang maupun lingkaran *smelter* pengolahan. Dengan demikian, taraf hidup masyarakat di sekitar sektor terkait juga turut meningkat. Segmentasi andil setiap LU terhadap PDRB Maluku Utara disajikan pada grafik 1.10, sedangkan perkembangan masing-masing LU secara sektoral dapat dilihat pada grafik 1.11.

Struktur lapangan usaha di Maluku Utara pada triwulan II 2025 masih didominasi oleh LU industri pengolahan dan pertambangan. Secara historis, pertumbuhan yang tinggi pada kedua lapangan usaha tersebut disinyalir telah menggerus LU pertanian. Hal ini terindikasi terjadi sejak triwulan III 2021 dimana sejak periode tersebut pangsa LU Pertanian terus mengalami penurunan. Pada triwulan II 2025 LU industri pengolahan menjadi

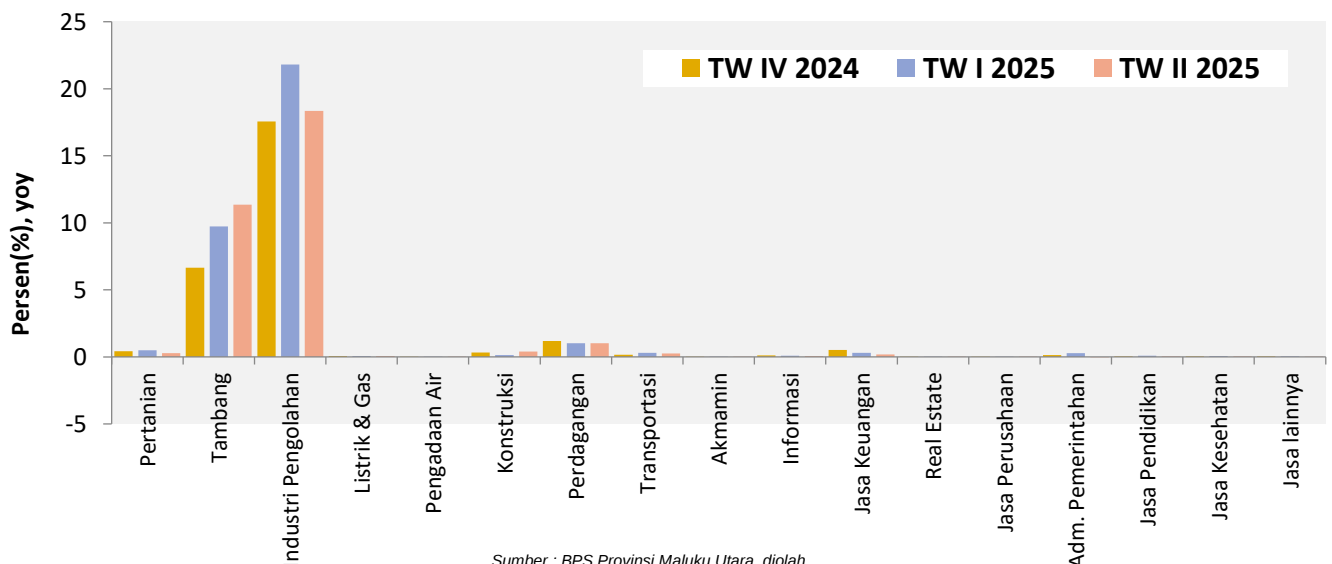
penyumbang struktur ekonomi tertinggi dengan pangsa sebesar 40,11% disusul LU pertambangan dan penggalian dengan pangsa sebesar 20,79% dan LU pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan pangsa sebesar 10,08%. Dari sini terlihat bahwa struktur LU pertanian melanjutkan tren penurunan. Sebagai perbandingan, pada triwulan II 2021 LU pertanian memberikan sumbangan dengan pangsa sebesar 18,75%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa performa sektor industri pengolahan dan pertambangan terus meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah *smelter* yang telah beroperasi di Maluku Utara. Di sisi lain, *shifting* tenaga kerja dari sektor lain khususnya LU pertanian, kehutanan, dan perikanan secara perlahan terus terjadi. Perpindahan tenaga kerja memang merupakan variabel yang perlu dikontrol lebih lanjut. Untuk itu seluruh elemen terkait harus mampu menciptakan ekosistem pada LU lain yang juga kondusif bagi para tenaga kerja, sehingga tersedia pekerjaan dan penghasilan yang cukup/memadai. Masyarakat khususnya yang berada di wilayah sekitar kawasan pertambangan dan industri pengolahan perlu adanya penguatan *trickle down effect* lebih lanjut sehingga turut merasakan dampak pertumbuhan ekonomi dari kedua sektor tersebut. *Multiplier effect* dari sektor pertambangan maupun industri pengolahan dapat ditularkan pada sektor-sektor lain yang terkait, baik secara langsung

maupun tidak langsung. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi pada sektor non-tambang pun dapat mengalami akselerasi pertumbuhan, dan lebih lanjut dapat tercipta pertumbuhan ekonomi yang inklusif di tengah-tengah masyarakat. Adapun struktur LU lain memiliki persebaran yang relatif sama dengan triwulan sebelumnya, yang terlihat pada grafik 1.12.



Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah

Grafik 1.11 Struktur PDRB Sisi Lapangan Usaha



Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah

Grafik 1.12 Perkembangan Sektoral PDRB Sisi Lapangan Usaha

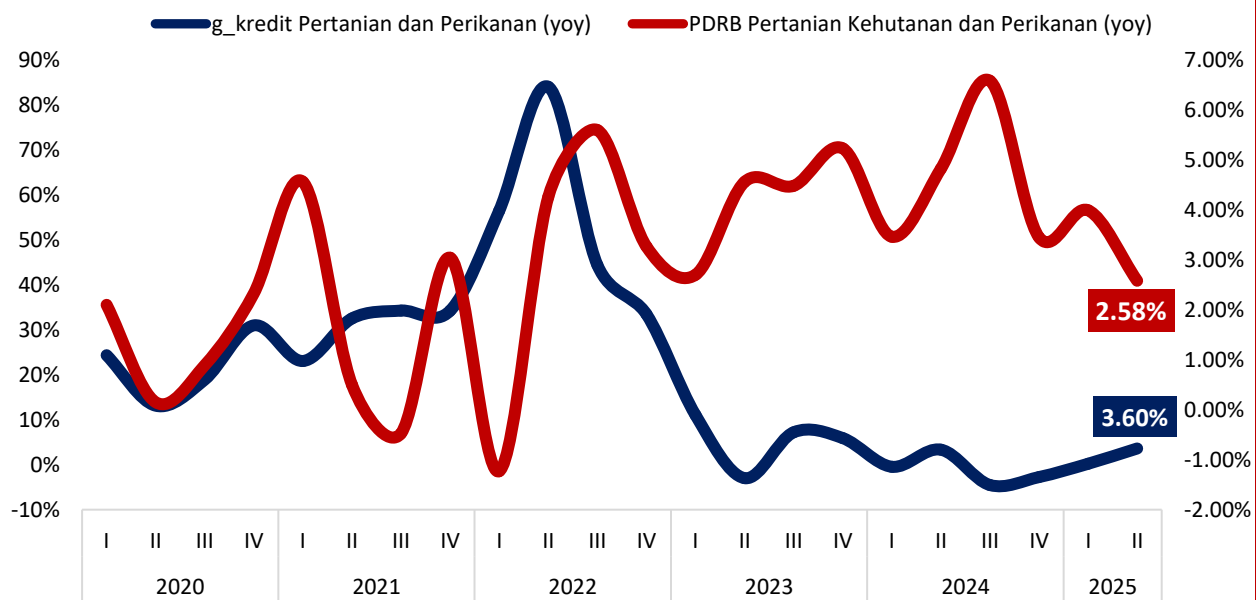
1.3.1 LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

LU pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami pertumbuhan positif yang didorong oleh komoditas hortikultura, produksi kayu dan perikanan. Pada triwulan II 2025 LU pertanian, kehutanan dan perikanan tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 2,58% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 3,99% (yoy). Perlambatan pertumbuhan LU pertanian, kehutanan, dan perikanan pada triwulan II 2025 dipengaruhi oleh produksi cengkeh yang tidak setinggi periode yang sama pada tahun sebelumnya. Di sisi lain, harga komoditas perikanan di Maluku Utara, seperti tuna loin masih stabil.

Nilai Tukar Petani (NTP) yang merupakan salah satu indikator yang berguna untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani, menunjukkan bahwa pada triwulan II 2025 rata-rata NTP mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Pada triwulan II 2025, rata-rata NTP Provinsi Maluku Utara

tercatat sebesar 107,26, meningkat dibandingkan triwulan I 2025 yang tercatat sebesar 105,21. Hal ini memberikan indikasi pendapatan yang diterima oleh petani mengalami peningkatan pada triwulan II 2025. Selanjutnya, pembiayaan pada sektor pertanian dan perikanan pada triwulan II 2025 tumbuh sebesar 3,60% (yoy), mengalami peningkatan pertumbuhan dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 0,20% (yoy). Capaian kredit ini menandakan bahwa petani dan nelayan mengalami peningkatan dalam melakukan ekspansi usaha. Pertumbuhan kredit pertanian ditunjukkan pada Grafik 1.13.

Pada triwulan III 2025, LU pertanian, kehutanan, dan perikanan diperkirakan mengalami perlambatan. Hal tersebut sejalan dengan kondisi cuaca, tinggi gelombang, serta kecepatan angin yang diperkirakan kurang kondusif pada triwulan III 2025. Kendati demikian, LU pertanian, kehutanan, dan perikanan diperkirakan masih bertumbuh positif dan menjadi salah satu pendorong pertumbuhan perekonomian di Maluku Utara.



Sumber : LBU, diolah

Grafik 1.11 Perkembangan Pertumbuhan Kredit Pertanian dan Perikanan Maluku Utara

1.3.2 LU Perdagangan Besar dan Eceran

LU perdagangan besar dan eceran tumbuh melambat sejalan dengan perlambatan konsumsi rumah tangga seiring normalisasi tingkat konsumsi pasca HBKN Idul Fitri 2025. Pada triwulan II 2025 aktivitas perdagangan besar dan eceran tercatat tumbuh sebesar 8,95% (yoy), meskipun mengalami deselerasi moderat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 9,17% (yoy). LU perdagangan besar dan eceran umumnya memiliki hubungan yang sejalan dengan realisasi konsumsi di Maluku Utara, baik konsumsi rumah tangga, konsumsi LNPR, dan konsumsi pemerintah. Sepanjang triwulan II 2025 LU perdagangan besar dan eceran mengalami pertumbuhan positif sejalan dengan konsumsi masyarakat

meningkat sejalan dengan jumlah hari libur nasional dan masa liburan sekolah. Meningkatnya aktivitas transportasi masyarakat dari-dan-keluar Maluku Utara dan pembukaan beberapa retailer nasional di Maluku Utara menjadi pendorong aktivitas perdagangan di Maluku Utara pada triwulan II 2025.

Pada triwulan III 2025, LU perdagangan besar dan eceran diperkirakan akan tetap tumbuh positif yang dipengaruhi oleh konsumsi masyarakat yang masih terjaga diiringi realisasi belanja pemerintah daerah.

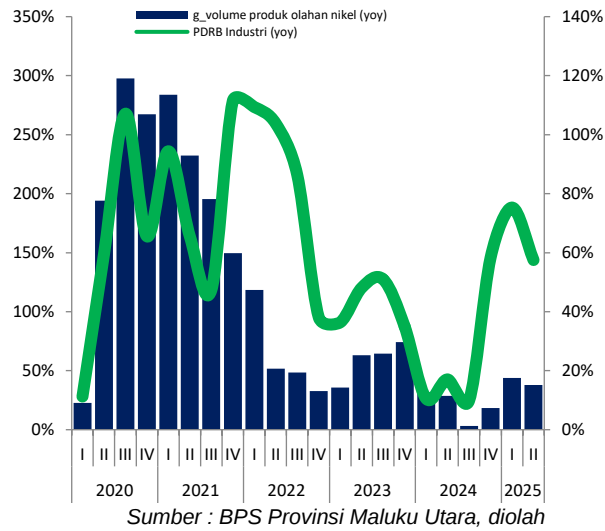
1.3.3 LU Pertambangan dan Industri Pengolahan

LU pertambangan dan pengolahan mengalami akselerasi serta menjadi

pendorong utama pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara. Kedua LU tersebut saling memiliki keterkaitan sektor hulu dan hilir. Ditinjau dari sisi hilir, fenomena pertumbuhan yang tinggi pada LU industri pengolahan terjadi sejalan dengan optimalisasi produksi *smelter* eksisting, serta beroperasinya lini produksi baru yang berada di Maluku Utara. Peningkatan produksi *smelter* di Maluku Utara juga diiringi oleh peningkatan nilai tambah dari proses hilirisasi. Maluku Utara secara aktif mengeksport produk olahan berupa *Mixed Hydroxide Precipitate* (MHP) dan *nickel plate* serta *electrolyte cobalt* yang baru diekspor pada triwulan II 2025. Di sisi lain, proses hilirisasi produk olahan nikel yang semakin mendekati baterai EV menunjukkan komitmen dari pelaku industri untuk meningkatkan nilai jual nikel. Selain itu, produk prekursor nikel, *nickel plate*, dan *electrolyte cobalt* yang merupakan produk lanjutan dari MHP juga telah berhasil diproduksi dan diekspor pada triwulan I dan II 2025. Ketiga produk tersebut dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan bahan baku aneka industri seperti baterai, dan komponen elektronik. Hal tersebut menjadi faktor pendorong mendorong kinerja LU industri pengolahan di triwulan II 2025. Sejalan dengan optimalisasi produksi dan peningkatan jumlah *smelter* yang beroperasi, kebutuhan akan komoditas nikel

ore yang menjadi bahan baku utama dalam proses pengolahan nikel di Maluku Utara juga turut meningkat sehingga mendorong pertumbuhan LU pertambangan dan penggalan.

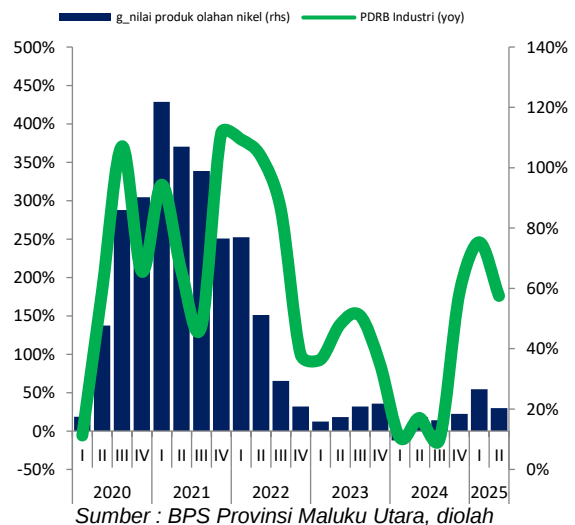
Di sisi lain, pertumbuhan nilai ekspor komoditas hilirisasi nikel Maluku Utara pada triwulan II 2025 tercatat mencapai 29,68% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat tumbuh sebesar 54,52% (yoy). Di sisi lain secara volume ekspor, komoditas turunan nikel tumbuh sebesar 37,86% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 43,95% (yoy). Kendati mengalami perlambatan, pertumbuhan yang tetap tinggi tersebut memberikan indikasi bahwa produksi produk olahan *smelter* terus dilakukan menuju titik optimalnya. Meskipun demikian, perang dagang yang memanas antara Amerika Serikat dan Tiongkok diperkirakan akan mempengaruhi permintaan produk olahan nikel yang kemudian akan berdampak pada industri pertambangan dan pengolahan nikel di Maluku Utara, mengingat sebagian besar produk olahan nikel Maluku Utara diekspor ke Tiongkok. Hubungan antara pertumbuhan volume dan nilai produksi produk olahan nikel terhadap PDRB LU Industri Pengolahan dapat dilihat pada Grafik 1.14 dan 1.15.



Grafik 1.12 Perkembangan Volume Ekspor Produk Nikel di Maluku Utara

Ditinjau dari sisi hulu industri pengolahan nikel, LU pertambangan dan penggalan tumbuh sebesar 60,57% (yoy), mengalami akselerasi dibandingkan triwulan I 2025 yang tumbuh sebesar 48,38% (yoy). Akselerasi tersebut terjadi seiring dengan peningkatan kebutuhan akan bijih nikel untuk pengolahan di smelter yang juga semakin berkembang.

Pada triwulan III 2025, diperkirakan LU industri pengolahan masih mengalami



Grafik 1.13 Perkembangan Nilai Ekspor Produk Nikel di Maluku Utara

pertumbuhan seiring optimalisasi smelter yang telah *commissioning* pada triwulan – triwulan sebelumnya. Sementara di sisi LU pertambangan diperkirakan masih mengalami pertumbuhan seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan bijih nikel dari industri pengolahan nikel. Pertumbuhan kedua LU tersebut sejalan dengan hilirisasi nikel yang semakin berkembang terutama dari pengembangan komponen baterai EV.

BAB 2 KEUANGAN PEMERINTAH

*“Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah di Maluku Utara
sampai dengan Triwulan II 2025 sebesar 25,80%”*



RINGKAS

Pagu Belanja
Tahun 2025
Rp16,99 T

Realisasi Belanja
Triwulan II 2025
Rp4,38 T

Anggaran Pendapatan Daerah pada tahun 2025 secara agregat mencapai Rp16,17 triliun. Di sisi lain, Anggaran Belanja Pemerintah Daerah secara agregat mencapai Rp16,99 triliun. Pagu Anggaran Belanja tahun 2025 turun 0,97% (yoy) dibandingkan anggaran setelah perubahan tahun 2024. Dari nominal tersebut, 79,91% atau Rp13,58 triliun merupakan APBD Kabupaten/Kota dan sisanya 20,09% atau Rp3,41 triliun merupakan APBD Provinsi Maluku Utara.

Sampai dengan triwulan II 2025 total realisasi belanja daerah secara agregat mencapai 25,80% dari pagu anggaran atau lebih rendah dibandingkan triwulan II 2024 yang berhasil merealisasikan sebesar 27,54% dari anggaran. Penurunan realisasi belanja terhadap pagu anggaran, terjadi pada realisasi belanja APBD Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Lebih lanjut realisasi APBD Kabupaten/Kota tercatat 25,83%, lebih tinggi dibandingkan realisasi APBD Provinsi yang sebesar 25,67% dari pagu anggaran.

2.1 Gambaran Umum

2.1.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah APBD Se-Provinsi Maluku Utara

Pagu Pendapatan Daerah secara agregat di Maluku Utara tahun 2025 mencapai Rp16,17 triliun. Pagu Pendapatan Daerah tahun 2025 turun 2,74% (yoy) dibandingkan anggaran pasca perubahan tahun 2024 yang diakibatkan adanya kebijakan efisiensi anggaran dari Pemerintah Pusat yaitu dana perimbangan dan insentif daerah berkurang sebesar 2,22% menjadi Rp13,16 triliun. Dari nominal tersebut, 78,70% atau Rp12,72 triliun merupakan APBD

Kabupaten/Kota dan sisanya 21,30% atau Rp3,44 triliun merupakan APBD Provinsi Maluku Utara.

Sampai dengan triwulan II 2025, total realisasi pendapatan daerah mencapai 33,18% dari pagu anggaran, atau lebih rendah dibandingkan triwulan II 2024 (38,28%). Penurunan realisasi pendapatan terhadap pagu anggaran tersebut, terjadi pada realisasi pendapatan APBD Provinsi maupun APBD Kab./Kota. Secara nominal, realisasi pada APBD Kab./Kota triwulan II 2025 tercatat 33,81%, lebih tinggi dibandingkan realisasi APBD Provinsi sebesar 30,84% dari pagu anggaran (Grafik 2.1).

Tabel 2.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Seluruh Pemda

URAIAN	Pagu APBD Semua PEMDA		% Perubahan	Realisasi APBD Semua PEMDA				Pertumbuhan Realisasi TW II 2025 (yoy)
	2024	2025		Realisasi TW II 2024		Realisasi TW II 2025		
	Rp Miliar	Rp Miliar		Rp Miliar	% Pagu	Rp Miliar	% Pagu	
PENDAPATAN DAERAH	16,625.80	16,170.81	-2.74%	6,365.11	38.28%	5,365.53	33.18%	-15.70%
PENDAPATAN ASLI DAERAH	2,357.98	2,045.38	-13.26%	726.19	30.80%	823.97	40.28%	13.46%
Pendapatan Pajak Daerah	1,318.01	1,260.37	-4.37%	530.03	40.21%	652.35	51.76%	23.08%
Pendapatan Retribusi Daerah	437.20	387.91	-11.27%	82.74	18.93%	78.41	20.21%	-5.23%
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan	24.03	16.80	-30.06%	5.18	21.56%	7.61	45.26%	46.83%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	578.75	380.29	-34.29%	108.24	18.70%	85.60	22.51%	-20.92%
PENDAPATAN TRANSFER	13,461.58	13,162.07	-2.22%	5,638.92	41.89%	4,480.05	34.04%	-20.55%
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan & Insentif Daerah	13,461.58	13,162.07	-2.22%	5,638.92	41.89%	4,480.05	34.04%	-20.55%
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	806.23	963.36	19.49%	0.01	0.00%	5.29	0.55%	100.00%
Pendapatan Transfer Antar Daerah	613.22	845.83	37.93%	-	0.00%	56.22	6.65%	100.00%
Pendapatan Hibah	130.80	56.40	-56.88%	0.01	0.01%	-	0.00%	0.00%
Pendapatan Lainnya	62.21	61.13	-1.75%	-	0.00%	5.29	8.66%	100.00%

Sumber : Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara, Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara, diolah

2.1.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah APBD Se-Provinsi Maluku Utara

Anggaran Belanja Pemerintah Daerah secara agregat di Maluku Utara tahun 2025 mencapai Rp16,99 triliun. Pagu Anggaran Belanja tersebut turun 0,97% (yoy) dibandingkan anggaran pasca perubahan tahun 2024. Dari nominal

tersebut, 79,91% atau Rp13,58 triliun merupakan APBD Kabupaten/Kota dan sisanya 20,09% atau Rp3,41 triliun merupakan APBD Provinsi Maluku Utara.

Sampai dengan triwulan II 2025, total realisasi belanja daerah mencapai 25,80% dari pagu anggaran atau lebih rendah dibandingkan triwulan II 2024 (27,54%). Penurunan realisasi belanja terhadap pagu anggaran tersebut, terjadi pada realisasi belanja APBD Provinsi maupun Kab./Kota.

Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Seluruh Pemda

URAIAN	Pagu APBD Semua PEMDA		% Perubahan	Realisasi APBD Semua PEMDA				Pertumbuhan Realisasi TW II 2025 (yoy)
	2024	2025		Realisasi TW II 2024		Realisasi TW II 2025		
	Rp Miliar	Rp Miliar		Rp Miliar	% Pagu	Rp Miliar	% Pagu	
BELANJA DAERAH	17,162.12	16,995.11	-0.97%	4,725.60	27.54%	4,384.99	25.80%	-7.21%
BELANJA OPERASIONAL	11,149.16	11,522.26	3.35%	3,491.39	31.32%	3,451.67	29.96%	-1.14%
Belanja Pegawai	4,956.92	5,685.21	14.69%	1,966.54	39.67%	2,147.16	37.77%	9.18%
Belanja Bunga	33.73	18.60	-44.85%	6.20	18.36%	2.07	11.13%	-66.59%
Belanja Subsidi	9.57	9.71	0.00%	2.86	0.00%	5.72	58.85%	99.79%
Belanja Hibah	859.83	303.98	-64.65%	273.82	31.85%	73.48	24.17%	-73.17%
Belanja Bantuan Sosial	31.46	42.36	34.64%	10.80	34.32%	6.72	15.87%	-37.75%
Belanja Bantuan Keuangan	-	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
Belanja Barang dan Jasa	5,257.65	5,462.40	3.89%	1,231.17	23.42%	1,216.52	22.27%	-1.19%
BELANJA MODAL	3,887.54	3,451.19	-11.22%	658.04	16.93%	479.44	13.89%	-27.14%
BELANJA TAK TERDUGA	85.37	212.90	149.39%	12.58	14.74%	15.05	7.07%	19.63%
Belanja Tak Terduga	85.37	212.90	149.39%	12.58	14.74%	15.05	7.07%	19.63%
TRANSFER	2,040.05	1,808.76	-11.34%	563.59	27.63%	438.84	24.26%	-22.14%
Transfer Bagi Hasil Ke KAB/KOTA/DESA	507.35	238.36	-53.02%	7.20	1.42%	104.40	43.80%	100.00%
Transfer Bantuan Keuangan Ke KAB/KOTA/DESA	1,532.70	1,570.40	2.46%	556.39	36.30%	334.44	21.30%	-39.89%

Sumber : Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara, Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara, diolah

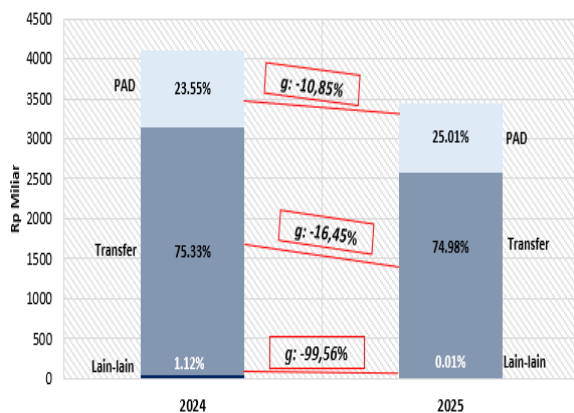
Penurunan tersebut menunjukkan bahwa realisasi belanja daerah di Provinsi Maluku Utara tergolong rendah. Salah satu faktor penyebabnya adalah strategi efisiensi dan realokasi belanja oleh pemerintah pusat. Hal tersebut mengakibatkan pengalihan

sebagian anggaran pemerintah daerah dari berbagai kegiatan seremonial menjadi belanja untuk berbagai program yang lebih produktif.

2.2 APBD Provinsi Maluku Utara Tahun 2025

APBD Provinsi Maluku Utara tahun 2025 terdiri dari **Anggaran Pendapatan Daerah** sebesar **Rp3,44 triliun** serta **Anggaran Belanja Daerah** yang mencapai **Rp3,41 triliun**. Dibandingkan dengan tahun

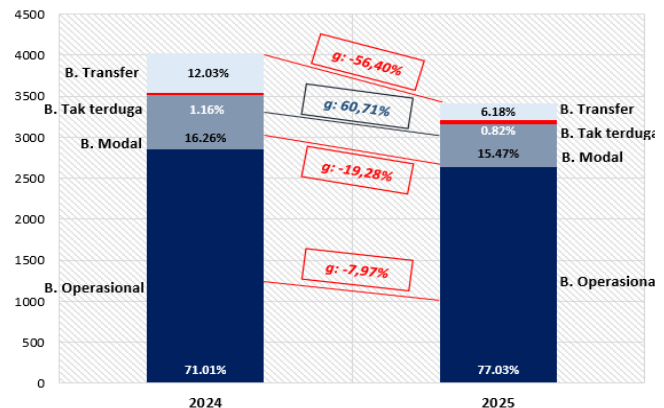
2024, pagu pendapatan daerah Provinsi Maluku Utara pada tahun 2025 mengalami penurunan. Hal ini diakibatkan adanya penurunan transfer dari Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan dan insentif daerah yang mengalami penurunan 16,45% menjadi Rp2,58 triliun sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran oleh Pemerintah Pusat.



Grafik 2.1 Perubahan proporsi APBD akun pendapatan tahun 2024 dan 2025

Sumber : Kanwil DJPb, Pemprov Maluku Utara, diolah

Dari sisi pendapatan, pendapatan transfer masih menjadi sumber terbesar pemerintah Maluku Utara yaitu sebesar 74,98% dari keseluruhan Pendapatan APBD Pemerintah Provinsi Maluku Utara 2025 (Grafik 2.1). Dari sisi belanja, belanja operasional masih menjadi sumber pengeluaran terbesar Pemerintah Maluku Utara dengan bobot sebesar 77,03% dari APBD 2025 (Grafik 2.2)



Grafik 2.2 Perubahan struktur APBD akun belanja tahun 2024 dan 2025

2.2.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah APBD Provinsi Maluku Utara

2.2.1.1 Anggaran Pendapatan Daerah

Anggaran Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Utara tahun 2025 lebih rendah dibandingkan tahun 2024, sejalan dengan ekspektasi penurunan pada seluruh pos penerimaan. Pagu PAD pada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 10,85% (yoy) dibandingkan pagu pada tahun 2024. Hal ini tercermin seiring dengan

ekspektasi menurunnya penerimaan pajak daerah, meskipun terdapat ekspektasi peningkatan pada penerimaan retribusi daerah.

Selain itu, pagu pendapatan transfer pada 2025 juga mengalami penurunan sebesar 16,45% (yoy) dibandingkan tahun 2024, dimana pada tahun 2025 diperkirakan mendapatkan penerimaan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

sebesar Rp2,58 Triliun. Selanjutnya, pagu Lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami penurunan pagu secara drastis pada tahun 2025, yakni sebesar 99,56% (yoy) dibandingkan tahun 2024, dimana pada tahun 2025 diharapkan akan terdapat penerimaan pada komponen pendapatan hibah sebesar Rp0,20 Miliar, lebih rendah jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp45,94 Miliar (Tabel 2.3).

Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Utara

URAIAN	Pagu APBD Provinsi		% Perubahan	Realisasi APBD Provinsi				Pertumbuhan Realisasi TW II 2025 (yoy)
	2024	2025		Realisasi TW II 2024		Realisasi TW II 2025		
	Rp Miliar	Rp Miliar		Rp Miliar	% Pagu	Rp Miliar	% Pagu	
PENDAPATAN DAERAH	4,104.01	3,444.83	-16.06%	1,439.87	35.08%	1,062.39	30.84%	-26.22%
PENDAPATAN ASLI DAERAH	966.61	861.70	-10.85%	455.74	47.15%	508.06	58.96%	11.48%
Pendapatan Pajak Daerah	717.83	710.04	-1.08%	378.15	52.68%	443.91	62.52%	17.39%
Pendapatan Retribusi Daerah	10.44	11.36	8.83%	2.99	28.65%	2.89	25.44%	-3.37%
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan	3.23	3.23	0.00%	1.28	39.77%	1.58	48.92%	23.14%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	235.12	137.07	-41.70%	73.32	31.18%	59.69	43.55%	-18.58%
PENDAPATAN TRANSFER	3,091.46	2,582.93	-16.45%	984.13	31.83%	554.33	21.46%	-43.67%
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan & Insentif Daerah	3,091.46	2,582.93	-16.45%	984.13	31.83%	554.33	21.46%	-43.67%
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	45.94	0.20	-99.56%	0.01	0.02%	-	0.00%	-100.00%
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
Pendapatan Hibah	45.94	0.20	-99.56%	0.01	0.02%	-	0.00%	0.00%
Pendapatan Lainnya	-	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%

Sumber : Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara, Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara, diolah

Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang didapatkan dari pemerintah pusat dalam rangka perimbangan keuangan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Penurunan pendapatan pada komponen PAD sejalan dengan ekspektasi kondisi perekonomian di Provinsi Maluku Utara.

2.2.1.2 Realisasi Pendapatan Daerah

Realisasi pendapatan Provinsi Maluku Utara sepanjang triwulan II 2025 secara nominal lebih rendah dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun 2024, hal ini diakibatkan adanya kebijakan efisiensi anggaran oleh Pemerintah Pusat yang berdampak kepada turunnya Dana Perimbangan dan Insentif Daerah. Dengan penurunan PAD tersebut, diperlukan inovasi dan evaluasi berkala terhadap manajemen dan pengembangan digitalisasi untuk

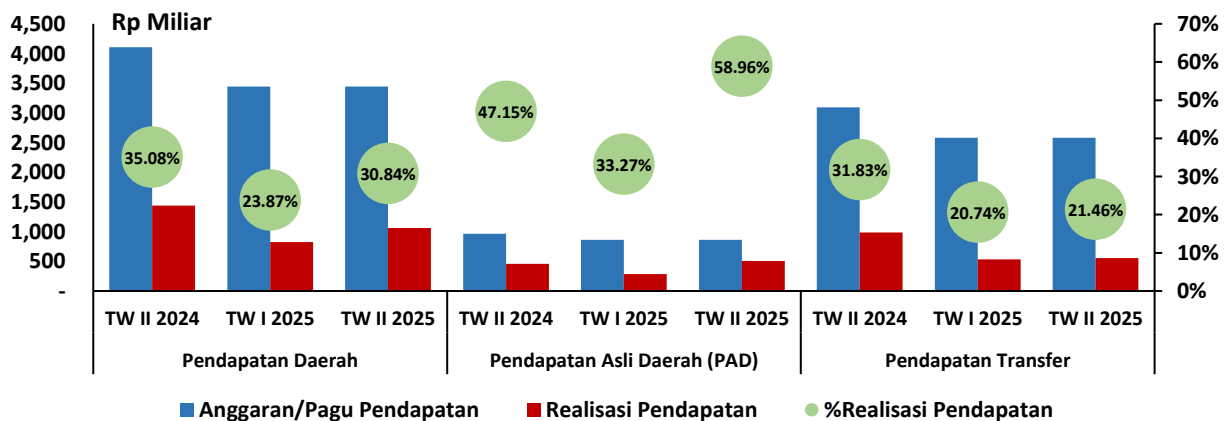
memaksimalkan pengumpulan pajak dan retribusi.

Akumulasi realisasi pendapatan pemerintah Provinsi Maluku Utara pada triwulan II 2025 tercatat sebesar Rp1,06 Triliun, dengan persentase realisasi terhadap pagu target pendapatan APBD tahun 2025 sebesar 30,84%. Ditinjau secara nominal, realisasi pendapatan pada triwulan II 2025 lebih rendah dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun 2024 yang tercatat sebesar Rp1,44 Triliun, dengan persentase sebesar 35,08% dari pagu target pendapatan tahun 2024 (Tabel 2.3).

Ditinjau dari komponen pembentuknya, terlihat bahwa realisasi pendapatan Pemerintah Provinsi Maluku Utara pada triwulan II 2025 yang paling tinggi berasal dari Pendapatan Transfer, dengan realisasi sebesar Rp554,33 Miliar atau

sebesar 21,46% dari total target penerimaan transfer 2025. Selanjutnya, realisasi PAD sampai triwulan II 2025 sebesar Rp508,06 Miliar (58,96% dari target PAD 2025). Adapun, perbandingan realisasi sampai dengan triwulan II untuk tahun 2024 dan tahun 2025 dapat dilihat di Grafik 2.3. Secara agregat, pendapatan transfer pada triwulan II 2025 mendominasi penerimaan APBD Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Selanjutnya, secara terperinci realisasi pendapatan APBD Provinsi Maluku Utara dapat dilihat pada Tabel 2.3. Perlu diketahui bahwa dalam Perda APBD Provinsi Maluku Utara tahun anggaran 2025 belum dicantumkan penjabaran spesifik terkait rencana penerimaan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan yang terdiri atas komponen Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, serta Dana Alokasi Khusus.



Grafik 2.3 Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Utara

Sumber : Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara, Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara, diolah

Komponen pendapatan APBD Provinsi Maluku Utara paling besar masih didominasi dari pendapatan transfer yang berasal dari transfer Pemerintah Pusat dengan komposisi di triwulan II 2025 sebesar 52,18% berasal dari pendapatan transfer. Pendapatan transfer daerah Provinsi Maluku Utara dari Pemerintah Pusat merupakan komponen dana insentif daerah (DID) dan dana perimbangan yang berasal dari APBN yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) pajak/bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Selain itu, sumber pendapatan APBD Provinsi Maluku Utara berasal dari penerimaan PAD pada triwulan II 2025, menunjukkan peningkatan realisasi dibandingkan dengan triwulan II 2024 melalui pertumbuhan sebesar 11,48% (yoy).

Selanjutnya, jika ditinjau dari komponen pembentuk pendapatan pajak daerah, realisasi pendapatan utama berasal dari penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) serta bea balik nama kendaraan bermotor. Sementara itu, untuk penerimaan retribusi daerah berasal dari retribusi pada komponen pelayanan kesehatan, retribusi biaya cetak peta, retribusi pelayanan pelabuhan, serta retribusi izin perikanan. Selanjutnya, untuk komponen pendapatan lain-lain, penerimaan paling tinggi berasal dari hasil ganti rugi, penerimaan jasa giro, serta pendapatan bunga.

Kondisi tersebut, disebabkan masih lemahnya penyusunan potensi/target pendapatan akibat penetapan target pendapatan yang belum sepenuhnya memperhitungkan kondisi objektif potensi pendapatan yang kurang nyata. Selain itu, masih kurang optimalnya pemungutan pajak dan retribusi daerah akibat relatif rendahnya kesadaran Wajib Pajak, serta SOP terkait mekanisme penagihan pajak/retribusi daerah yang belum sepenuhnya terintegrasi dan masih minimnya SDM dalam pelaksanaan pemungutan pajak.

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan PAD yakni: 1) menetapkan regulasi tentang perhitungan potensi/target pendapatan dengan kondisi objektif potensi pendapatan yang nyata; 2) memaksimalkan peran perusahaan daerah dalam peningkatan PAD; dan 3) penerapan UU No. 1 Tahun 2023 serta PP No. 35 Tahun 2024 dalam pemungutan pajak. Selain itu, untuk meningkatkan PAD adalah melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah, yaitu 1) optimalisasi Wajib Pajak dan subjek serta objek pajak di Daerah; 2) pengumpulan data wajib pajak untuk *database* pajak sebagai dasar pemungutan; 3) pemanfaatan teknologi informasi dalam pemungutan pajak; 4) memberlakukan insentif pajak (*Tax Holiday*) kepada pelaku usaha; dan 4) bisa dilakukan perbaikan iklim investasi di daerah dengan cara pemberian insentif bagi investor.

2.2.2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah APBD Provinsi Maluku Utara

2.2.2.1 Anggaran Belanja Daerah

Anggaran Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp3,41 triliun, lebih rendah 15,16% dibandingkan anggaran tahun 2024 (Tabel 2.4). Penurunan nilai anggaran terjadi pada sebagian besar komponen Belanja Daerah, dengan tingkat penurunan tertinggi pada komponen Belanja Transfer dengan nilai sebesar 56,40% (yoy) atau menjadi sebesar

Rp211,06 Miliar. Penurunan lainnya terjadi pada komponen Belanja Modal sebesar 19,28% (yoy) atau menjadi sebesar Rp 528,24 Miliar.

Adapun pada komponen Belanja Operasional terdapat penurunan sebesar 7,97% (yoy) atau sebesar Rp2,63 Triliun pada tahun 2025. Hal tersebut dikarenakan adanya penurunan pada Belanja Bunga (50,00% yoy) dan Belanja Hibah (64,00% yoy). Secara keseluruhan, penurunan anggaran Belanja Pemerintah Provinsi Maluku Utara, sejalan dengan menurunnya target Pendapatan Daerah pada tahun 2025.

Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara

URAIAN	Pagu APBD Provinsi		% Perubahan	Realisasi APBD Provinsi				Pertumbuhan
	2024	2025		Realisasi TW II 2024		Realisasi TW II 2025		Realisasi TW II 2025 (yoy)
	Rp Miliar	Rp Miliar		Rp Miliar	% Pagu	Rp Miliar	% Pagu	
BELANJA DAERAH	4,024.53	3,414.36	-15.16%	1,044.00	25.94%	876.63	25.67%	-16.03%
BELANJA OPERASIONAL	2,857.98	2,630.06	-7.97%	892.50	31.23%	747.11	28.41%	-16.29%
Belanja Pegawai	1,177.00	1,197.35	1.73%	496.50	42.18%	519.89	43.42%	4.71%
Belanja Bunga	12.18	6.09	-50.00%	5.08	41.72%	2.07	33.99%	-59.27%
Belanja Subsidi	-	-	0.00%	-	0.00%	2.48	0.00%	100.00%
Belanja Hibah	319.20	114.62	-64.09%	130.14	40.77%	31.05	27.09%	-76.14%
Belanja Bantuan Sosial	0.49	6.10	100.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
Belanja Bantuan Keuangan	-	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
Belanja Barang dan Jasa	1,349.11	1,305.90	-3.20%	260.77	19.33%	191.62	14.67%	-26.52%
BELANJA MODAL	654.41	528.24	-19.28%	49.04	7.49%	27.96	5.29%	-42.99%
BELANJA TAK TERDUGA	28.00	45.00	60.71%	-	0.00%	0.31	0.69%	100.00%
Belanja Tak Terduga	28.00	45.00	60.71%	-	0.00%	0.31	0.69%	0.00%
TRANSFER	484.14	211.06	-56.40%	102.46	21.16%	101.25	47.97%	-1.18%
Transfer Bagi Hasil Ke KAB/KOTA/DESA	483.64	211.06	-56.36%	-	0.00%	101.25	47.97%	100.00%
Transfer Bantuan Keuangan Ke KAB/KOTA/DESA	0.50	-	-100.00%	102.46	100.00%	-	0.00%	0.00%

Sumber : Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara, Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara, diolah

Penurunan pada sebagian besar pagu Belanja Daerah dikarenakan khususnya oleh efisiensi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) dan Penurunan Transfer ke Daerah (TKD).

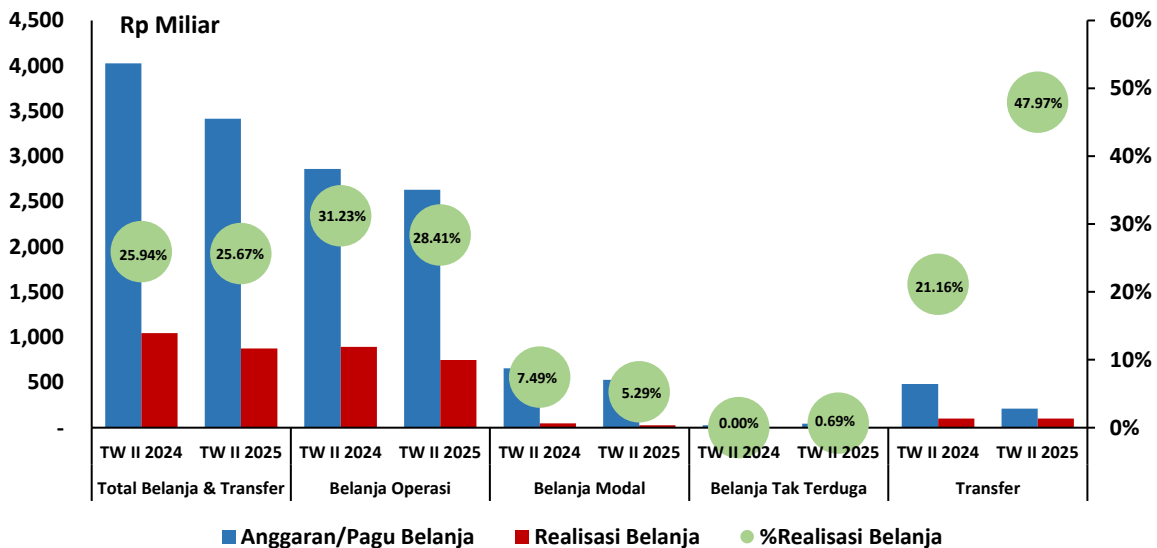
2.2.2.2 Realisasi Belanja Daerah

Realisasi belanja Provinsi Maluku Utara sepanjang triwulan II 2025 secara nominal lebih rendah dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun 2024, hal tersebut dipengaruhi oleh sebagian besar komponen belanja yakni belanja

operasional, belanja modal, dan belanja transfer. Selanjutnya, realisasi belanja APBD Provinsi Maluku Utara pada triwulan II 2025 mencapai Rp876,63 Miliar dengan persentase realisasi sebesar 25,67% dari pagu anggaran belanja tahun 2025 (Grafik 2.4). Realisasi belanja APBD tersebut, lebih rendah jika dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun 2024 yang terealisasi sebesar Rp1,04 Triliun dengan persentase sebesar 25,94% dari pagu target belanja

tahun 2024 (Tabel 2.4) atau mengalami penurunan sebesar 16,03% (yoy).

Pada triwulan II 2025 realisasi Belanja Operasional sebesar Rp747,11 Miliar atau sebesar 28,41%, dengan realisasi terbesar untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Hibah. Selanjutnya, pada triwulan II 2025 untuk Belanja Modal sebesar Rp27,96 Miliar, Belanja Transfer sebesar Rp101,25 miliar, dan Belanja Tak Terduga sebesar Rp0,31 Miliar (Grafik 2.4).



Sumber : Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara, Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara, diolah

Grafik 2.4 Persentase Realisasi Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara (Kumulatif)

Secara agregat, sumbangan realisasi terbesar pada APBD Provinsi Maluku Utara hingga triwulan II 2025 berasal dari komponen operasional, dengan komposisi terbesar pada belanja pegawai sebesar Rp519,89 Miliar, belanja barang dan jasa sebesar Rp191,62 Miliar, serta belanja hibah sebesar Rp31,05 Miliar. Realisasi Belanja Pegawai digunakan

untuk merealisasikan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai negeri serta realisasi tambahan penghasilan bagi ASN.

Selanjutnya, komponen Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pembelian barang, baik yang bersifat operasional maupun non-operasional yang digunakan

secara internal ataupun dimanfaatkan oleh masyarakat.

2.3 APBD 10 Kabupaten/ Kota Di Maluku Utara Tahun 2025

APBD Kabupaten/Kota di Maluku Utara tahun 2025, lebih tinggi dibandingkan tahun 2024. Peningkatan terlihat dari sisi Pendapatan Daerah dan dari sisi Belanja Daerah. Pada tahun 2025 Anggaran Pendapatan Daerah tercatat tumbuh sebesar 1,63% (yoy) atau mencapai Rp12,72 Triliun (Tabel 2.5) dan Anggaran Belanja Daerah tercatat tumbuh sebesar 3,37% (yoy) atau mencapai Rp13,58 triliun (Tabel 2.6). Hal ini berdampak pada nilai defisit anggaran Kabupaten/Kota di Maluku Utara, dari Rp0,62 triliun pada tahun 2024 menjadi Rp0,85 triliun pada tahun 2025.

2.3.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah APBD Kabupaten/Kota

2.3.1.1 Anggaran Pendapatan Daerah

Anggaran Pendapatan Daerah 10 Kabupaten/Kota di Maluku Utara tahun 2025 lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 yang didominasi oleh Pendapatan Transfer (Tabel 2.5). Proporsi anggaran Pendapatan Asli Daerah pada APBD Kabupaten/Kota turun menjadi 9,30% pada tahun 2025.

Penurunan tersebut, sejalan dengan belum optimalnya PAD pada 2025 yang jauh dari target pagu anggaran. Oleh karena itu, perlu didorong untuk menaikkan Pendapatan Daerah terutama dari pajak daerah berupa pajak hotel dan restoran, serta pajak kendaraan bermotor.

Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota Maluku Utara

URAIAN	Pagu APBD Provinsi		% Perubahan	Realisasi APBD Provinsi				Pertumbuhan Realisasi TW II 2025 (yoy)
	2024	2025		Realisasi TW II 2024		Realisasi TW II 2025		
	Rp Miliar	Rp Miliar		Rp Miliar	% Pagu	Rp Miliar	% Pagu	
PENDAPATAN DAERAH	12,521.78	12,725.98	1.63%	4,925.24	39.33%	4,303.15	33.81%	-12.63%
PENDAPATAN ASLI DAERAH	1,391.37	1,183.68	-14.93%	270.45	19.44%	315.91	26.69%	16.81%
Pendapatan Pajak Daerah	600.18	550.33	-8.31%	151.88	25.31%	208.44	37.88%	37.24%
Pendapatan Retribusi Daerah	426.76	376.55	-11.77%	79.75	18.69%	75.53	20.06%	-5.29%
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan	20.80	13.57	0.00%	3.90	18.73%	6.03	44.44%	54.73%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	343.63	243.22	-29.22%	34.92	10.16%	25.91	10.65%	-25.81%
PENDAPATAN TRANSFER	10,370.12	10,579.14	2.02%	4,654.79	44.89%	3,925.72	37.11%	-15.66%
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan & Insentif Daerah	10,370.12	10,579.14	2.02%	4,654.79	44.89%	3,925.72	37.11%	-15.66%
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	760.29	963.16	26.68%	-	0.00%	5.29	0.55%	100.00%
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	613.22	845.83	0.00%	-	0.00%	56.22	0.00%	100.00%
Pendapatan Hibah	84.86	56.20	-33.77%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
Pendapatan Lainnya	62.21	61.13	0.00%	-	0.00%	5.29	8.65%	100.00%

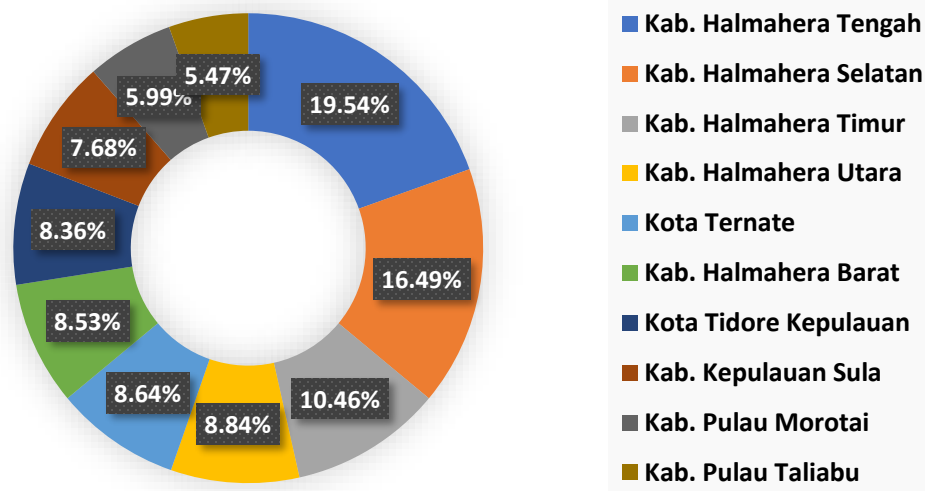
Sumber : Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara, Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara, diolah

Secara spasial, Kabupaten Halmahera Tengah memiliki target anggaran Pendapatan Daerah tertinggi yaitu Rp2,50 Triliun atau

19,54% dari total anggaran Pendapatan Daerah. Sementara itu, anggaran Pendapatan Daerah terendah berada di Kabupaten Pulau

Taliabu yaitu sebesar Rp699,87 miliar atau 5,47% dari total anggaran Pendapatan

Daerah 10 Kabupaten/Kota di Maluku Utara (Grafik 2.5).



Sumber : Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara, Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara (2025), diolah

Grafik 2.5 Proporsi Anggaran Pendapatan Daerah Spasial di Maluku Utara

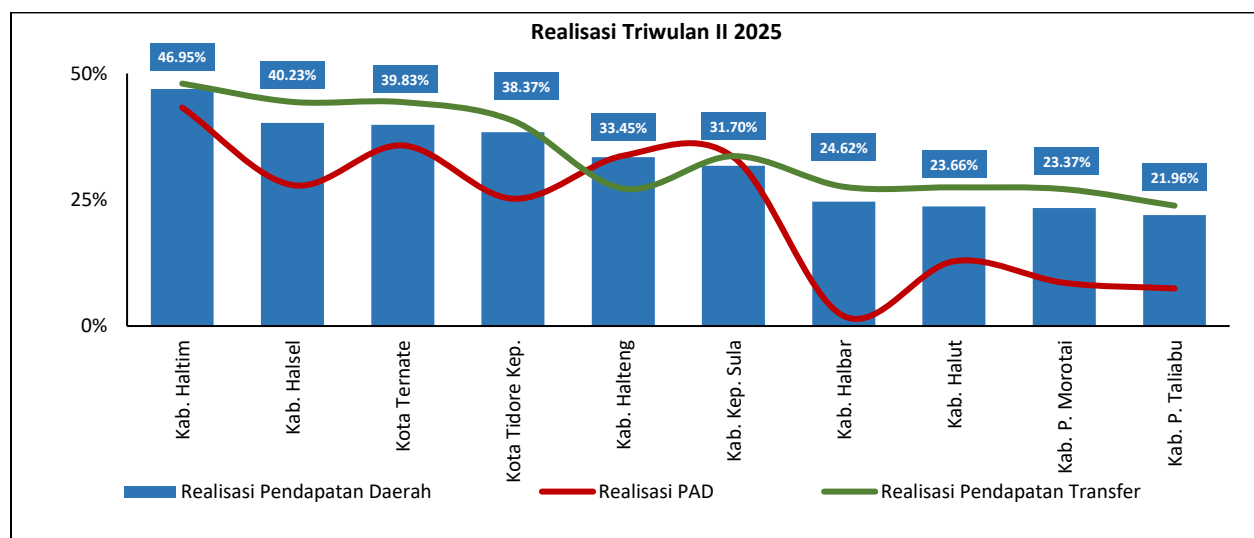
2.3.1.2 Realisasi Pendapatan Daerah

Realisasi Pendapatan Daerah 10 Kabupaten/Kota di Maluku Utara sampai dengan triwulan II 2025 sebesar 33,81% dari pagu anggaran, lebih rendah dibandingkan realisasi sampai dengan triwulan II 2024 atau sebesar 39,33%. Secara nominal, realisasi pendapatan APBD Kabupaten/Kota Maluku Utara sampai dengan triwulan II 2025 sebesar Rp4,30 triliun, lebih rendah dibandingkan dengan realisasi periode yang sama pada tahun 2024 sebesar Rp4,92 triliun (Tabel 2.5). Penurunan realisasi pendapatan daerah tercatat di daerah Halmahera Selatan, Pulau Morotai, Halmahera Timur, Tidore Kepulauan, dan Halmahera Barat.

Secara nominal, realisasi Pendapatan Daerah triwulan II 2025 mengalami penurunan sebesar 12,63% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun 2024. Realisasi Pendapatan Daerah masih ditopang oleh Pendapatan Transfer, dengan realisasi di triwulan II 2025

mencapai 37,11% dari pagu anggaran 2025, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2024 (44,89%). Realisasi pada komponen Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan secara nominal, dimana realisasinya mencapai Rp315,91 miliar, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2024 (Rp270,45 miliar). Secara nominal, komponen pendapatan sebagian besar mengalami kenaikan yakni PAD sebesar 16,81% (yoy) dan komponen Lain-Lain Pendapatan yang Sah sebesar 100% (yoy) sebagaimana terlihat pada tabel 2.5. Sedangkan komponen Pendapatan Transfer mengalami penurunan sebesar 15,66% (yoy).

Secara spasial, Kabupaten Halmahera Timur merupakan daerah yang mampu merealisasikan anggaran Pendapatan Daerah tertinggi sampai triwulan II 2025 sebesar 45,95% dari pagu anggaran, sementara realisasi Pendapatan Daerah terendah terjadi di Kabupaten Pulau Taliabu yakni sebesar 21,96% (Grafik 2.6).



Sumber : Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara, Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara, diolah

Grafik 2.6 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota Maluku Utara

Realisasi Pendapatan Daerah triwulan II 2025 yang tinggi di Kabupaten Halmahera Timur didukung oleh tingginya realisasi Pendapatan PAD sebesar 43,27% dari anggaran, serta Pendapatan Transfer sebesar 48,01% dari anggaran. Meskipun demikian, jika dilihat dari sumber Pendapatan Daerah, sebagian besar Kabupaten/Kota di Maluku Utara masih didominasi dari Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat. Hal ini, menunjukkan bahwa tingkat kemandirian daerah sebagian besar Kabupaten/Kota di Maluku Utara masih rendah.

2.3.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah APBD Kabupaten/Kota

2.3.2.1 Anggaran Belanja Daerah

Anggaran Belanja Daerah 10 Kabupaten/Kota di Maluku Utara tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp13,58 triliun, lebih tinggi 3,37% dibandingkan anggaran tahun 2024 (Tabel 2.6). Anggaran Belanja tersebut, didominasi oleh Belanja Operasional sebesar Rp8,89 triliun atau 65,48% dari total anggaran Belanja Daerah.

Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Kab/Kota

URAIAN	Pagu APBD Provinsi		% Perubahan	Realisasi APBD Provinsi				Pertumbuhan
	2024	2025		Realisasi TW II 2024		Realisasi TW II 2025		Realisasi TW II
	Rp Miliar	Rp Miliar		Rp Miliar	% Pagu	Rp Miliar	% Pagu	2025 (yoy)
BELANJA DAERAH	13,137.59	13,580.75	3.37%	3,681.59	28.02%	3,508.36	25.83%	-4.71%
BELANJA OPERASIONAL	8,291.18	8,892.20	7.25%	2,598.89	31.35%	2,704.56	30.41%	4.07%
Belanja Pegawai	3,779.92	4,487.86	18.73%	1,470.04	38.89%	1,627.27	36.26%	10.70%
Belanja Bunga	21.56	12.51	-41.96%	1.11	5.17%	-	0.00%	-100.00%
Belanja Subsidi	9.57	9.71	0.00%	2.86	29.88%	3.23	33.26%	12.89%
Belanja Hibah	540.62	189.36	-64.97%	143.68	26.58%	42.43	22.41%	-70.47%
Belanja Bantuan Sosial	30.96	36.26	17.10%	10.80	34.87%	6.72	18.53%	-37.75%
Belanja Bantuan Keuangan	-	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
Belanja Barang dan Jasa	3,908.54	4,156.50	6.34%	970.40	24.83%	1,024.90	24.66%	5.62%
BELANJA MODAL	3,233.14	2,922.95	-9.59%	608.99	18.84%	451.47	15.45%	-25.87%
BELANJA TAK TERDUGA	57.37	167.90	192.68%	12.58	21.93%	14.74	8.78%	17.15%
Belanja Tak Terduga	57.37	167.90	192.68%	12.58	21.93%	14.74	8.78%	17.15%
TRANSFER	1,555.91	1,597.70	2.69%	461.13	29.64%	337.58	21.13%	-26.79%
Transfer Bagi Hasil Ke KAB/KOTA/DESA	23.71	27.30	15.13%	7.20	30.36%	3.15	11.54%	-56.24%
Transfer Bantuan Keuangan Ke KAB/KOTA/DESA	1,532.20	1,570.40	2.49%	453.93	29.63%	334.44	21.30%	-26.32%

Sumber : Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara, Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara, diolah

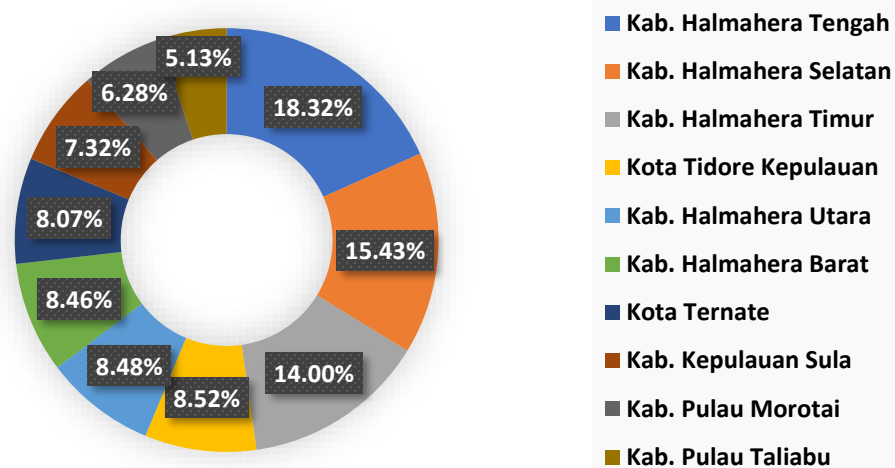
Peningkatan nilai pagu anggaran terjadi pada komponen Belanja Operasional (7,25% yoy), Belanja Tak Terduga (192,68% yoy), dan Belanja Transfer (2,69% yoy).

Selanjutnya, komponen Belanja Modal mengalami penurunan yakni sebesar 9,59% (yoy) sebagaimana terlihat pada Tabel 2.6.

Secara spasial, Kabupaten Halmahera Tengah memiliki anggaran Belanja Daerah

terbesar, yang mencapai Rp2,50 triliun atau 18,32% dari total anggaran Belanja Daerah (Grafik 2.7). Sementara itu, Kabupaten Pulau Taliabu merupakan daerah dengan anggaran

Belanja Daerah terendah yaitu sebesar Rp699,87 miliar atau 5,13% dari total anggaran Belanja Daerah (Grafik 2.7).



Sumber : Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara, Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara, diolah
Grafik 2.7 Proporsi Anggaran Belanja Daerah Spasial Kabupaten/Kota Tahun 2025

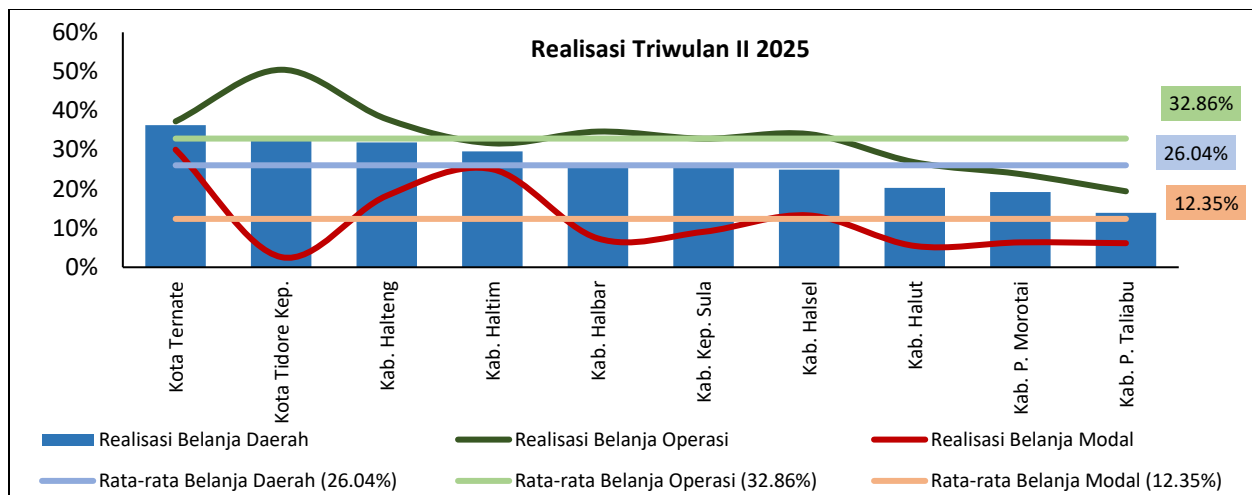
2.3.2.2 Realisasi Belanja Daerah

Realisasi Belanja Daerah 10 Kabupaten/Kota di Maluku Utara sampai dengan triwulan II 2025 sebesar 25,83% dari pagu anggaran, lebih rendah dibandingkan realisasi sampai dengan triwulan II 2024 (28,02%). Secara nominal, realisasi anggaran Belanja Daerah mengalami penurunan sebesar 4,71% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (Tabel 2.6). Adapun penurunan realisasi anggaran Belanja Daerah pada triwulan II 2025 secara nominal, terjadi pada Belanja Modal (25,87% yoy) dan Belanja Transfer (26,79% yoy). Selanjutnya, kenaikan realisasi anggaran belanja daerah terjadi pada Belanja

Operasional (4,07% yoy) dan Belanja Tak Terduga (17,15% yoy).

Secara spasial, persentase realisasi Belanja Daerah tertinggi sampai dengan triwulan I 2025 dicapai oleh Kota Ternate (36,25% dari pagu) seiring dengan realisasi Belanja Modal terbesar (30,02% dari pagu), dan di sisi lain realisasi Belanja Operasional terbesar di Kota Tidore kepulauan (50,44% dari pagu).

Presentase realisasi Belanja Daerah terendah sampai dengan triwulan II 2025 berada di Kabupaten Pulau Taliabu (13,93% dari pagu), secara terperinci untuk realisasi Belanja Daerah APBD Kab./Kota Maluku Utara dapat dilihat pada Grafik 2.8.



Sumber : Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara, Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara, diolah

Grafik 2.8 Persentase Realisasi Belanja Daerah APBD Kab/Kota Maluku Utara

Realisasi anggaran Belanja Daerah 10 Kabupaten/Kota di Maluku Utara secara keseluruhan pada triwulan II 2025 sudah cukup baik. Meskipun demikian, ada beberapa isu yang perlu diperhatikan oleh Kabupaten/Kota di Maluku Utara yakni terdapat beberapa OPD yang melakukan kesalahan perencanaan Rencana Anggaran Kas, sehingga beberapa belanja yang seharusnya terealisasi di Triwulan I harus menunggu sampai dengan Semester I agar dapat terlaksana.

Kondisi tersebut, perlu menjadi perhatian untuk perbaikan tata kelola di lingkup pemerintahan Kabupaten/Kota Maluku Utara, khususnya dalam aspek perencanaan dan penganggaran, sehingga realisasi anggaran dapat dilakukan secara lebih optimal.

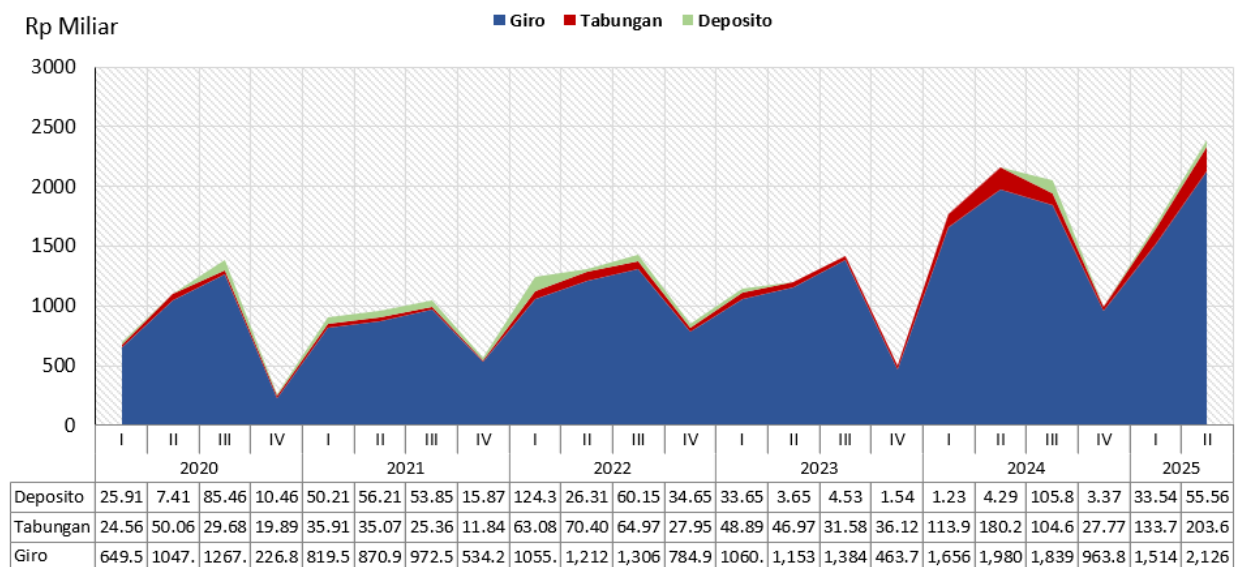
2.4 Rekening Pemerintah

Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) PEMDA di perbankan Maluku Utara pada triwulan II 2025 secara keseluruhan mengalami peningkatan jika dibandingkan triwulan II 2024, dengan didominasi dana pemerintah daerah dalam bentuk giro. Dana pemerintah yang tersimpan pada perbankan terdiri dari giro, tabungan, dan deposito, sampai dengan triwulan II 2025 berada pada posisi Rp2,39 triliun. Dana PEMDA di Provinsi Maluku Utara pada triwulan II 2025 dibandingkan dengan posisi triwulan II 2024 mengalami peningkatan sebesar 10,20% (yoy).

Dana pemerintah daerah dalam bentuk giro per triwulan II 2025 tercatat sebesar Rp2,13 triliun atau meningkat 7,38% (yoy) dibandingkan triwulan II 2024 dengan posisi Rp1,98 triliun. Sementara itu, dana pemerintah dalam bentuk tabungan pada

triwulan II 2025 tercatat sebesar Rp203,64 miliar, meningkat 12,98% (yoy) dibandingkan triwulan II 2024 dengan posisi Rp180,25 miliar. Selanjutnya, dana pemerintah dalam bentuk deposito per triwulan II 2025 tercatat

sebesar Rp55,56 miliar, naik sebesar 1.195,60% (yoy) dibandingkan triwulan II 2024 dengan posisi Rp4,29 miliar. Secara keseluruhan Dana pemerintah yang tersimpan pada perbankan dapat dilihat pada grafik 2.9.



Sumber : Bank Indonesia, diolah

Grafik 2.9 Perkembangan DPK Pemda di Perbankan Maluku Utara (dalam Miliar Rupiah)

BAB 3 PERKEMBANGAN INFLASI PROVINSI MALUKU UTARA

“Inflasi TW II 2025 Terkendali Berada dalam Target Inflasi Nasional”



RINGKASAN

Inflasi IHK Maluku Utara pada triwulan II 2025 tercatat sebesar 2,01% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan I 2025 sebesar 2,32% (yoy). Kelompok penyumbang inflasi terbesar sepanjang triwulan II 2025 adalah Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau mengalami inflasi tertinggi, tercatat sebesar 4,08% (yoy) dan andil inflasi sebesar 1,39% (yoy). Kemudian disusul oleh Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga dengan inflasi sebesar 4,17% (yoy) dengan andil inflasi sebesar 0,80% (yoy). Selanjutnya, Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya mengalami inflasi sebesar 5,45% (yoy) dengan andil inflasi sebesar 0,39% (yoy). Dari sisi komoditas, penyumbang andil inflasi tertinggi sepanjang triwulan II 2025 adalah komoditas bahan bakar rumah tangga, emas perhiasan, kontrak rumah, ikan bakar, dan kangkung.

Secara akumulasi sampai dengan Juli 2025, tercatat Maluku Utara mengalami inflasi sebesar 2,13% (ytd). Tekanan inflasi sepanjang triwulan berjalan diperkirakan akan mengalami penurunan dibandingkan triwulan II 2025. Penurunan tekanan inflasi terutama disebabkan normalisasi harga komoditas cabai rawit diakibatkan mulai stabilnya pasokan dari daerah sentra produksi dan penyesuaian ke bawah harga BBM nonsubsidi sejalan dengan penurunan harga minyak dunia.

Inflasi *mtm*
Triwulan II 2025

0,27%

Inflasi *yoy*
Triwulan II 2025

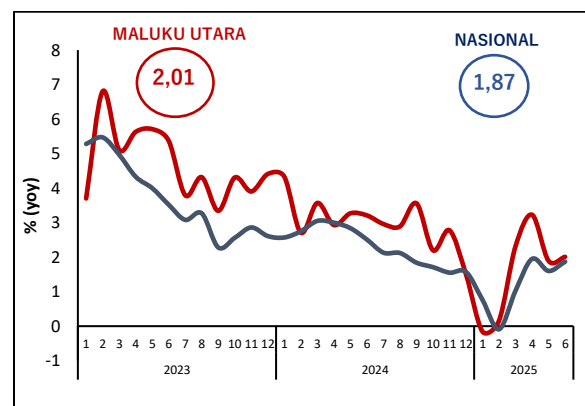
2,01%

3.1 Kondisi Umum Inflasi IHK Maluku Utara

Inflasi IHK Maluku Utara pada triwulan II 2025 tercatat sebesar **2,01% (yoy)**. Inflasi pada triwulan II 2025 tercatat lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yaitu sebesar 2,32% (yoy). Inflasi IHK Maluku Utara pada triwulan II 2025 tercatat lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang tercatat sebesar 1,87% (yoy) sebagaimana ditunjukkan pada grafik 3.1. Berdasarkan grafik tersebut, terlihat bahwa pada triwulan II 2025 tekanan inflasi Maluku Utara mengalami penurunan terutama disebabkan oleh penyesuaian harga ke bawah komoditas bensin terutama bensin nonsubsidi, tarif angkutan udara, dan komoditas ikan cakalang/ikan sisik.

Penyesuaian harga ke bawah untuk komoditas bensin nonsubsidi sejalan dengan penurunan harga minyak mentah dunia, serta mulai stabilnya nilai tukar rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat. Pada triwulan II 2025, Pemerintah tercatat melakukan penyesuaian harga ke bawah terhadap bensin nonsubsidi jenis Pertamina dan Dexlite sebanyak tiga kali diantaranya pada tanggal 1 April 2025, 1 Mei 2025, 1 Juni 2025. Bensin jenis Pertamina tercatat mengalami penurunan dari Rp13.200/liter menjadi Rp12.400/liter, adapun harga bensin jenis Dexlite tercatat turun dari Rp14.650/liter menjadi Rp13.020/liter.

Selain itu, kebijakan stimulus Pemerintah berupa penurunan harga tiket pesawat domestik pada momen libur sekolah juga menjadi salah satu faktor penahan inflasi lebih tinggi. Di lain sisi, tekanan inflasi triwulan II 2025 terutama didorong oleh peningkatan harga bahan bakar rumah tangga yaitu minyak tanah. Peningkatan harga minyak tanah disebabkan adanya permasalahan distribusi baik di tingkat agen maupun sub agen. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, sebanyak 53,58% Rumah Tangga di Maluku Utara masih menggunakan minyak tanah sebagai bahan bakar utama memasak. Hal ini disebabkan, Maluku Utara belum termasuk dalam wilayah program konversi minyak tanah ke Elpiji.

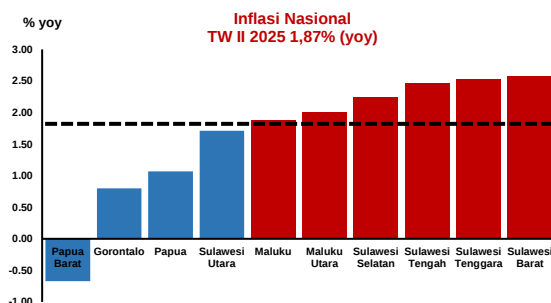


Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah

Grafik 3.1 Laju Inflasi Tahunan (yoy) Maluku Utara Dibandingkan dengan Nasional

Pada triwulan II 2025, seluruh provinsi di Sulampua mengalami inflasi, kecuali provinsi Papua Barat yang mengalami deflasi sebesar 0,67% (yoy). Inflasi IHK di provinsi Papua Barat, Gorontalo, Papua, Sulawesi Utara tercatat lebih rendah dibandingkan

dengan inflasi nasional. Sementara itu, inflasi IHK di provinsi Maluku Utara tercatat berada pada rentang target nasional $2,5 \pm 1\%$, yaitu sebesar 2,01% (yoy).



Grafik 3.2 Perbandingan Inflasi Gabungan Kota IHK Provinsi di Sulampua

3.2 Perkembangan Inflasi IHK Maluku Utara

Inflasi tahunan IHK Maluku Utara pada triwulan II 2025 tercatat sebesar 2,01% (yoy). Secara umum, pada triwulan II 2025, tekanan inflasi disumbang oleh mayoritas kelompok kecuali Kelompok Pendidikan; Kelompok Transportasi; Kelompok Pakaian dan Alas Kaki; dan Kelompok Kesehatan.

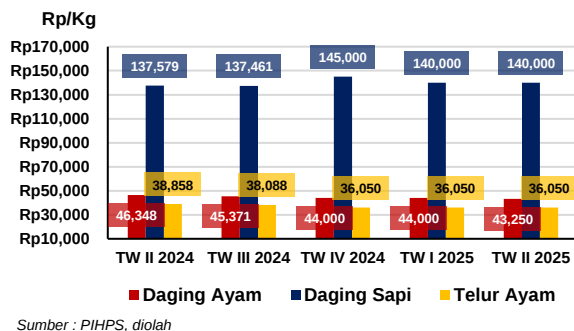
Deflasi pada kelompok Pendidikan terutama disebabkan oleh program Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang menggratiskan biaya pendidikan dan biaya komite untuk siswa SMA, SMK, dan SLB Negeri di Maluku Utara terhitung mulai April 2025. Deflasi pada kelompok transportasi terutama disumbang oleh subsidi Pemerintah berupa pemberian diskon tarif sebesar 6 persen untuk tiket pesawat domestik pada masa periode libur sekolah.

Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau mengalami inflasi sebesar 4,08% (yoy) dengan andil sebesar 1,39% (yoy). Secara umum, inflasi Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau pada triwulan II 2025 mengalami penurunan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 6,51% (yoy). Secara tahunan, komoditas yang menjadi penyumbang andil inflasi tertinggi pada Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau pada triwulan II 2025 yaitu komoditas kangkung. Tekanan inflasi pada komoditas kangkung terutama disebabkan oleh tingginya intensitas curah hujan yang berdampak pada penurunan hasil produksi. Tekanan inflasi juga disebabkan terbatasnya pasokan cabai rawit dari Sulawesi Utara akibat adanya sebagian petani yang mulai beralih menanam nilam. Peralihan ini terjadi akibat tingginya curah hujan yang meningkatkan risiko pembusukan pada tanaman cabai rawit. Selain itu, penurunan pasokan aneka ikan segar terutama disebabkan berkurangnya intensitas melaut nelayan akibat gelombang tinggi di perairan.

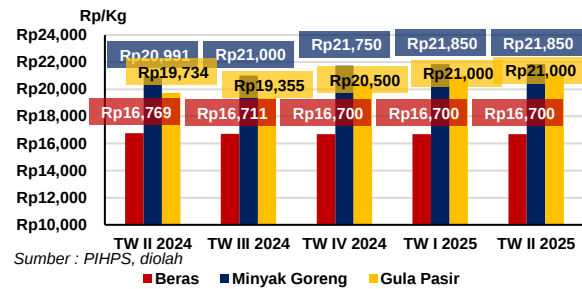
Pemantauan harga-harga komoditas strategis yang berpengaruh terhadap inflasi dilakukan melalui website PIHPS (<https://bi.go.id/hargapangan>) yang berfungsi sebagai salah satu alat untuk memproyeksikan arah inflasi komoditas strategis di Maluku Utara. Berdasarkan hasil pemantauan dapat dilihat bahwa terjadi

perkembangan harga yang cukup fluktuatif sepanjang triwulan II 2025 pada beberapa komoditas. Secara tahunan, terdapat beberapa komoditas yang mengalami penurunan harga diantaranya daging ayam, bawang putih, bawang merah, dan telur ayam.

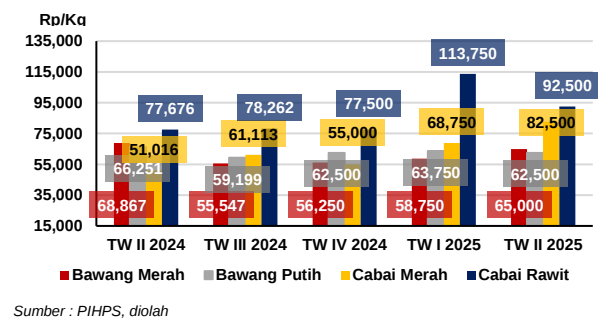
Ditinjau dari perubahan harga pada triwulan II 2025, cabai merah tercatat mengalami perubahan yang paling tinggi mencapai 61,72% (yoy), diikuti cabai rawit yang mengalami peningkatan harga sebesar 19,08% (yoy). Sedangkan, harga komoditas gula pasir tercatat naik sebesar 6,41% (yoy). Secara triwulanan, beberapa komoditas mengalami kenaikan harga pada triwulan II 2025 dibandingkan dengan triwulan I 2025 diantaranya komoditas cabai merah dan bawang merah.



Grafik 3.2 Perkembangan Harga Daging Ayam, Daging Sapi, dan Telur Ayam



Grafik 3.3 Perkembangan Harga Beras, Minyak Goreng, dan Gula Pasir



Grafik 3.4 Perkembangan Harga Bumbu-bumbuan

Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga pada triwulan II 2025 mengalami inflasi sebesar 4,17% (yoy) dengan andil inflasi sebesar 0,80%. Peningkatan kelompok ini terutama disebabkan oleh peningkatan harga komoditas bahan bakar rumah tangga. Pada triwulan II 2025, komoditas bahan bakar rumah tangga tercatat mengalami inflasi sebesar 17,81% (yoy) yang terutama bersumber dari peningkatan harga minyak tanah yang terjadi sejak Januari 2025. Peningkatan harga minyak tanah terutama disebabkan adanya permasalahan pada rantai pasok minyak tanah berupa ketidakseimbangan kuota minyak tanah baik di tingkat sub-agen, agen, dan pangkalan

dengan jumlah penerima minyak tanah di Maluku Utara.

Kelompok Barang dan Jasa	Inflasi YOY					Sumbangan Inflasi YOY				
	2024	2024	2024	2025	2025	2024	2024	2024	2025	2025
	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II
UMUM	3,21%	3,56%	1,50%	2,32%	2,01%	3,21%	3,56%	1,50%	2,32%	2,01%
Makanan, Minuman, dan Tembakau	7,03%	8,24%	4,21%	6,51%	4,08%	2,32%	2,70%	1,39%	2,17%	1,39%
Pakaian dan Alas Kaki	2,44%	1,35%	-1,40%	-0,59%	-2,10%	0,12%	0,07%	-0,07%	-0,03%	-0,10%
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	0,68%	0,20%	0,85%	-0,74%	4,17%	0,13%	0,04%	0,13%	-0,14%	0,80%
Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	0,44%	0,33%	-0,20%	0,59%	0,53%	0,02%	0,01%	-0,01%	0,02%	0,02%
Kesehatan	0,13%	1,21%	0,95%	0,41%	0,42%	0,00%	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%
Transportasi	1,32%	1,47%	-3,99%	-3,25%	-2,91%	0,15%	0,16%	-0,44%	-0,36%	-0,31%
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	-0,46%	-0,47%	-0,30%	0,00%	-0,09%	-0,03%	-0,03%	-0,02%	0,00%	-0,01%
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	0,55%	0,46%	-0,12%	2,22%	2,27%	0,01%	0,01%	0,00%	0,03%	0,03%
Pendidikan	2,81%	1,69%	1,77%	2,52%	-19,19%	0,07%	0,05%	0,05%	0,07%	-0,50%
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	2,69%	3,52%	4,44%	3,81%	3,73%	0,21%	0,28%	0,35%	0,30%	0,29%
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	2,84%	3,53%	1,47%	3,49%	5,45%	0,20%	0,25%	0,11%	0,25%	0,39%

Tabel 3.1 Inflasi tahunan (yoy) triwulan II 2024 – triwulan II 2025 Maluku Utara

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah

Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya pada triwulan II 2025 mengalami inflasi sebesar 5,45% (yoy) dengan andil inflasi sebesar 0,39% Kenaikan inflasi pada Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya pada triwulan II 2025 terutama disebabkan oleh komoditas emas perhiasan. Peningkatan harga ini sejalan dengan meningkatnya permintaan emas yang dianggap sebagai aset *safe haven* di tengah ketidakpastian

perekonomian global. Pada triwulan II 2025, terjadi peningkatan ketegangan geopolitik terutama disebabkan penerapan kebijakan proteksionis oleh Amerika Serikat berupa pengenaan tarif impor terhadap sejumlah negara dan konflik bersenjata di kawasan Timur Tengah antara Iran dan Israel. Harga emas dunia di pasar spot pada triwulan II 2025 tercatat sebesar \$3.302 per troy ons atau meningkat sekitar 41,90% (yoy)

3.3 Tracking Inflasi Triwulan III 2025

Pada awal triwulan III 2025 (Juli 2025), IHK Maluku Utara mengalami inflasi sebesar 0,39% (mtm), lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 0,27% (mtm). Secara tahunan inflasi IHK Maluku Utara

tercatat inflasi sebesar 2,46% (yoy) atau secara tahun kalender mengalami inflasi sebesar 2,13% (ytd). Inflasi IHK Maluku Utara pada bulan Juli 2025 lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi nasional yang tercatat sebesar 0,30% (mtm). Secara tahunan, inflasi IHK Maluku Utara tercatat lebih tinggi

dibandingkan nasional yang tercatat 2,37% (yoy).

Secara tahunan, tekanan inflasi periode Juli 2025 terutama disumbang oleh kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau dengan tingkat inflasi sebesar 4,86% (yoy) dan kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga sebesar 4,26% (yoy).

Inflasi Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau disebabkan peningkatan harga komoditas cabai rawit dikarenakan terbatasnya pasokan dari daerah sentra produsen. Kemunculan bibit siklon tropis memicu peningkatan curah hujan di wilayah pemasok cabai rawit, khususnya Sulawesi Utara, dan mengakibatkan penurunan pasokan. Sedangkan, inflasi pada Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga diakibatkan tingginya harga minyak tanah akibat adanya ketidakseimbangan kuota minyak tanah dan jumlah penerima di masyarakat.

Berdasarkan perkembangan inflasi bulan Juli 2025 dan beberapa indikator terkini, maka inflasi IHK Maluku Utara pada triwulan III 2025 diperkirakan lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Penurunan tekanan inflasi diperkirakan berasal dari Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau terutama berasal dari penyesuaian ke bawah harga komoditas cabai rawit dan cabai merah sejalan dengan

penurunan harga dari daerah pemasok seperti Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan.

Selain itu, tekanan inflasi lebih tinggi juga tertahan oleh kelompok transportasi terutama oleh penyesuaian ke bawah harga komoditas bensin nonsubsidi jenis Pertamina. Hal ini sejalan dengan keputusan pemerintah untuk menurunkan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamina dari Rp 12.800/liter menjadi Rp12.500/liter. Namun, terdapat kenaikan harga untuk BBM jenis diesel jenis Dexlite dari Rp13.610/liter menjadi Rp13.850/liter per 1 Agustus 2025.

Adapun, adanya kemunculan bibit siklon tropis diperkirakan menyebabkan terjadinya hujan berintensitas sedang terutama di wilayah Sulawesi Utara dan Maluku Utara. Hal ini berpotensi menyebabkan berkurangnya intensitas melaut nelayan dan berdampak kepada turunnya produktivitas hasil tangkapan ikan.

3.4 Koordinasi Pengendalian Inflasi di Maluku Utara

Sepanjang triwulan II 2025 Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Provinsi Maluku Utara secara aktif melakukan kegiatan pengendalian inflasi daerah. Pengendalian inflasi dilakukan melalui kegiatan High Level Meeting TPID, pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM), dan pelaksanaan program INSANG untuk mendukung tercapainya pengendalian inflasi terutama di sektor perikanan. Pada triwulan II

2025, TPID se-Provinsi Maluku Utara berupaya sidak pasar, gerakan optimalisasi lahan sawah, Gerakan Pangan Murah (GPM), dan upaya pengendalian inflasi untuk permasalahan distribusi minyak tanah di Maluku Utara. Lebih lanjut, Bank Indonesia bersama dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP & TPID) berkomitmen untuk terus menjaga inflasi agar tetap berada pada rentang target inflasi. Hal tersebut diwujudkan antara lain melalui program sinergi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). GNPIP menjadi sebuah komitmen bersama untuk mengoptimalkan langkah-langkah pengendalian inflasi dari sisi suplai, yaitu mendorong produksi guna mendukung ketahanan pangan secara integratif, masif, dan berdampak nasional. Kegiatan ini mencakup Perluasan Kerjasama Antar Daerah, Komitmen penyelenggaraan Operasi Pasar daerah, serta Implementasi Gerakan *urban farming* atau percepatan penanaman di pekarangan dan *digital farming*.

Sejumlah kegiatan TPID di Maluku Utara yang dilakukan sepanjang triwulan II 2025 dengan mengimplementasikan *framework* 4K diantaranya:

1. Pada aspek ketersediaan pasokan, pengendalian inflasi di Provinsi Maluku Utara difokuskan pada penguatan ketersediaan pasokan, khususnya pada HBKN Idul Adha berupa sidak pasar oleh TPID Kabupaten Halmahera Tengah,

Kota Ternate, dan Kabupaten Pulau Morotai. Selain itu, TPID Halmahera Tengah melakukan upaya program swasembada beras berupa optimalisasi lahan sawah yang telah berhasil merealisasikan penanaman padi di lahan seluas 80 hektar dari total target 300 hektar. Upaya pengendalian inflasi lainnya, yaitu KPwBI Maluku Utara berupa pengadaan *cold storage* berkapasitas 5 ton dengan generator diesel di desa penghasil ikan daerah Bacan Timur Selatan, Halmahera Selatan melalui program INSANG (Intensifikasi Produk Ikan dan Pengolahannya). Sebelum adanya *cold storage*, metode penyimpanan ikan terbatas yaitu menggunakan es batu sehingga mengganggu manajemen ketersediaan pasokan nelayan akibat kualitas yang menurun.

2. Pada aspek keterjangkauan harga, TPID Kota Tidore Kepulauan rutin melaksanakan Program mobil inflasi dan kapal Inflasi yang bertujuan mendukung kegiatan pasar murah dengan menjangkau masyarakat di daerah pesisir dan pegunungan. Upaya lainnya, yaitu Pemerintah Daerah Taliabu melakukan Gerakan Pangan Murah (GPM) di Pasar Malam Bobong dalam rangka menjelang Idul Adha dengan komoditas beras kemasan 10kg, gula pasir, minyak goreng, telur ayam ras, bawang merah,

bawang putih, dan tepung terigu. Adanya fasilitas cold storage melalui pelaksanaan program INSANG mendukung keterjangkauan harga aneka ikan dengan membuat biaya umpan menjadi lebih terjangkau serta mengurangi ketergantungan pada pengiriman umpan dari Kota Ternate atau Desa Babang dengan harga yang lebih mahal.

3. Terkait kelancaran distribusi, Pemerintah Provinsi Maluku Utara melakukan penambahan 20 pangkalan baru dengan kuota masing-masing 2.000-3.000 liter yang bertujuan memperluas akses masyarakat terhadap minyak tanah. Penambahan ini dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan ketidakseimbangan kuota minyak tanah di masyarakat akibat distribusi kurang efektif di masyarakat. Upaya lainnya adalah



Gambar 3.1 HLM TPID Halmahera Tengah

TPID Halmahera Tengah melakukan diskusi dengan pedagang Pasar Fidi Jaya (Kec. Weda) terkait dengan rantai pasok beberapa jenis komoditas yang bergejolak seperti cabai rawit, cabai merah, daging ayam ras, dan minyak kita.

4. Pada aspek komunikasi efektif, TPID Halmahera Tengah telah melaksanakan HLM TPID tingkat Kabupaten. Selain itu, KPwBI Maluku Utara melaksanakan podcast di RRI Ternate terkait pengendalian inflasi di Maluku Utara, serta secara konsisten melakukan kampanye belanja bijak untuk tidak belanja berlebihan dan menimbun stok bahan pangan serta kampanye gerakan makan singkong dan sagu sebagai nutrisi pengganti nasi dalam rangka diversifikasi pangan beras.



Gambar 3.2 Gerakan Pangan Murah di Pulau Taliabu menjelang Idul Adha



**Gambar 3.3 Optimalisasi Lahan Sawah di
Halmahera Tengah**



**Gambar 3.4 Podcast Terkait Pengendalian Inflasi di
RRI Ternate**

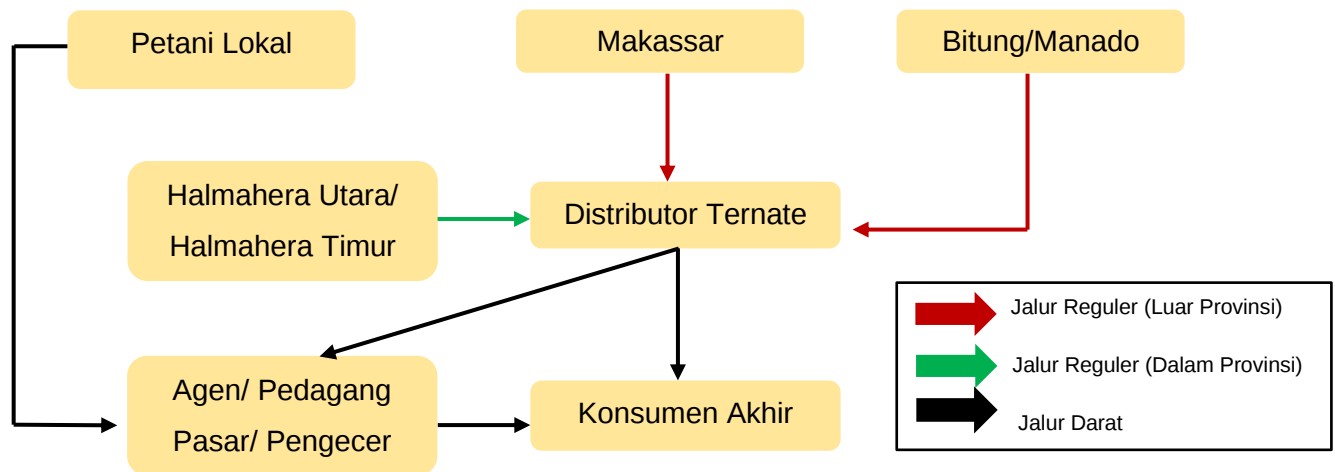


Gambar 3.5 Distribusi Ikan pada Program INSANG



**Gambar 3.6 Serah Terima Fasilitas Cold Storage &
Sarana Pendukung**

BOKS I: Disparitas Harga Cabai Rawit Pada Tingkat Pengecer dan Pemasok di Ternate



Gambar 3.7 Distribusi Cabai Rawit di Kota Ternate

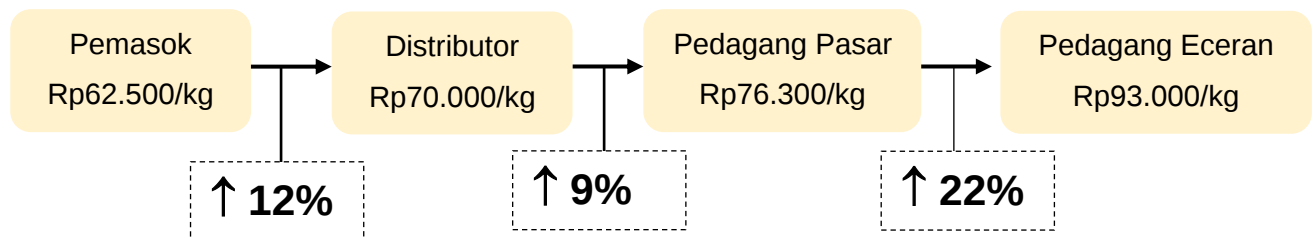
Pasokan komoditas cabai rawit di Ternate mayoritas diperoleh dari luar wilayah karena pasokan lokal cenderung rendah dengan lahan pertanian yang terbatas. Harga cabai rawit lokal umumnya mengikuti harga di pasaran. Ketika periode panen, petani akan menjual hasil panennya mengikuti harga pasar pada saat itu. Pasokan cabai rawit dari luar daerah berasal dari Makassar dan Bitung/Manado.

Pengiriman pasokan dilakukan menggunakan kapal berukuran sedang dan kecil melalui jalur reguler kepada para distributor. Selanjutnya, distributor akan mengirimkan ke pedagang pasar, pengecer, maupun menjual secara langsung ke konsumen. Namun tidak sedikit pedagang pasar yang melakukan pemesanan langsung dari luar daerah, baik dari Makassar, Bitung, maupun pedagang dari wilayah Halmahera Utara dan Halmahera Timur. Adapun pasokan dari petani lokal umumnya menuju ke pasar dengan menyesuaikan harga pasar pada saat itu. Gambar 3.7 menunjukkan rantai pasok komoditas cabai rawit di Kota Ternate.

Berdasarkan hasil wawancara kepada petani lokal/ pemasok cabai rawit survei neraca pangan pada tahun 2024 yang ada di Kota Ternate, waktu menanam cabai dalam waktu yang normal umumnya dilakukan selama 3–4 bulan untuk dapat mendapatkan hasil panen hingga 250 kilogram dengan syarat tanaman cabai tersebut belum mati (masih bisa menghasilkan cabai). Benih cabai rawit yang digunakan antara lain merek Mahameru, Laba F1, dan Bintang Asia Sigantung. Saat panen, petani lokal akan menjual hasil panen ke distributor sesuai harga pasar.

Distributor besar yang berada di Pasar Barito (Gamalama) mengandalkan pasokan dari Manado yang dapat memasok cabai rawit secara rutin dalam kapasitas besar.

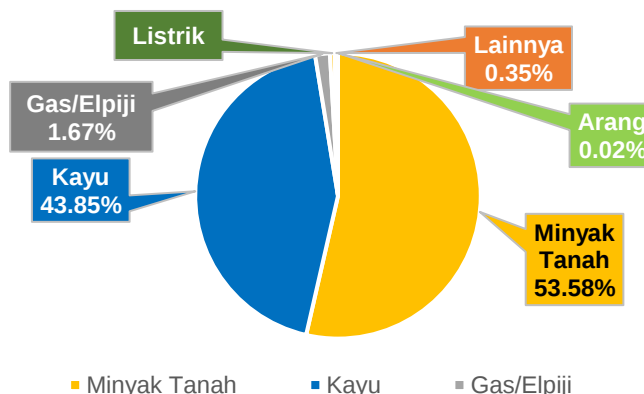
Faktor yang memengaruhi harga cabai rawit di tingkat distributor dan pedagang pasar adalah kondisi cuaca, jumlah pasokan, dan momen HBKN. Berdasarkan survei pangan pada tahun 2024, rata-rata harga jual cabai rawit di Kota Ternate oleh pemasok adalah sebesar Rp62.500/kg dan pada tingkat distributor rata-rata harga jualnya adalah sebesar Rp70.000/kg. Pada tingkat pedagang pasar, rata-rata cabai rawit dijual sebesar Rp85.381/kg. Pada pedagang eceran, harga cabai rawit yang dijual adalah sebesar Rp93.000/kg. Adapun, perbandingan harga jual di tingkat pedagang eceran terhadap harga jual di tingkat pemasok yaitu meningkat sekitar 49%.



Gambar 3.8 Harga Cabai Rawit di Kota Ternate

Melihat cukup tingginya disparitas harga cabai rawit antara tingkat pedagang eceran dan tingkat pemasok, diperlukan adanya upaya untuk oleh OPD terkait dalam mengurangi disparitas harga tersebut. Rekomendasi pertama yaitu adalah dengan mengoptimalkan kebijakan pelaporan arus keluar dan masuk barang berdasarkan jenis komoditas dari satu daerah ke daerah lainnya di Maluku Utara untuk memastikan ketersediaan, validitas, dan reliabilitas data yang digunakan. Melalui kebijakan ini diharapkan kondisi neraca pangan di Maluku Utara dapat terpantau dengan lebih baik untuk mendukung pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah (KAD) lebih optimal. Selanjutnya, rekomendasi kedua adalah dengan melakukan sidak pasar secara rutin pada tingkat pemasok, distributor, pedagang pasar, maupun pedagang eceran dengan acuan harga pada website Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS).

BOKS II: Ketidakseimbangan Kuota Minyak Tanah sebagai Pemicu Inflasi Maluku Utara



Gambar 3.9 Persentase Rumah Tangga Maluku Utara Menurut Bahan Bakar Utama untuk Memasak

Komoditas bahan bakar rumah tangga tercatat sebagai penyumbang utama inflasi di Provinsi Maluku Utara, dengan kontribusi sebesar 0,53% (ytd) pada Juli 2025. Tekanan inflasi pada kelompok ini dipicu oleh kenaikan harga minyak tanah yang terjadi secara berkelanjutan sejak awal tahun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, masyarakat Provinsi Maluku Utara memiliki ketergantungan tinggi terhadap penggunaan minyak tanah untuk keperluan memasak. Penggunaan bahan bakar Gas/Elpiji di Maluku Utara yang masih rendah terutama disebabkan Maluku Utara belum termasuk dalam wilayah program konversi minyak tanah ke Gas/Elpiji. Sebanyak 53,58% rumah tangga di Maluku Utara masih menggunakan minyak tanah sebagai bahan bakar utama memasak.

Ketergantungan yang tinggi terhadap penggunaan minyak tanah di tengah adanya ketidakseimbangan kuota minyak tanah di masyarakat menjadi faktor pertama yang mendorong inflasi Maluku Utara berdasarkan besaran andil inflasi. Setidaknya terdapat beberapa faktor yang menimbulkan adanya ketidakseimbangan kuota minyak tanah di masyarakat, diantaranya kuota minyak tanah yang disalurkan pihak agen, sub agen, dan pangkalan ke masyarakat lebih rendah dari kuota. Selain itu, terdapat juga distribusi minyak tanah yang disalurkan ke pelaku usaha *speed boat* yang semakin mengurangi jumlah pasokan bagi Masyarakat.

Dalam mengatasi permasalahan tersebut, maka diperlukan upaya berupa audit menyeluruh terhadap sistem distribusi minyak tanah dari tingkat agen dan sub-agen untuk mengoptimalkan jumlah pasokan dengan jumlah penerima di masyarakat. Selain itu, sosialisasi penyaluran sistem distribusi minyak tanah ke Masyarakat juga diperlukan untuk mendukung aspek transparansi dalam penyaluran minyak tanah ke Masyarakat.

BAB 4 ANALISIS STABILITAS KEUANGAN DAERAH

“Sistem Keuangan Pada Triwulan II 2025 Terjaga Stabil”



RINGKASAN

**Ekonomi II 2025
Tumbuh
32,09%**

**NPL Keseluruhan
Triwulan II 2025
2,11%**

Ekonomi Maluku Utara tumbuh impresif pada triwulan II 2025 seiring dengan pertumbuhan industri pertambangan nikel yang berdampak positif terhadap kinerja perbankan khususnya pada ekspansi penyaluran kredit. Kinerja penyaluran kredit ke sektor pertambangan dan pertanian di Maluku Utara menunjukkan pertumbuhan positif pada triwulan II 2025.

Secara keseluruhan NPL kredit di Maluku Utara masih berada di bawah 5%. NPL kredit non-UMKM mengalami sedikit kenaikan dari 0,04% pada triwulan I 2025 menjadi 0,06% pada triwulan II 2025. Sementara itu, NPL pada kredit UMKM mengalami kenaikan dari 3,54% pada triwulan I 2025 menjadi 3,66% pada triwulan II 2025. Hal ini mengindikasikan bahwa stabilitas sistem keuangan di Provinsi Maluku Utara pada triwulan II 2025 masih terus terjaga di tengah pertumbuhan positif penyaluran kredit.

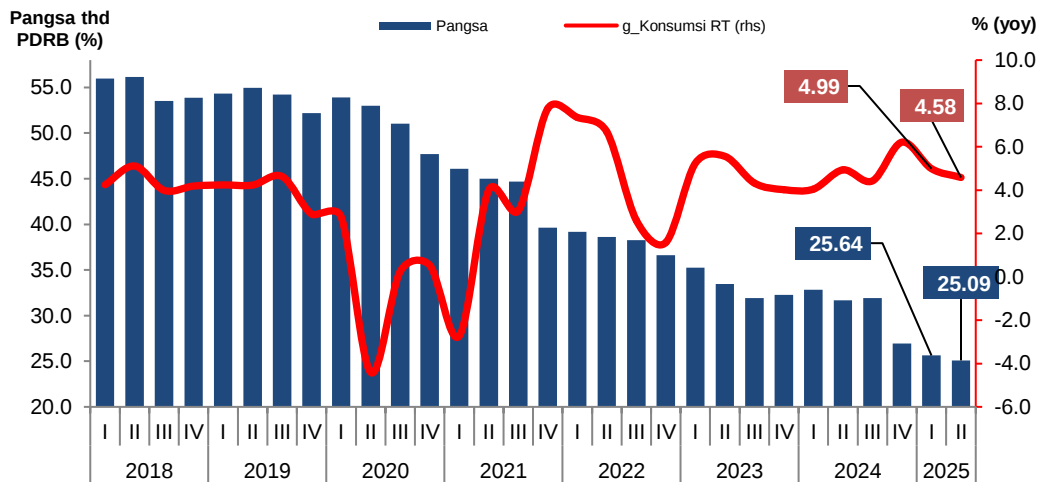
4.1 Asesmen Sektor Rumah Tangga

4.1.1 Kondisi Terkini dan Sumber Kerentanan Sektor Rumah Tangga

Pertumbuhan ekonomi sektor rumah tangga pada triwulan II 2025 tumbuh positif sebesar 4,58% (yoy). Perkembangan konsumsi rumah tangga pada triwulan II 2025 mengalami penurunan pertumbuhan dibandingkan periode triwulan I 2025 yang tercatat tumbuh sebesar 4,99% (yoy). Penurunan pertumbuhan konsumsi rumah tangga ini diakibatkan adanya normalisasi konsumsi masyarakat pasca momen HBKN Idul Fitri pada triwulan I 2025.

Selanjutnya, pangsa konsumsi rumah tangga terhadap total PDRB Maluku Utara mengalami penurunan pada triwulan II 2025, dimana pangsa konsumsi RT tercatat sebesar 25,09%, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 25,64%.

Perkembangan kinerja Konsumsi RT yang masih positif pada triwulan II 2025 salah satunya didorong oleh pertumbuhan lapangan usaha industri pengolahan dan pertambangan dan penggalian di Maluku Utara. Terus tumbuhnya industri hilirisasi nikel di Maluku Utara telah mampu menyerap banyak tenaga kerja diiringi dengan pendapatan yang relatif tinggi serta teratur. Hal ini disinyalir telah membantu kinerja konsumsi RT di Maluku Utara.



Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, diolah

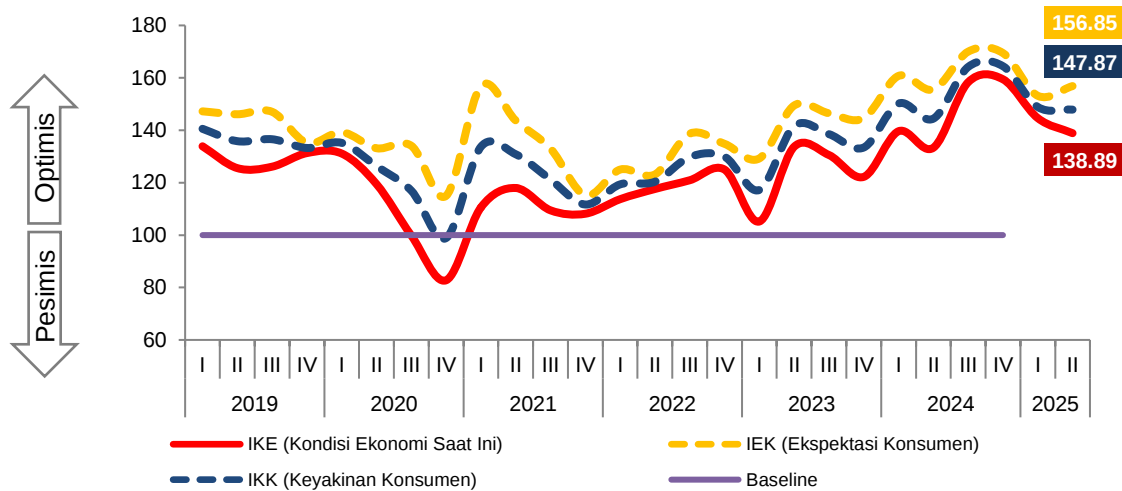
Grafik 4.1 Kontribusi Konsumsi Rumah Tangga pada PDRB Maluku Utara

Perkembangan kinerja sektor konsumsi RT pada triwulan II 2025 sejalan dengan perkembangan optimisme konsumen terhadap kondisi ekonomi mendatang yang tercermin dari hasil Survei Konsumen (SK)

triwulan II 2025, tetap berada pada rentang optimis di atas angka 100 dan lebih rendah dibandingkan dengan triwulan I 2025. Hasil SK pada Grafik 4.2 menunjukkan nilai Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) triwulan II 2025

sebesar 147,87, tercatat mengalami penurunan dibandingkan dengan triwulan I 2025 yang tercatat sebesar 148,89. Nilai indeks keyakinan konsumen tersebut sejalan dengan pandangan konsumen terhadap perkiraan kondisi kegiatan dunia usaha dalam 6 bulan kedepan, kondisi penghasilan saat ini dan perkiraan penghasilan 6 bulan ke depan yang tetap optimis. Indeks Ekspektasi

Konsumen (IEK) berada pada level optimis dengan angka sebesar 156,85, tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan I 2025 yang sebesar 153,15. Sementara itu, Indeks Kondisi Ekonomi saat ini (IKE) juga masih berada pada level optimis sebesar 138,89, namun tercatat lebih rendah dibandingkan dengan triwulan I 2025 sebesar 144,63.

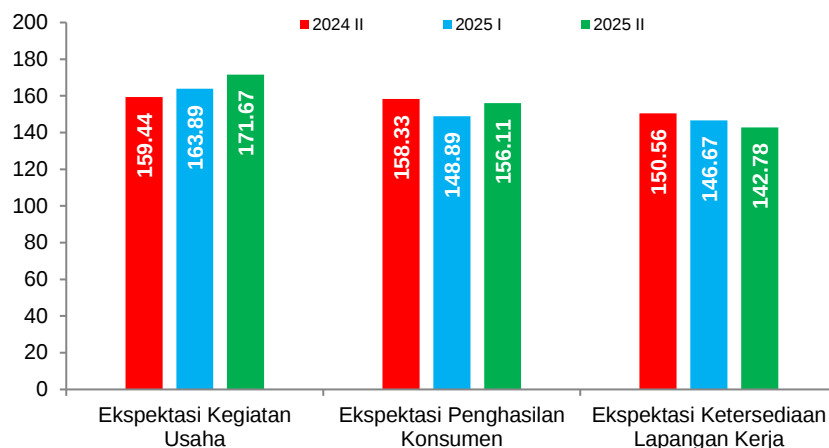


Sumber: Survei Konsumen Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.2 Perkembangan IKK, IKE, dan IEK

Kemudian apabila dilihat dari Indeks Ekspektasi Kegiatan Usaha, Indeks Penghasilan Konsumen dan Indeks Ekspektasi Ketersediaan Lapangan kerja masih berada pada level optimis di atas angka 100. Indeks Ekspektasi Kegiatan Usaha masih berada pada level optimis sebesar 171,67 pada triwulan II 2025, lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan I 2025 yang

tercatat sebesar 163,89. Indeks Ekspektasi Penghasilan Konsumen pada triwulan II 2025 tercatat sebesar 156,11, lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan I 2025 yang tercatat sebesar 148,89. Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja tercatat sebesar 142,78 pada triwulan II 2025, lebih rendah dibandingkan dengan triwulan I 2025 sebesar 146,67.



Sumber: Survei Konsumen Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.3 Ekspektasi Konsumen Terhadap Kondisi Ekonomi 6 Bulan Mendatang

4.1.2 Kinerja Keuangan dan Intermediasi Perbankan pada Sektor Rumah Tangga

Pada triwulan II 2025, jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun oleh perbankan mencapai Rp 15,0 triliun atau tumbuh sebesar 13,15% (yoy), mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 2,46% (yoy). Peningkatan pertumbuhan DPK terutama didorong oleh peningkatan pertumbuhan DPK non perseorangan sebesar 21,53% (yoy). Sementara itu, DPK perseorangan tumbuh 7,05% (yoy).

DPK berupa giro pada triwulan II 2025 mengalami pertumbuhan pada kategori non-perseorangan sebesar 38,96% (yoy), namun berkontraksi untuk kategori perseorangan sebesar 74,87% (yoy). Selanjutnya, DPK berupa deposito mengalami pertumbuhan untuk kategori non-

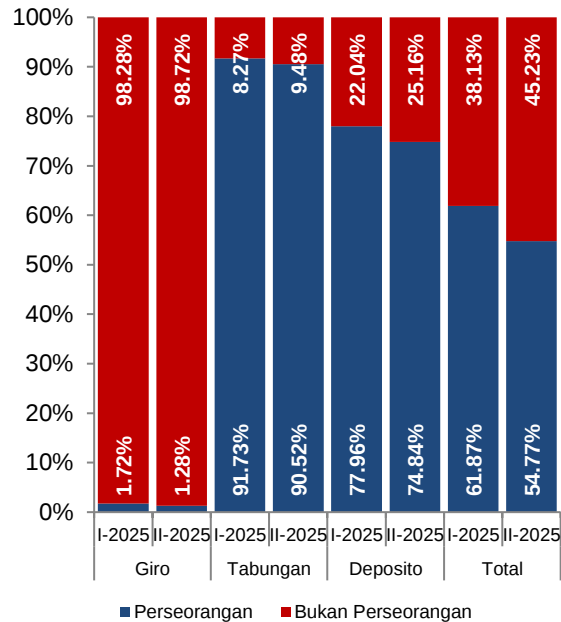
perseorangan sebesar 53,38% (yoy), sementara untuk kategori perseorangan mengalami kontraksi sebesar -2,61% (yoy).

DPK berupa tabungan mengalami peningkatan pertumbuhan untuk kategori perseorangan dan non perseorangan dengan pertumbuhan pada triwulan II 2025 masing-masing sebesar 13,26% (yoy) dan 45,48% (yoy). Peningkatan perkembangan DPK tersebut diperkirakan sejalan dengan perkembangan kegiatan usaha dikarenakan peningkatan DPK didorong oleh non-perseorangan khususnya korporasi. Investasi dan kinerja ekspor Maluku Utara yang tinggi di Triwulan II 2025 diperkirakan mendorong peningkatan DPK korporasi di perbankan. Disisi lain, perkembangan DPK perseorangan yang mengalami penurunan diperkirakan sejalan dengan kebutuhan dana untuk konsumsi rumah tangga yang tinggi, yang tercermin dari pertumbuhan PDRB komponen

konsumsi rumah tangga Maluku Utara yang tumbuh tetap tinggi di triwulan II 2025.

Kondisi intermediasi perbankan pada sektor RT pada triwulan II 2025 berdasarkan Laporan Bank Umum menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) di Maluku Utara masih didominasi oleh nasabah perseorangan (Grafik 4.4). Secara umum, proporsi total DPK perseorangan dibandingkan proporsi total DPK non-perseorangan pada triwulan II 2025 mengalami sedikit penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya, didorong oleh DPK jenis tabungan dan deposito. Komposisi DPK perseorangan di Maluku Utara pada triwulan II 2025 tercatat sebesar 54,77%, mengalami penurunan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 61,87%.

Secara komposisi, DPK jenis tabungan masih mendominasi dibandingkan deposito maupun giro dengan proporsi sebesar 82,50% pada triwulan II 2025 (Grafik 4.5).



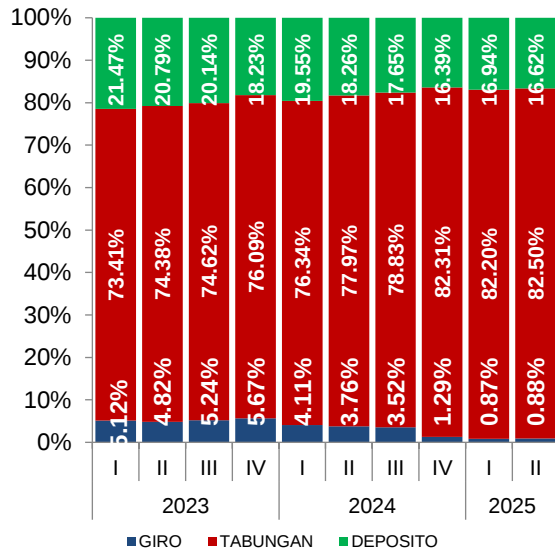
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.4 Pangsa DPK Perseorangan dan Bukan Perseorangan di Maluku Utara

Jumlah rekening DPK di Maluku Utara pada triwulan II 2025 menunjukkan pertumbuhan, sebagaimana ditunjukkan oleh Tabel 4.1. Jumlah rekening DPK di Maluku Utara tercatat sebanyak 1.855.906 atau tumbuh sebesar 8,29% (yoy).

Mayoritas pertumbuhan jumlah rekening didorong oleh rekening dengan jumlah saldo kurang dari Rp10 juta. Hal tersebut sejalan dengan pertumbuhan perekonomian di Maluku Utara khususnya dari konsumsi rumah tangga dan sektor industri pengolahan dan pertambangan. Peningkatan konsumsi rumah tangga dan jumlah kapasitas produksi industri pengolahan dan pertambangan akan meningkatkan jumlah serapan tenaga kerja pada sektor lapangan

usaha tersebut sehingga disinyalir turut mendorong peningkatan jumlah rekening di Maluku Utara.



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.5 Komposisi DPK Perseorangan di Maluku Utara

Pertumbuhan DPK dan jumlah rekening tersebut kembali mengindikasikan bahwa

kondisi keuangan masyarakat Maluku Utara semakin baik. Berdasarkan klasifikasi jumlah simpanan, rekening dengan pertumbuhan tertinggi adalah rekening antara Rp1 Miliar hingga Rp2 Miliar, dengan pertumbuhan sebesar 14,88% (yoy) pada triwulan II 2025. Perkembangan pertumbuhan jumlah rekening DPK perseorangan dapat dilihat lebih detail pada Tabel 4.1.

Maluku Utara		Rekening		Kelompok Nilai									
				<10 JT	>10 JT - 100 JT	>100JT - 500JT	>500JT - 1 M	>1 M - 2 M	>2 M - 5M	>5M - 10M	>10M -15M	>15M - 20M	>20M
2023	I	Jml	1.574.730	1.135.455	64.887	10.760	1.331	513	245	59	21	8	28
		yoy (%)	7,11%	-3,77%	42,10%	6,93%	16,04%	1,99%	-2,78%	-10,61%	61,54%	300,00%	40,00%
	II	Jml	1.586.019	1.177.763	68.530	10.934	1.310	515	271	57	22	7	23
		yoy (%)	6,21%	11,34%	6,26%	3,46%	2,02%	3,62%	12,45%	21,28%	57,14%	40,00%	-8,00%
	III	Jml	1.623.921	1.198.710	67.408	10.988	1.342	518	265	56	11	7	28
		yoy (%)	10,98%	11,06%	5,15%	2,56%	1,13%	2,17%	3,92%	12,00%	-42,11%	16,67%	0,00%
	IV	Jml	1.666.869	1.242.226	74.025	11.840	1.556	586	323	58	23	9	21
		yoy (%)	7,14%	12,10%	4,85%	1,36%	3,73%	3,53%	20,52%	13,73%	0,00%	-50,00%	31,25%
2024	I	Jml	1.678.884	1.259.106	68.032	11.030	1.394	519	279	60	21	8	31
		yoy (%)	6,61%	10,89%	4,85%	2,51%	4,73%	1,17%	13,88%	1,69%	0,00%	0,00%	10,71%
	II	Jml	1.713.879	1.294.759	72.098	11.393	1.508	551	302	69	21	11	35
		yoy (%)	8,06%	9,93%	5,21%	4,20%	15,11%	6,99%	11,44%	21,05%	-4,55%	57,14%	52,17%
	III	Jml	1.756.859	1.331.257	73.286	11.803	1.529	575	275	83	19	17	36
		yoy (%)	8,19%	11,06%	8,72%	7,42%	13,93%	11,00%	3,77%	48,21%	72,73%	142,86%	28,57%
	IV	Jml	1.797.623	1.374.918	79.042	13.050	1.676	685	317	73	22	8	31
		yoy (%)	7,84%	10,68%	6,78%	10,22%	7,71%	16,89%	-1,86%	25,86%	-4,35%	-11,11%	47,62%
2025	I	Jml	1.801.519	1.404.775	83.405	13.462	1.693	646	271	69	23	14	31
		yoy (%)	7,30%	11,57%	22,60%	22,05%	21,45%	24,47%	-2,87%	15,00%	9,52%	75,00%	0,00%
	II	Jml	1.855.906	1.394.732	77.112	12.655	1.598	633	262	76	20	10	39

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Tabel 4.1 Jumlah Rekening Perbankan Masyarakat Berdasarkan Kelompok Nilai

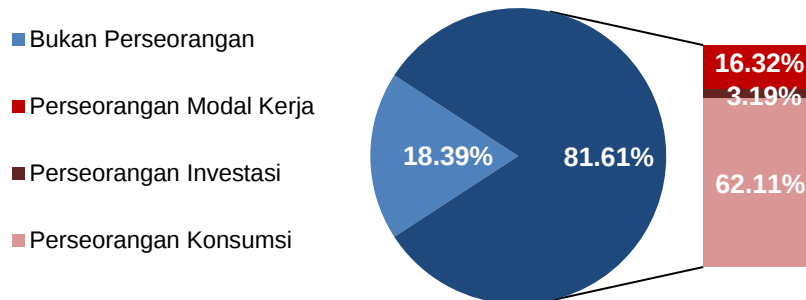
Intermediasi perbankan pada sektor RT pada triwulan II 2025 kembali menunjukkan perlambatan pertumbuhan yang ditunjukkan oleh pertumbuhan penyaluran kredit perseorangan dan non-perseorangan. Penyaluran kredit perseorangan tersebut tumbuh sebesar 3,55% (yoy), mengalami perlambatan dibandingkan pertumbuhan pada triwulan I 2025 yang sebesar 4,09% (yoy). Kredit perseorangan triwulan II 2025 masih didominasi oleh kredit konsumsi dengan *share* sebesar 62,11%. Sementara kredit modal kerja dan investasi masing-masing memiliki *share* sebesar 16,32% dan 3,19%. Jumlah nominal kredit yang disalurkan kepada kelompok perseorangan pada triwulan II 2025 sebesar Rp13.041,31 Miliar, meningkat dibandingkan posisi triwulan I 2025 yang sebesar Rp12.911,75 Miliar.

Perlambatan pertumbuhan kredit perseorangan pada triwulan I 2025 didorong oleh perlambatan pertumbuhan seluruh jenis penggunaan kredit. Kredit konsumsi mengalami pertumbuhan sebesar 4,04% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan triwulan I 2025 yang mencatatkan pertumbuhan sebesar 4,40% (yoy).

Selanjutnya, kredit investasi tercatat tumbuh sebesar 28,31% (yoy), mengalami perlambatan pertumbuhan dibandingkan dengan triwulan I 2025 yang tercatat 35,17% (yoy).

Kredit modal kerja mengalami kontraksi sebesar 1,93% (yoy) pada triwulan II 2025, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat terkontraksi sebesar 1,44% (yoy). Perkembangan pertumbuhan kredit perseorangan pada triwulan I 2025 sejalan dengan peningkatan terbatas konsumsi rumah tangga, khususnya sehubungan dengan belum kuatnya ekspektasi penghasilan yang ditunjukkan pada perkembangan permintaan kredit konsumsi.

Selanjutnya, Grafik 4.6 menunjukkan pangsa kredit perseorangan berdasarkan jenis penggunaannya. Terlihat bahwa kredit perseorangan masih mendominasi penyaluran kredit oleh perbankan di Maluku Utara dengan pangsa 81,61%. Angka tersebut mengalami peningkatan dibandingkan triwulan I 2025 dengan pangsa kredit perseorangan sebesar 80,89%.



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.6 Pangsa Kredit Perseorangan Berdasarkan Jenis Pengguna

4.2 Asesmen Sektor Korporasi

4.2.1 Kondisi Terkini dan Sumber Kerentanan Sektor Korporasi

Pertumbuhan ekonomi yang tumbuh tinggi pada triwulan II 2025 berpengaruh terhadap kinerja korporasi di Maluku Utara. Faktor pendorong perkembangan kinerja korporasi pada triwulan II 2025 adalah peningkatan kinerja ekspor LN, berdasarkan Ditjen Bea Cukai tercatat sebesar US\$ 3.718,76 juta, meningkat dibandingkan triwulan I 2025 yang tercatat sebesar US\$ 3.232,89 juta. Selain itu, tetap tumbuhnya aktivitas konsumsi rumah tangga juga menjadi faktor pendorong tetap tingginya kinerja sektor korporasi pada periode triwulan II 2025.

Kinerja positif di sebagian besar lapangan usaha menunjukkan bahwa secara umum kondisi korporasi di Maluku Utara mengalami perbaikan ditunjang oleh pertumbuhan ekspor produk olahan turunan nikel dan tetap tingginya daya beli masyarakat.

Berdasarkan hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) pada triwulan II 2025, indikator keuangan hasil SKDU dalam akses kredit saldo bersih sebesar 0,00%, stabil dibandingkan triwulan I 2025. Selanjutnya, dari sisi kondisi keuangan berdasarkan likuiditas mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya dengan nilai 8,51%. Sedangkan, kondisi keuangan berdasarkan rentabilitas mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya dengan nilai 6,38%.

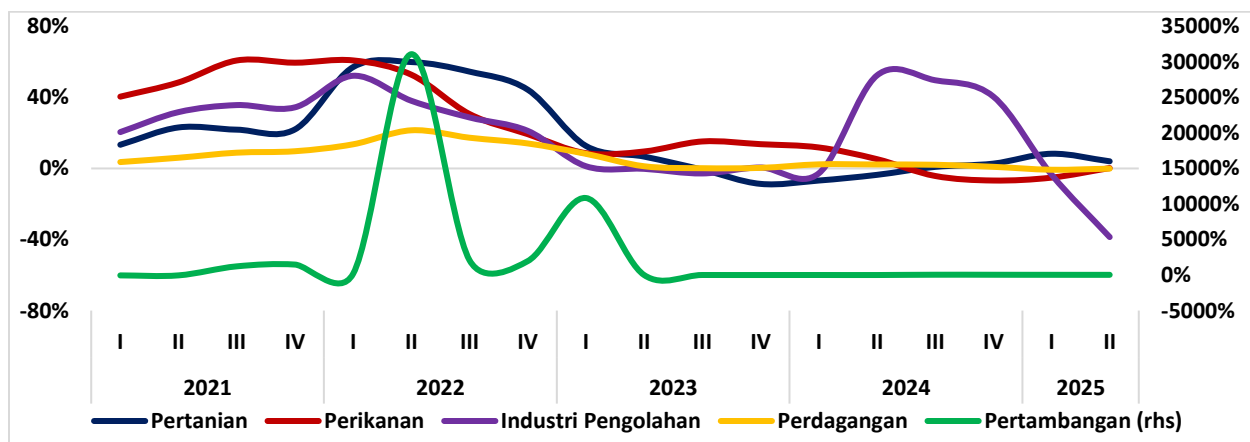
Kondisi Keuangan	Q IV 2024				Q I 2025				Q 2 2025			
	Naik	Tetap	Turun	Saldo Bersih	Naik	Tetap	Turun	Saldo Bersih	Naik	Tetap	Turun	Saldo Bersih
Akses Kredit	1,96%	98,04%	0,00%	1,96%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
Kondisi keuangan perusahaan berdasarkan likuiditas	33,33%	60,78%	5,88%	27,45%	14,00%	80,00%	6,00%	8,00%	14,89%	78,72%	6,38%	8,51%
Kondisi keuangan perusahaan berdasarkan rentabilitas	27,45%	64,71%	7,84%	19,61%	8,00%	82,00%	10,00%	-2,00%	12,77%	80,85%	6,38%	6,38%
Grand Total	20,92%	74,51%	4,58%	16,34%	7,33%	87,33%	5,33%	2,00%	9,22%	86,52%	4,26%	4,96%

Sumber: SKDU, diolah

Tabel 4.2 Kondisi Likuiditas Korporasi

- Kinerja penyaluran kredit ke beberapa lapangan usaha utama di Maluku Utara masih menunjukkan pertumbuhan positif pada triwulan II 2025. Kredit pertambangan pada triwulan II 2025 tumbuh sebesar 29,38% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan I 2025 yang tumbuh sebesar 30,55% (yoy). Pertumbuhan kredit pertanian mengalami perlambatan pada triwulan II 2025 dengan pertumbuhan sebesar 4,02% (yoy), setelah pada triwulan sebelumnya tumbuh sebesar 8,29% (yoy). Sementara itu, kredit perikanan mengalami peningkatan pertumbuhan sebesar 0,23% (yoy), lebih tinggi daripada pertumbuhan pada triwulan

sebelumnya yang tercatat sebesar -5,16% (yoy). Kemudian, kredit perdagangan pada triwulan II 2025 berkontraksi moderat sebesar -0,11% (yoy), lebih baik dibandingkan dengan triwulan I 2025 yang berkontraksi sebesar 0,71%. Selanjutnya, kredit industri pengolahan mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 38,62% (yoy), lebih rendah dibandingkan kontraksi pada triwulan sebelumnya sebesar 3,44 (yoy). Hal ini disebabkan belum adanya rencana penambahan kapasitas produksi di kawasan industri pengolahan nikel di Halmahera Tengah dan Halmahera Selatan pada triwulan mendatang.



Sumber: Bank Indonesia, diolah
Grafik 4.7 Perkembangan Kredit berdasarkan Sektor Ekonomi

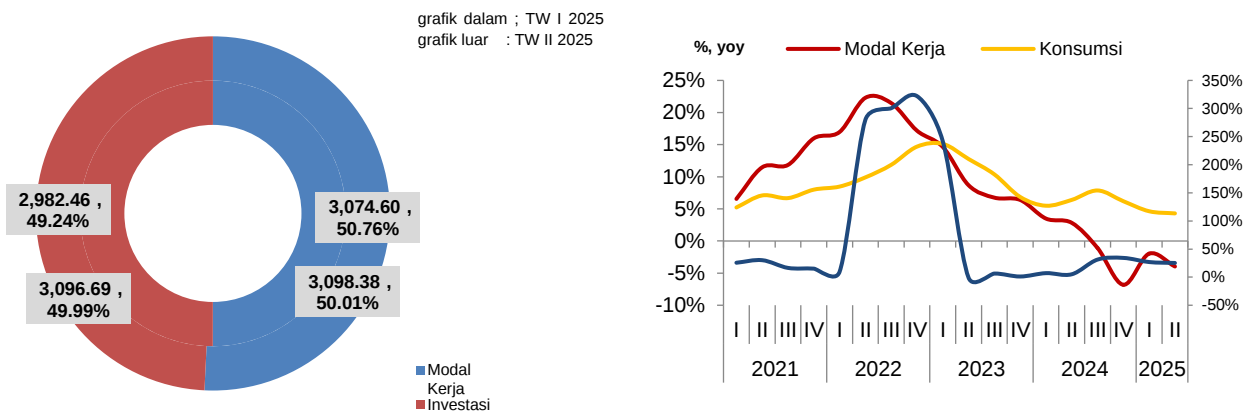
4.2.2 Penyaluran Kredit pada Sektor Korporasi

Pada triwulan II 2025, kredit modal kerja tercatat mengalami kontraksi sebesar

3,97% (yoy), lebih rendah dibandingkan kontraksi pada triwulan I 2025 sebesar 1,97% (yoy). Secara komposisi, kredit modal kerja memiliki porsi sebesar 50,01%, mengalami

penurunan dibandingkan triwulan I 2025 yang memiliki porsi sebesar 50,76%. Kredit modal kerja yang masih tumbuh terjadi sejalan dengan peningkatan penjualan korporasi seiring dengan peningkatan pertumbuhan perekonomian. Hal ini turut mendorong peningkatan modal kerja yang dibutuhkan

oleh perusahaan. Selanjutnya, kredit investasi mengalami pertumbuhan sebesar 25,19% pada triwulan II 2025, lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 26,86%. Secara komposisi, kredit investasi memiliki porsi sebesar 49,99% pada triwulan II 2025.



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.8 Perkembangan Kredit Korporasi Berdasarkan Jenis Penggunaan

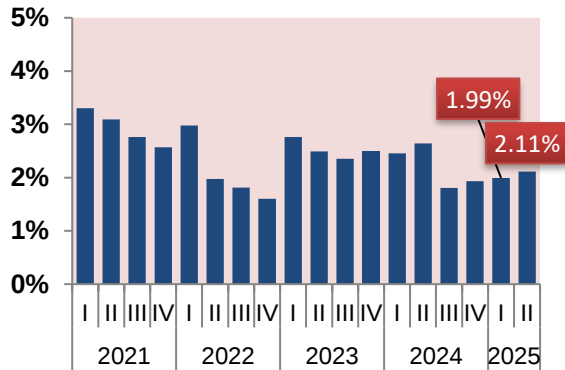
Pertumbuhan kredit investasi didorong oleh ekspansi pembangunan *smelter* dan industri pendukung lainnya yang masih berlangsung dalam pengolahan nikel. Selain itu, ekspektasi peningkatan penjualan turut mendorong optimisme perusahaan untuk melakukan ekspansi bisnis sehingga investasi yang dibutuhkan oleh perusahaan pun meningkat. Perkembangan kredit produktif tersebut menunjukkan bahwa dunia usaha masih memiliki kecenderungan untuk melakukan ekspansi seiring dengan

perbaikan kondisi ekonomi di Maluku Utara yang semakin kondusif.

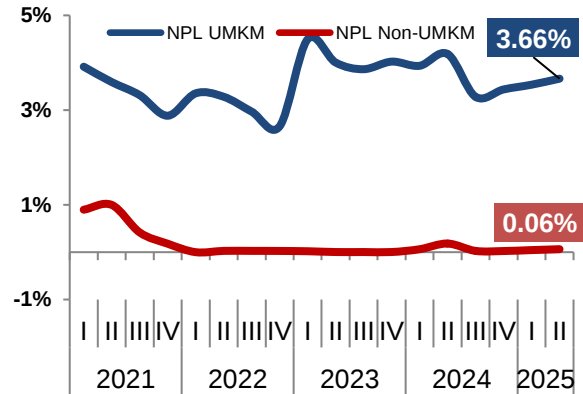
Sejalan dengan peningkatan pertumbuhan kredit yang terjadi sepanjang triwulan II 2025, risiko kredit korporasi stabil. *Non-Performing Loan* (NPL) korporasi pada triwulan II 2025 tercatat mengalami peningkatan terbatas menjadi 2,11%, di mana pada triwulan I 2025 tercatat sebesar 1,99%. Peningkatan NPL korporasi khususnya didorong oleh peningkatan NPL pada UMKM sebesar 3,66%, sedikit lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 3,54%, kendati masih berada pada *threshold* 5%. Sementara itu, NPL korporasi non UMKM relatif stabil

dengan NPL sebesar 0,06% pada triwulan II 2025 dibandingkan NPL pada triwulan I 2025 yang tercatat 0,04%. Peningkatan terbatas

NPL korporasi ini perlu menjadi perhatian tersendiri agar risiko kredit tidak semakin meningkat khususnya pada sektor UMKM.



Sumber: Bank Indonesia, diolah
Grafik 4.9 NPL Kredit Korporasi



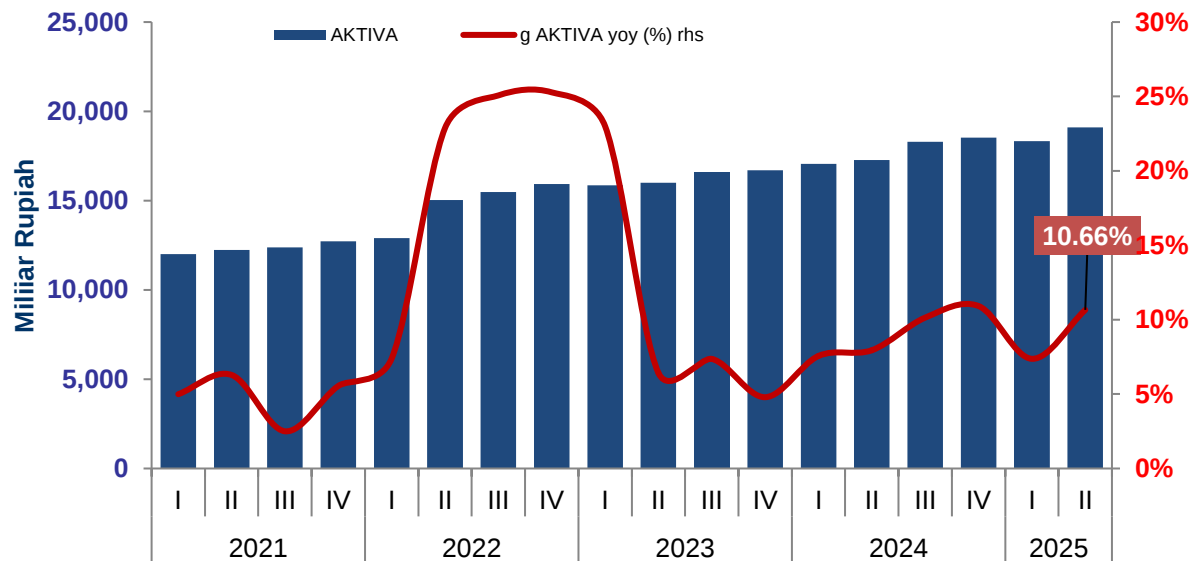
Sumber: Bank Indonesia, diolah
Grafik 4.10 NPL Kredit Korporasi per Kategori Debitur

4.3 Asesmen Institusi Keuangan (Perbankan)

4.3.1 Perkembangan Kinerja Perbankan

Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara pada triwulan II 2025 telah mendorong peningkatan pertumbuhan aset bank umum di Provinsi Maluku Utara. Total aset bank umum di Provinsi Maluku Utara pada triwulan II 2025 tercatat sebesar Rp19,11 triliun atau tumbuh sebesar 10,66% (yoy). Angka tersebut mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan I 2025 yang tumbuh sebesar 7,37% (yoy). Peningkatan pertumbuhan aset perbankan tersebut sejalan dengan perkembangan pertumbuhan DPK pada

periode yang sama. Pada triwulan II 2025, DPK tumbuh sebesar 12,42% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan I 2025 yang tumbuh sebesar 2,46% (yoy). Pertumbuhan aset perbankan konvensional pada triwulan II 2025 mencatatkan pertumbuhan sebesar 10,39% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan I 2025 yang tercatat tumbuh sebesar 6,48% (yoy). Sementara itu, aset perbankan syariah pada triwulan II 2025 mengalami pertumbuhan yang tercatat sebesar 13,43%, lebih rendah dibandingkan dengan triwulan I 2025 yang tercatat sebesar 16,97%. Grafik 4.11 menunjukkan tren perkembangan nominal aset perbankan lima tahun terakhir.

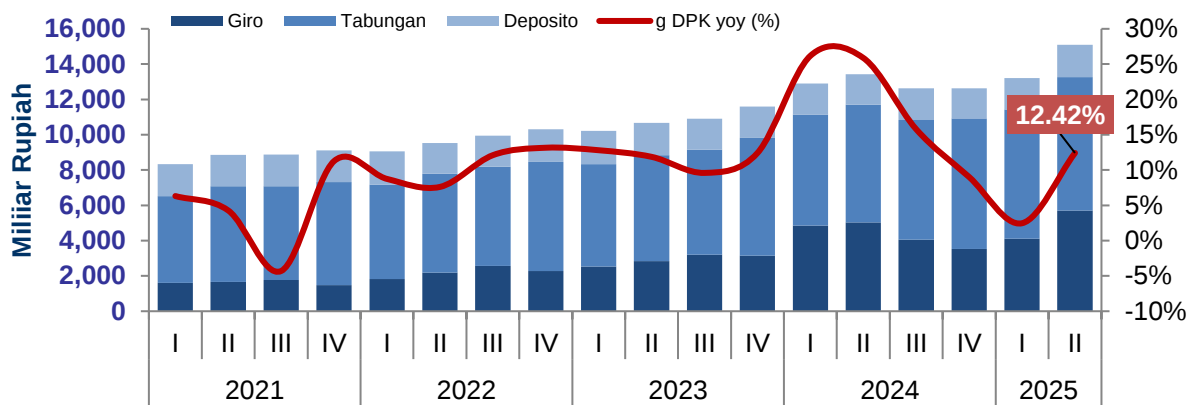


Sumber : Bank Indonesia, diolah
Grafik 4.11 Perkembangan Aset Bank Umum di Maluku Utara

4.3.2 Intermediasi Perbankan

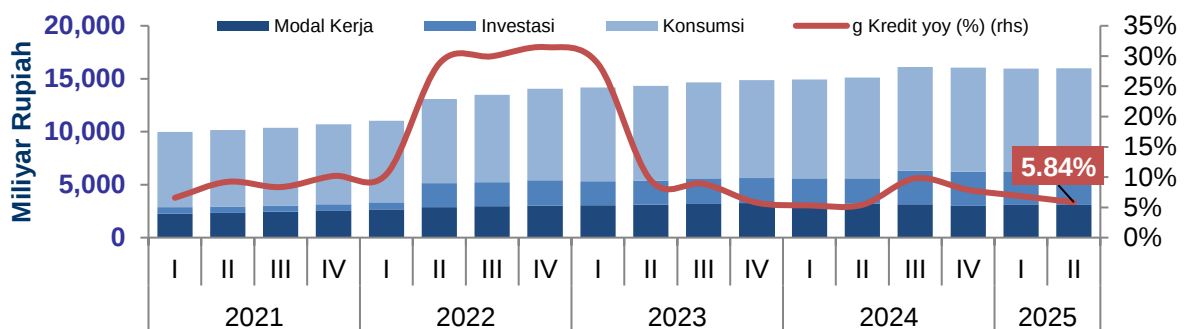
Jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun perbankan yang berlokasi di Maluku Utara pada triwulan II 2025 tercatat sebesar Rp15,11 triliun atau tumbuh sebesar 12,42% (yoy). Nilai DPK tersebut mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan I 2025 yang tercatat sebesar Rp13,22 triliun. DPK pada triwulan II 2025 mengalami pertumbuhan sebesar 12,42% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 2,46% (yoy).

Giro mencatatkan pertumbuhan sebesar 13,38% (yoy) pada triwulan II 2025, berbeda arah dibandingkan triwulan I 2025 yang mengalami kontraksi sebesar 15,24% (yoy). Tabungan mencatatkan pertumbuhan sebesar 13,20% (yoy) pada triwulan II 2025, lebih rendah dibandingkan dengan triwulan I 2025 yang tumbuh sebesar 16,61% (yoy). Deposito mengalami pertumbuhan sebesar 6,55% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan I 2025 yang mengalami pertumbuhan sebesar 0,79% (yoy).



Sumber : Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.12 Perkembangan DPK di Maluku Utara (Miliar Rupiah)

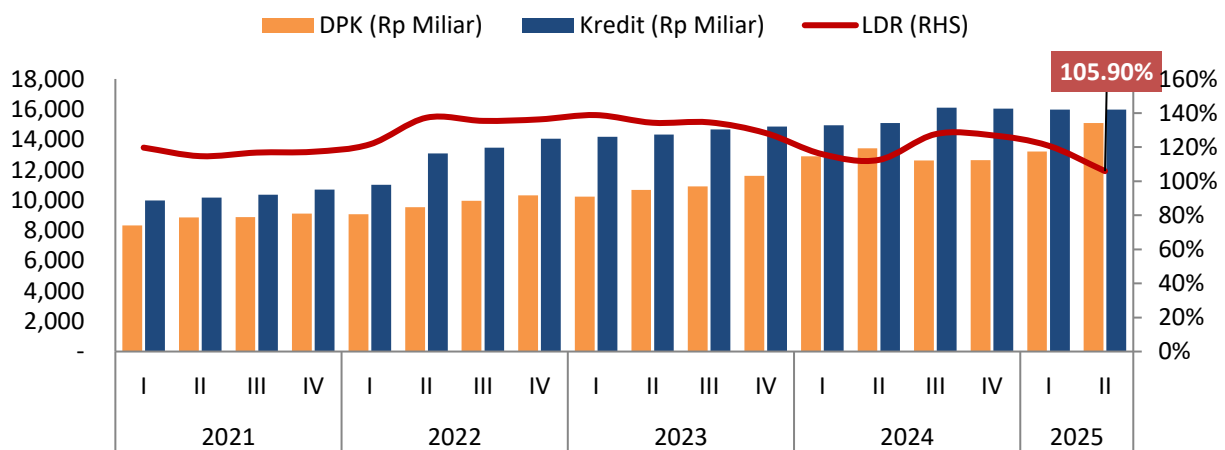


Sumber : Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.13 Perkembangan Kredit di Maluku Utara (Miliar Rupiah)

Perkembangan ekonomi dan konsumsi yang tetap tumbuh pada triwulan II 2025 mendorong kinerja perbankan dalam menyalurkan kredit. Pada triwulan II 2025 penyaluran kredit perbankan di Maluku Utara tetap tumbuh meskipun mengalami perlambatan. Pertumbuhan penyaluran kredit pada triwulan II 2025 tercatat sebesar 5,84% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan I 2025 yang tumbuh sebesar 6,87% (yoy). Kredit konsumsi mengalami perlambatan pertumbuhan dari 4,63% (yoy) pada triwulan I

2025 menjadi 4,30% (yoy) pada triwulan II 2025. Kredit modal kerja juga mengalami perlambatan dengan pertumbuhan pada triwulan II 2025 berkontraksi sebesar -3,97% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar -1,97%. Kredit investasi juga mengalami perlambatan pertumbuhan pada triwulan II 2025 yang tumbuh sebesar 25,19% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan I 2025 yang tercatat sebesar 26,86% (yoy).



Sumber : Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.14 Perkembangan LDR Bank Umum di Maluku Utara

4.3.3 Perbankan Syariah

Perbankan syariah di Provinsi Maluku Utara menunjukkan perkembangannya yang positif baik dari sisi pembiayaan maupun pendanaan. Pembiayaan yang diberikan oleh perbankan syariah tumbuh sebesar 16,43% (yoy) pada triwulan II 2025, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan

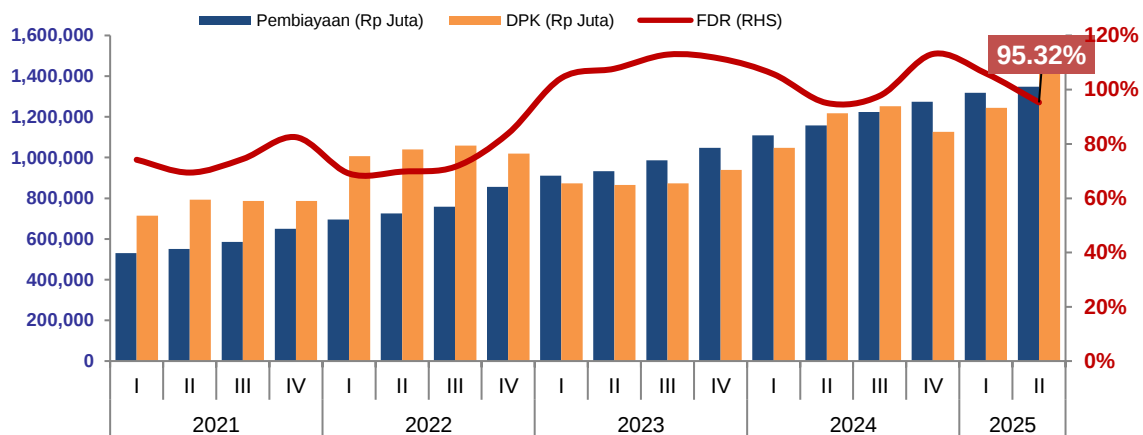
pada triwulan I 2025 yang tumbuh sebesar 18,98% (yoy). Perkembangan pertumbuhan pembiayaan syariah pada triwulan II 2025 didorong oleh pembiayaan konsumsi syariah yang tumbuh sebesar 16,91% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan I 2025 yang tumbuh sebesar 18,76% (yoy). Sejalan dengan hal tersebut, pembiayaan investasi

syariah mengalami perlambatan pertumbuhan pada triwulan II 2025 yaitu sebesar 24,39% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan triwulan I 2025 yang tumbuh sebesar 29,18% (yoy). Sementara itu, kredit modal kerja syariah pada triwulan II 2025 mengalami pertumbuhan sebesar 0,10%% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan triwulan I 2025 yang tercatat tumbuh sebesar 12,76% (yoy).

DPK perbankan syariah pada triwulan II 2025 mengalami pertumbuhan sebesar 16,19% (yoy), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan triwulan I 2025 yang tercatat sebesar 18,68% (yoy). Perlambatan pertumbuhan DPK tersebut terutama berasal dari kontraksi pertumbuhan giro syariah. Giro syariah mengalami kontraksi sebesar -21,80% (yoy) pada triwulan II 2025, lebih rendah dibandingkan kontraksi pada triwulan I 2025 yang tercatat sebesar 23,56% (yoy). Sementara itu, tabungan syariah mengalami peningkatan pertumbuhan pada triwulan I 2025, yaitu tumbuh sebesar 26,17% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada triwulan I

2025 yang tercatat sebesar 9,32% (yoy). DPK jenis deposito syariah mengalami pertumbuhan pada triwulan II 2025, yaitu sebesar 81,42% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan dengan triwulan I 2025 yang tumbuh sebesar 25,25% (yoy).

Fungsi intermediasi perbankan syariah yang tercermin dari *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada triwulan II 2025 tetap tinggi. FDR triwulan II 2025 tercatat sebesar 95,32% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan triwulan I 2025 yang sebesar 106,02% (yoy) (Grafik 4.13). Hal ini menunjukkan intermediasi perbankan syariah di Maluku Utara tetap tinggi ditengah prospek pertumbuhan ekonomi ke depan yang semakin kondusif. Ke depan, peranan perbankan syariah diharapkan dapat berperan lebih banyak lagi dalam pertumbuhan ekonomi memanfaatkan preferensi masyarakat yang semakin terdorong untuk mengembangkan usahanya berlandaskan prinsip syariah serta momentum pertumbuhan ekonomi yang tinggi.



Sumber : Bank Indonesia, diolah
Grafik 4.15 Perkembangan Perbankan Syariah

4.4 Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM

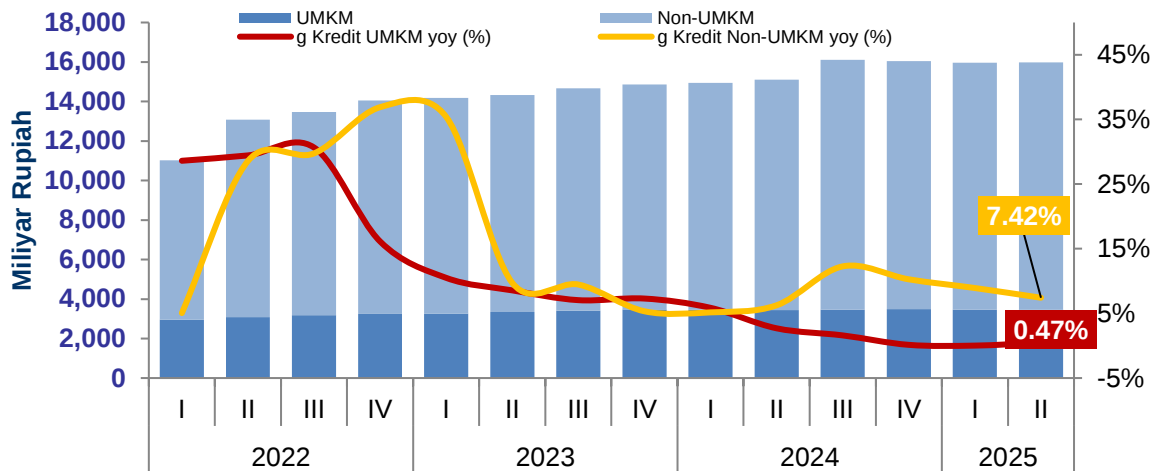
4.4.1 Akses Keuangan kepada UMKM

Grafik 4.16 menunjukkan pertumbuhan penyaluran kredit ke sektor UMKM pada triwulan II 2025 tercatat tumbuh terbatas sebesar 0,47% (yoy), mengalami peningkatan dibandingkan triwulan I 2025 yang tumbuh sebesar 0,02% (yoy). Secara nominal, penyaluran kredit UMKM menunjukkan penurunan dari Rp3.458,30 miliar pada triwulan I 2025 menjadi Rp3.451,84 miliar pada triwulan II 2025. Hal ini sejalan dengan risiko kredit UMKM yang meningkat dimana NPL UMKM mengalami peningkatan dari 3,54% pada triwulan I 2025 menjadi 3,66% pada triwulan II 2025. Hal tersebut perlu menjadi perhatian untuk menjaga kesehatan intermediasi perbankan kepada UMKM.

Pada triwulan II 2025, pertumbuhan ekonomi pada lapangan usaha utama dicerminkan pula oleh perkembangan pertumbuhan penyaluran kredit UMKM kepada empat dari lima sektor ekonomi utama di Maluku Utara. Kredit UMKM ke sektor ekonomi perdagangan tercatat tumbuh sebesar 1,54% (yoy) pada triwulan II 2025, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan I 2025 yang tumbuh sebesar 0,84% (yoy). Kemudian, kredit UMKM ke sektor akomodasi makan dan minum, pada triwulan II 2025 mencatatkan pertumbuhan sebesar 13,95% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan I 2025 yang tumbuh sebesar 15,09% (yoy).

Selanjutnya, kredit UMKM di sektor konstruksi mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar -40,14% (yoy) pada triwulan II 2025, lebih rendah dibandingkan dengan triwulan I 2025 yang mengalami kontraksi sebesar -36,50% (yoy). Kredit UMKM di sektor Jasa Kemasyarakatan mengalami kontraksi

sebesar -3,25% (yoy), lebih rendah daripada triwulan I 2025 yang tercatat tumbuh sebesar 2,00 (yoy).



Sumber : Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.16 Perkembangan Penyaluran Kredit UMKM dan Non UMKM

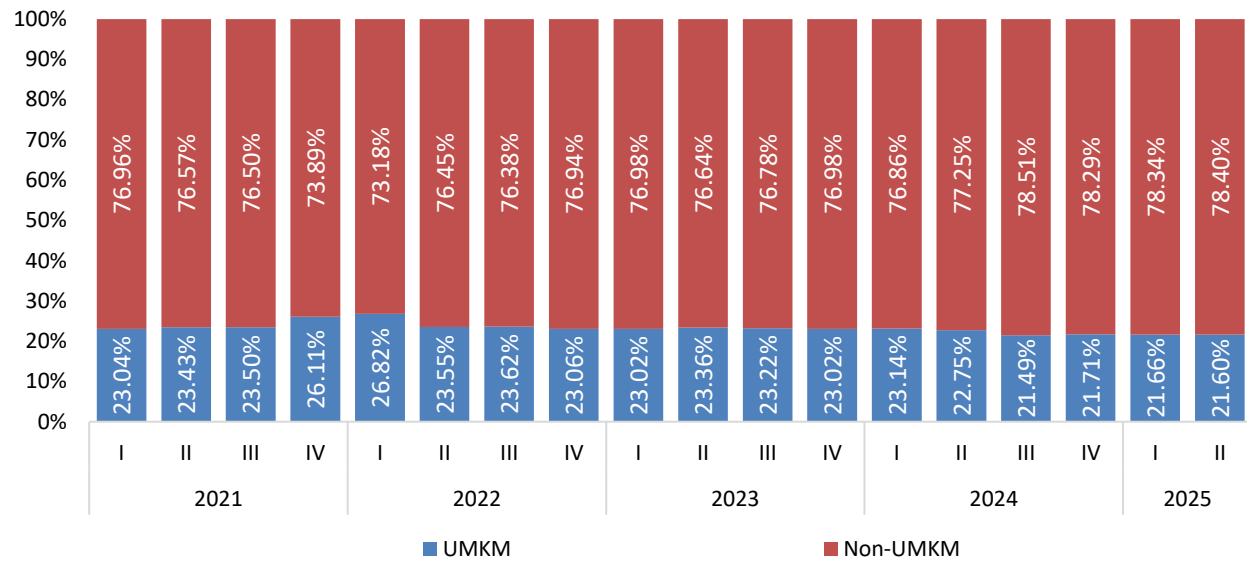
Sektor Pergudangan tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 21,68% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan triwulan I 2025 yang tercatat sebesar 23,83% (yoy).

Pangsa kredit UMKM sampai dengan triwulan II 2025 stabil dibandingkan triwulan I 2025. Pada triwulan II 2025 pangsa kredit UMKM sebesar 21,60%, relatif stabil dibandingkan triwulan I 2025 dengan pangsa kredit UMKM sebesar 21,66%. Dilihat secara nominal, kredit UMKM pada triwulan II 2025 mengalami penurunan yang tercatat sebesar Rp3.451,84 Miliar dibandingkan dengan triwulan I 2025 yang tercatat sebesar Rp3.458,30 Miliar. Pangsa penyaluran kredit UMKM oleh perbankan di Maluku Utara ditunjukkan oleh Grafik 4.17. Semakin

konduktivitas iklim ekonomi dan investasi di Maluku Utara serta ditunjang peningkatan kinerja UMKM telah mendorong perbankan untuk lebih mudah memberikan akses keuangan kepada UMKM. Namun demikian, masih diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan institusi keuangan khususnya perbankan dalam rangka meningkatkan literasi bagi UMKM dalam pencatatan dan pengelolaan keuangan. Disamping itu, untuk meningkatkan produktivitas dan skala UMKM maka diperlukan korporatisasi dan penguatan kelembagaan sehingga UMKM dapat memanfaatkan momentum tingginya pertumbuhan lapangan usaha industri pengolahan nikel. Kebutuhan hasil pertanian dan bahan pangan yang semakin meningkat

merupakan kesempatan yang harus dimanfaatkan UMKM agar *trickle down effect* dari keberadaan tambang dan industri

pengolahan nikel dapat secara optimal dinikmati oleh masyarakat di Maluku Utara.



Sumber : Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.17 Perkembangan Pangsa Kredit UMKM dan Non UMKM Maluku Utara

BAB 5 PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN

“Aktivitas Transaksi Pembayaran Sepanjang Triwulan II 2025 Mengalami Perlambatan Dibandingkan Triwulan Sebelumnya”



RINGKAS

Pada triwulan II 2025 terjadi net inflow di Maluku Utara sebesar Rp0,083 triliun. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan permintaan uang kartal pasca momen HBKN Idul Fitri pada triwulan I 2025, terutama untuk memenuhi kebutuhan konsumsi.

Dari sisi non tunai, transaksi RTGS, SKNBI, dan APMK, mengalami perlambatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Namun secara yoy, jumlah transaksi dan nominal dari RTGS dan SKNBI tetap tumbuh. Selain itu, transaksi digital seperti penggunaan QRIS dan e-commerce terus mencatatkan pertumbuhan positif dari bulan ke bulan.

Net Inflow
Triwulan II 2025
Rp0,083 triliun

Pertumbuhan Volume
Transaksi E-Commerce
di Triwulan II 2025
69,02% (yoy)

5.1 Perkembangan Sistem Pembayaran Tunai

5.1.1 Perkembangan Transaksi Pembayaran Tunai

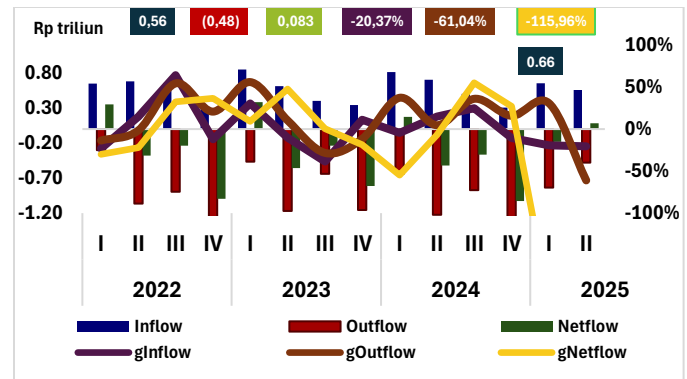
Pada triwulan II 2025, Provinsi Maluku Utara mencatatkan *net intflow*, hal ini menjadi yang pertama kali sejak beberapa tahun terakhir selalu mengalami *net outflow* pada triwulan II. Hal ini terjadi karena dampak dari bergesernya HBKN Idul Fitri 1446 H ke Bulan Maret, yang mendorong tingginya permintaan uang pada triwulan I. Akibatnya, terjadi koreksi pada triwulan II yang berkontribusi pada tercatatnya *net inflow*.

Secara rinci, aliran uang keluar (*outflow*) dari Bank Indonesia ke perbankan tercatat sebesar Rp0,48 triliun, mengalami penurunan dari Rp0,84 triliun pada triwulan I 2025 dan menurun 61,04% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya (*yoy*).

Aliran uang masuk (*inflow*) di Provinsi Maluku Utara mencapai Rp0,56 triliun sepanjang triwulan II 2025, sedikit menurun dibandingkan triwulan I 2025 yang tercatat sebesar Rp0,66 triliun. Dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, aliran uang masuk (*inflow*) pada triwulan I 2025 mengalami penurunan sebesar 20,37% (*yoy*).

Dengan demikian, Maluku Utara mencatatkan *net intflow* sebesar Rp0,083

triliun sepanjang triwulan II 2025. Perkembangan transaksi *inflow-outflow* uang tunai di Provinsi Maluku Utara dari 2021 hingga 2025 dapat dilihat pada grafik 5.1.

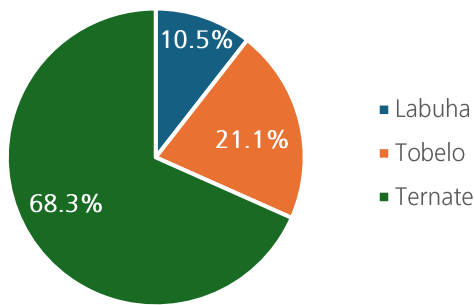


Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.1 Perkembangan Transaksi Tunai di Maluku Utara s.d Periode Triwulan II 2025

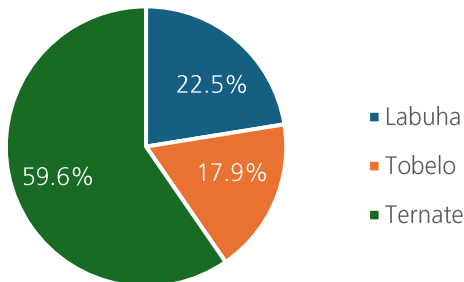
5.1.2 Upaya Menjaga Kebutuhan Uang Tunai

Kontribusi aliran uang keluar (*outflow*) sepanjang triwulan II 2025 masih didominasi oleh komposisi uang keluar dari KPw BI Maluku Utara ke perbankan di Kota Ternate dengan proporsi 59,6%, diikuti dengan *outflow* melalui Kas Titipan Labuha sebesar 22,5% dan Kas Titipan Tobelo sebesar 17,9%. Untuk aliran *inflow* juga masih didominasi oleh aliran dari perbankan Kota Ternate ke KPw BI Maluku Utara sebesar 68,3%, diikuti dengan *inflow* melalui Kas Titipan Tobelo sebesar 21,1% dan Kas Titipan Labuha sebesar 10,5%. Komposisi *outflow* dan *inflow* dapat dilihat pada Gambar 5.2 dan Gambar 5.3.



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.2 Komposisi *Inflow* Maluku Utara Triwulan II 2025



Grafik 5.3 Komposisi *Outflow* Maluku Utara Triwulan II 2025

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara terus menjaga upaya menjaga kelancaran sistem pembayaran, termasuk juga menjaga kebutuhan dan kelayakan uang tunai di masyarakat. Upaya yang dilakukan diantaranya adalah melalui kegiatan pendistribusian uang baik melalui setoran dan bayaran perbankan, 2 (dua) kas titipan Bank Indonesia (Labuha, Halmahera Selatan dan Tobelo, Halmahera Utara), penukaran uang melalui loket Bank

Indonesia, kas keliling dalam dan luar kota /serta setoran dan bayaran non-bank.

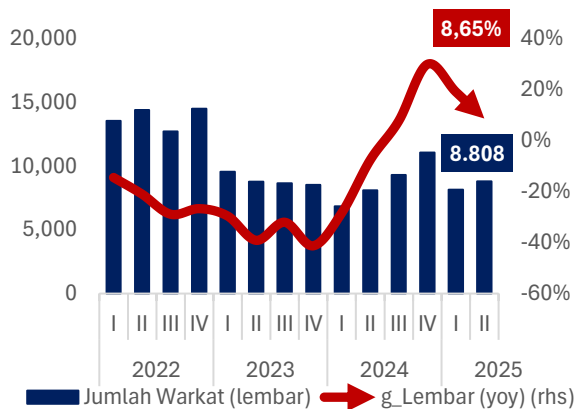
5.2 Perkembangan Sistem Pembayaran Non Tunai

5.2.1 Perkembangan Transaksi Kliring

Pada triwulan II 2025, transaksi sistem pembayaran non-tunai melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) di Provinsi Maluku Utara tercatat meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Nilai transaksi pada periode tersebut mencapai Rp439 miliar, naik tipis dari Rp433 miliar pada triwulan I 2025. Secara tahunan, nominal transaksi SKNBI pada triwulan II 2025 juga menunjukkan peningkatan dengan pertumbuhan sebesar 3,52% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

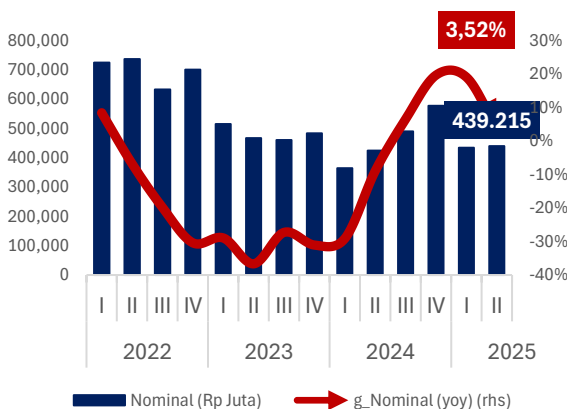
Dari sisi jumlah transaksi, SKNBI tersebut juga tercatat meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya, dengan frekuensi 8.808 kali transaksi, sedikit meningkat dari 8.145 kali transaksi pada triwulan sebelumnya. Secara tahunan, frekuensi transaksi SKNBI pada triwulan II 2025 juga menunjukkan peningkatan sebesar 8,65% (yoy).

Perkembangan jumlah volume dan nominal transaksi kliring di Provinsi Maluku Utara dapat dilihat pada Grafik 5.4 dan 5.5.



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.4 Perkembangan Jumlah Lembar Warkat SKNBI Maluku Utara



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.5 Perkembangan Nominal Transaksi SKNBI Maluku Utara

5.2.2 Perkembangan Transaksi RTGS

Berbanding terbalik dengan SKNBI, transaksi non-tunai layanan *Real Time Gross Settlement* (RTGS) Provinsi Maluku Utara pada triwulan II 2025 mengalami penurunan baik secara nominal maupun frekuensi transaksi dari triwulan I 2025.

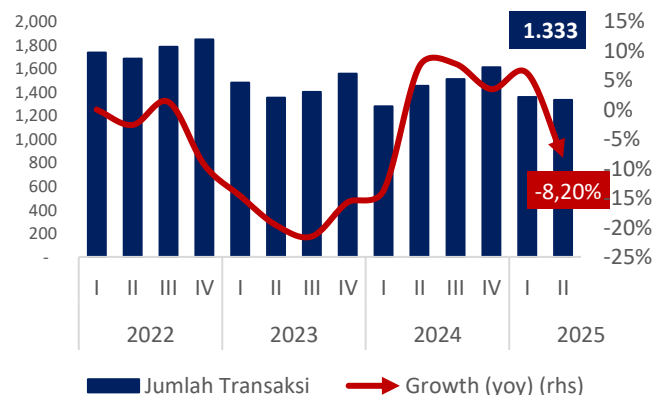
Nominal transaksi RTGS di Maluku Utara mencapai Rp2,03 triliun dengan jumlah transaksi sebanyak 1.333 kali pada triwulan II 2025. Secara tahunan, terjadi penurunan pada volume transaksi triwulan II dibandingkan dengan periode sebelumnya pada tahun lalu sebesar (-8.20%) (yoy), namun untuk nominal masih mengalami peningkatan secara tahunan sebesar 10,46% (yoy)

Perkembangan jumlah volume dan nominal transaksi RTGS di Provinsi Maluku Utara dapat dilihat pada Grafik 5.6 dan 5.7.



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.6 Perkembangan Jumlah Transaksi RTGS Maluku Utara



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.7 Perkembangan Nominal RTGS Maluku Utara

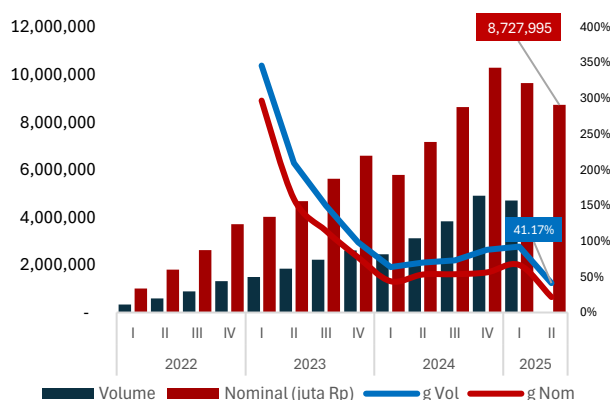
5.2.3 Perkembangan Transaksi BI-Fast

Pada triwulan II 2025, perkembangan transaksi BI-Fast di Provinsi Maluku Utara menunjukkan tren yang positif meskipun mengalami sedikit perlambatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Dari sisi nominal, transaksi BI-Fast tercatat sebesar Rp8,73 triliun, lebih rendah dibandingkan triwulan I 2025 yang merupakan capaian tertinggi sepanjang periode pengamatan. Namun demikian, capaian ini tetap merefleksikan tingginya minat masyarakat dalam memanfaatkan layanan BI-Fast sebagai sarana pembayaran digital yang efisien, aman, dan berbiaya murah. Sementara itu, volume transaksi BI-Fast pada triwulan II 2025 mencapai 4,41 juta transaksi. Hal ini menandakan bahwa meskipun nilai transaksi menurun secara kuartalan, jumlah aktivitas atau frekuensi transaksi masyarakat masih terjaga pada level yang tinggi.

Secara tahunan, perkembangan BI-Fast di Maluku Utara tetap menunjukkan pertumbuhan yang baik. Nominal transaksi pada triwulan II 2025 tumbuh 21,63% (yoy), sementara dari sisi volume bahkan meningkat lebih tinggi, yakni sebesar 41,17% (yoy). Pertumbuhan tersebut mencerminkan semakin meluasnya adopsi BI-Fast di kalangan masyarakat, baik untuk

kebutuhan transaksi ritel, pembayaran antar individu, maupun kegiatan ekonomi sehari-hari. Tren ini juga sejalan dengan meningkatnya preferensi masyarakat terhadap sistem pembayaran non-tunai yang cepat, mudah, dan efisien.

Perkembangan jumlah volume dan nominal transaksi RTGS di Provinsi Maluku Utara dapat dilihat pada Grafik 5.8.



Sumber: Bank Indonesia, diolah
Grafik 5.8 Perkembangan Transaksi BI-Fast di Maluku Utara

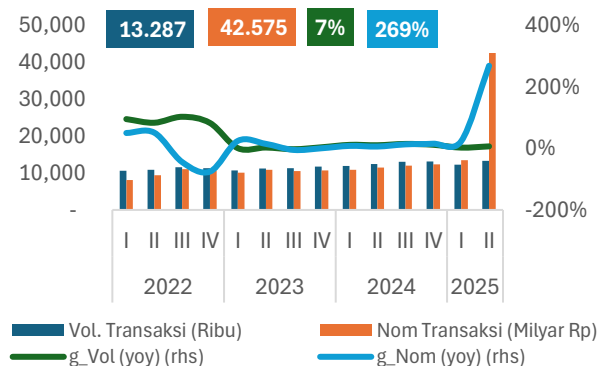
5.2.4 Perkembangan Implementasi Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK)

Pada triwulan II 2025, perkembangan transaksi menggunakan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) baik melalui kartu ATM/D dan kartu kredit mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Pada transaksi melalui kartu ATM/D pada triwulan II 2025 tercatat digunakan sebanyak 13,28 juta kali transaksi dengan

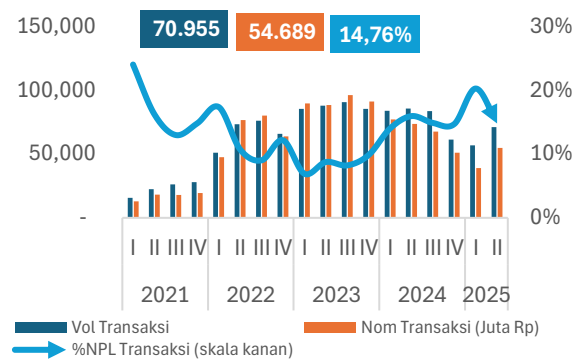
nominal sebesar Rp42,57 triliun. Terjadi peningkatan baik dari segi volume dan nominal pada triwulan I 2025 yang tercatat memiliki volume 12,3 juta kali transaksi dengan nominal Rp13,47 triliun. Sejalan dengan hal tersebut, baik volume dan nominal tetap mengalami pertumbuhan dari tahun sebelumnya sebesar 7% (yoy) untuk volume dan 269% (yoy) dari segi nominal.

Pada triwulan II 2025, transaksi kartu kredit tercatat 70.955 kali dengan nilai Rp54,7 miliar. Sejalan dengan itu, NPL juga meningkat menjadi Rp8,07 miliar dari Rp7,85 miliar pada triwulan sebelumnya. Perkembangan transaksi dan penggunaan APMK, baik kartu ATM/D maupun kartu kredit, ditunjukkan pada Grafik 5.9 dan 5.10.



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.9 Perkembangan Penggunaan ATM/D di Maluku Utara

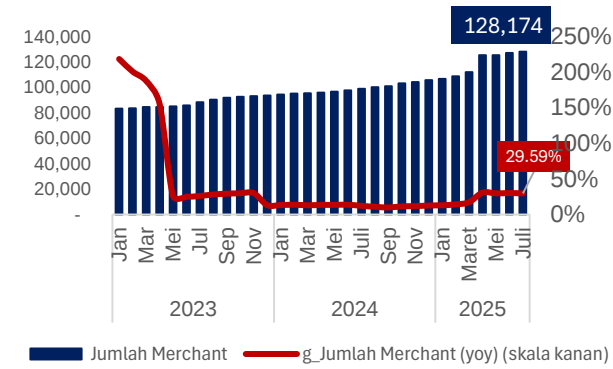


Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.10 Perkembangan Penggunaan Kartu Kredit di Maluku Utara

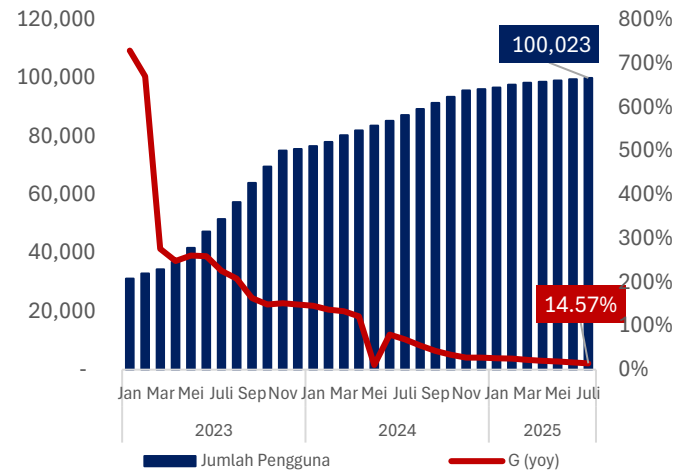
5.2.5 Perkembangan Penggunaan QRIS

Implementasi QRIS di Maluku Utara terus mengalami peningkatan setiap bulannya. Tercatat hingga akhir bulan Juli 2025, jumlah *merchant* QRIS di Maluku Utara telah mencapai 128.174 *merchant* dengan pertumbuhan sebesar 29,59% (yoy) dibandingkan Juli 2024. Pertumbuhan yang pesat ini diantaranya disebabkan karena pesatnya pertumbuhan akuisisi QRIS bagi usaha mikro di beberapa wilayah kota/kabupaten, serta tingkat penetrasi transaksi non tunai yang semakin diterima oleh masyarakat.



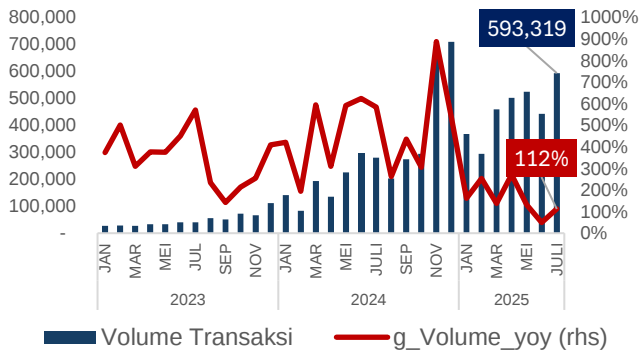
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.11 Perkembangan Merchant QRIS di Maluku Utara



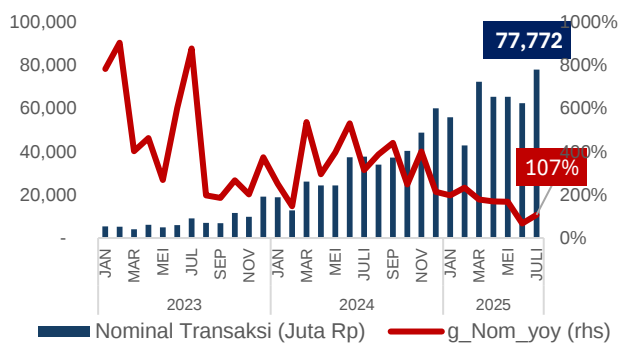
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.14 Perkembangan Jumlah Pengguna QRIS di Maluku Utara



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.12 Perkembangan Volume Transaksi QRIS di Maluku Utara



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.13 Perkembangan Nominal Transaksi QRIS di Maluku Utara

Transaksi QRIS di Maluku Utara juga terus meningkat. Selama Bulan Juli 2025, tercatat transaksi QRIS sudah digunakan hingga 593.319 kali transaksi, dengan nominal mencapai lebih dari Rp77,77 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa QRIS semakin banyak diterima dan dipahami oleh masyarakat. Selain itu, kanal QRIS juga semakin banyak digunakan oleh masyarakat. Hingga Juli 2025, tercatat telah terdapat 100.023 pengguna QRIS di Maluku Utara. Perkembangan jumlah *merchant*, volume transaksi, nominal transaksi, dan jumlah pengguna QRIS berturut-turut dapat dijelaskan melalui Grafik 5.11, 5.12, 5.13, dan 5.14 berikut.

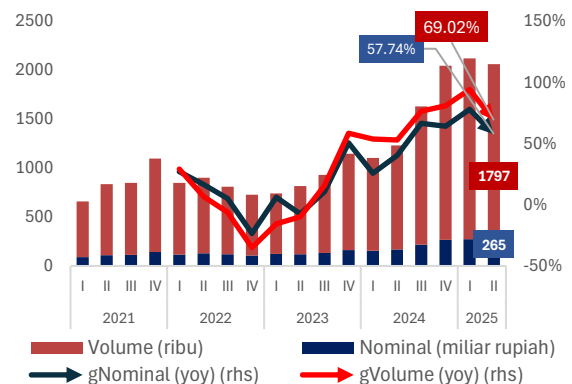
5.2.6 Perkembangan Transaksi E-Commerce

Akseptasi aktivitas ekonomi digital oleh masyarakat Maluku Utara pada triwulan II 2025 memiliki trend yang positif. Hal ini tercermin dari jumlah transaksi e-commerce yang mencapai 1,79 juta kali, mengalami peningkatan sebesar 69% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Selain itu, nilai transaksi turut mengalami peningkatan, yaitu mencapai Rp265 miliar atau meningkat sebesar 58% (yoy) dibandingkan dengan triwulan II 2024. Namun, capaian tersebut mengalami sedikit penurunan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mencatatkan volume sebesar 1,84 juta kali transaksi dan nominal Rp275 miliar.

Dalam hal metode pembayaran, pada triwulan II 2025 mayoritas masyarakat Maluku Utara yang berbelanja melalui e-commerce masih mengandalkan sistem pembayaran tunai melalui metode Cash on Delivery (CoD), yang memiliki proporsi tertinggi sebesar 43%. Sementara itu, metode Transfer Bank menjadi pilihan kedua dengan kontribusi sebesar 27% dari total transaksi. Preferensi ini menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki kecenderungan untuk memilih opsi pembayaran tunai.

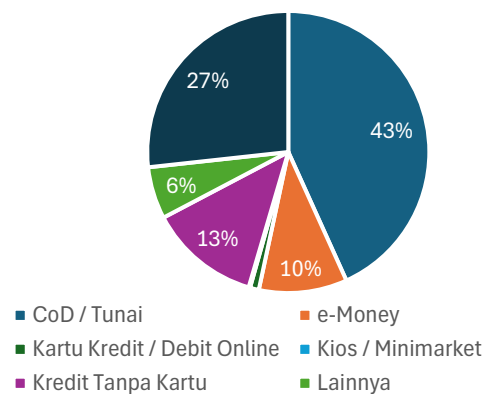
Dari sisi kategori produk, Fashion menjadi produk yang paling banyak diminati, dengan kontribusi sebesar 38% dari total

transaksi. Sementara itu, kategori Personal Care & Kosmetik menempati posisi kedua dengan persentase sebesar 16%, mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perawatan diri dan kecantikan.



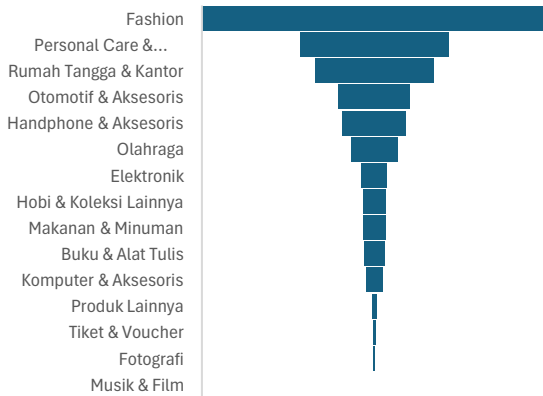
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.15 Perkembangan Nominal Transaksi E-Commerce di Maluku Utara



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.16 Pilihan Metode Pembayaran E-Commerce di Maluku Utara



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.17 Pilihan Kategori Produk E-Commerce

Tren positif dalam perkembangan transaksi *e-commerce* ini mengindikasikan semakin kuatnya adopsi digital di kalangan masyarakat Maluku Utara. Kemudahan akses terhadap *platform e-commerce*, meningkatnya kepercayaan terhadap transaksi daring, serta beragamnya pilihan metode pembayaran menjadi faktor utama yang mendorong pertumbuhan ini. Rincian lebih lanjut mengenai perkembangan transaksi *e-commerce*, metode pembayaran yang digunakan, serta kategori produk yang paling diminati dapat dilihat secara berturut-turut pada Grafik 5.15, 5.16, dan 5.17.

BAB 6 KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN

“Kesejahteraan Masyarakat dalam Tingkat yang Baik”



RINGKAS

TPT Smt I 2025
4,23%

NTP
Triwulan II 2025
107,26

Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Maluku Utara pada Semester I 2025 tercatat sebesar 4,26% meningkat sebesar 0,23 basis poin dibandingkan periode pencatatan Semester II 2024 yang tercatat sebesar 4,03%. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) masyarakat Maluku Utara juga mengalami penurunan yang sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan Angkatan Kerja. Hal ini mengindikasikan adanya pergeseran preferensi terhadap pekerjaan, dimana individu menunggu untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih sesuai atau enggan bekerja di sektor informal.

Pada triwulan II 2025 Indeks Nilai Tukar Petani (NTP) yang menjadi salah satu parameter kesejahteraan petani di Maluku Utara memperoleh indeks 107,26, angka tersebut menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 103,12. NTP Provinsi Maluku Utara pada triwulan II 2025 berada pada peringkat ke-8 (delapan) dari 14 (empat belas) provinsi di wilayah Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua).

6.1 Perkembangan Ketenagakerjaan

Rilis indeks Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Maluku Utara untuk periode semester I tahun 2025 (posisi bulan Februari) menunjukkan tingkat pengangguran yang meningkat.

Berdasarkan rilis dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Februari 2025, indeks TPT Provinsi Maluku Utara untuk periode semester I 2025 ialah 4,26 persen, meningkat sebesar 0,23% basis poin dibandingkan semester II 2024 (posisi bulan Agustus) yang tercatat sebesar 4,03%. Meningkatnya indeks TPT di Maluku Utara terjadi sejalan dengan penurunan jumlah penduduk bekerja sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan semester I 2025 yang menurun sebesar 5,78% dibandingkan semester II 2024 atau sejumlah 9,8 ribu orang.

Sektor industri pengolahan masih tetap menjadi kontributor terbesar dalam catatan pertumbuhan ekonomi Maluku Utara, yang tercermin dari tingginya andil LU tersebut pada angka PDRB. Hal ini sejalan dengan penyerapan tenaga kerja di LU tersebut yang juga meningkat sebesar 0,29% (yoy).

TPAK Maluku Utara pada bulan Februari 2025 tercatat sebesar 68,99%, menurun dibandingkan periode Agustus 2024 yang tercatat sebesar 69,13%, namun meningkat dibandingkan dengan periode Februari 2024 yang tercatat sebesar 67,88%.

Terjadinya penurunan TPAK pada bulan Februari 2025 sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas dengan penambahan sebesar 7,7 ribu orang atau meningkat sebesar 0,78% pada rentang pencatatan Agustus 2024 hingga Februari 2025. Peningkatan ini lebih tinggi dibandingkan perkembangan jumlah Angkatan Kerja yang hanya tumbuh sebesar 0,58%.

LU Industri Pengolahan menjadi sektor utama pendorong perekonomian Maluku Utara yang tumbuh 75,30% (yoy) pada triwulan I 2025, mengalami akselerasi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 58,27% (yoy). Peningkatan kinerja terjadi seiring realisasi produksi Feronikel dan produk olahan nikel lainnya (Mixed Hydroxide Precipitate dan Nickel Matte) yang mengalami peningkatan. Kemudian, LU Pertambangan dan Penggalian tumbuh 48,38% (yoy), serta mengalami akselerasi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 33,33% (yoy). Peningkatan tersebut sejalan dengan masih tingginya permintaan bahan baku untuk industri, khususnya industri pengolahan nikel. Akselerasi pertumbuhan didorong oleh beberapa faktor utama, yaitu tingginya permintaan produk turunan nikel di Tiongkok, mulai beroperasinya 1 unit smelter pirometalurgi dengan 4 lini produksi, serta terealisasinya ekspor perdana prekursor

Nickel Cobalt Manganese (NCM) yang memiliki nilai tambah lebih tinggi.

Komposisi tenaga kerja dipertahankan dengan proporsi 90% tenaga lokal dan 10% non-lokal, di mana mayoritas pekerja kontrak berasal dari wilayah Maluku Utara dan masyarakat di sekitar area tambang. Hingga triwulan IV tahun 2024, jangkauan

penyerapan tenaga kerja di sekitar tambang terus meluas, mencakup wilayah Halmahera Utara, Halmahera Timur, Pulau Morotai, serta melibatkan tenaga kerja dari Kota Ternate dan Tidore Kepulauan. Rekrutmen ini difokuskan pada tenaga kerja kontrak guna mendukung percepatan kegiatan penambangan serta pembangunan fasilitas smelter.

Tabel 6.1 Perkembangan Ketenagakerjaan di Maluku Utara (Ribu Jiwa)

Indikator	2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025
	Feb	Aug	Feb	Aug	Feb	Aug	Feb	Aug	Feb	Aug	Feb	Aug	Feb	Aug	Feb
Penduduk 15 Tahun Keatas	822,4	873,2	841,1	891,1	898,7	906,3	914,7	922,4	951,7	938,9	971,0	978,8	986,9	997,0	1004,7
Angkatan Kerja	587,9	574	544,9	579,7	579,0	582,5	588,3	596,8	634,9	609,2	645,9	663,3	669,9	689,2	693,1
Bekerja	560,6	547,4	517,2	551,8	555,3	552,5	558,5	568,7	603,2	585,0	616,2	634,7	642,0	661,5	663,6
Pengangguran	27,4	26,6	27,7	27,9	23,7	30,0	29,8	28,1	31,6	24,2	29,7	28,6	27,9	27,8	29,5
Bukan Angkatan Kerja	234,5	299,2	296,1	311,5	319,7	323,8	326,4	325,6	316,8	329,7	325,1	315,5	317,0	307,8	211,6
TPAK	71,49%	65,73%	64,80%	65,05%	64,42%	64,28%	64,31%	64,70%	66,71%	64,88%	66,52%	67,77%	67,88%	69,13%	68,99%
TPT	4,65%	4,63%	5,09%	4,81%	4,09%	5,15%	5,06%	4,71%	4,98%	3,98%	4,60%	4,31%	4,16%	4,03%	4,26%

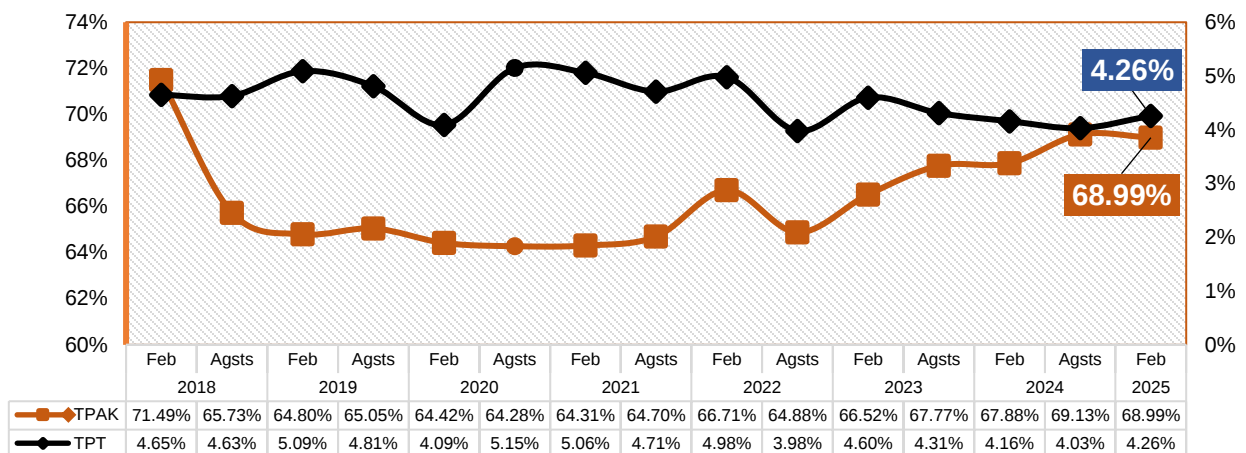
Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, diolah

Pendalaman lebih lanjut pada setiap sektor pekerjaan menunjukkan bahwa pada bulan Februari 2025 sebanyak 61,08% penduduk bekerja pada kegiatan informal, sedangkan 38,92% lainnya bekerja pada kegiatan formal, yang meliputi status bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai, ataupun berusaha sendiri. Komposisi ini mengalami perubahan dibandingkan dengan periode Februari 2024, dimana jumlah penduduk yang bekerja pada sektor informal mencapai 62,89% dari total pekerja.

Lebih lanjut, sepanjang periode pemantauan hingga bulan Februari 2025, terdapat 29,62% penduduk yang bekerja tidak

penuh (jam kerja kurang dari 35 jam dalam seminggu), yang terdiri atas 7,05% setengah penganggur serta 22,58% pekerja paruh waktu, sementara 70,38% penduduk bekerja penuh. Persentase penduduk setengah penganggur ini mengalami penurunan dibandingkan periode Februari 2024, dimana persentase tenaga kerja berstatus setengah penganggur adalah 7,05%. Penurunan ini sejalan dengan adanya peningkatan jumlah pekerja penuh dengan peningkatan sejumlah 42,88 ribu orang.

Adapun data pertumbuhan ketenagakerjaan penduduk Provinsi Maluku Utara terangkum pada Tabel 6.1.



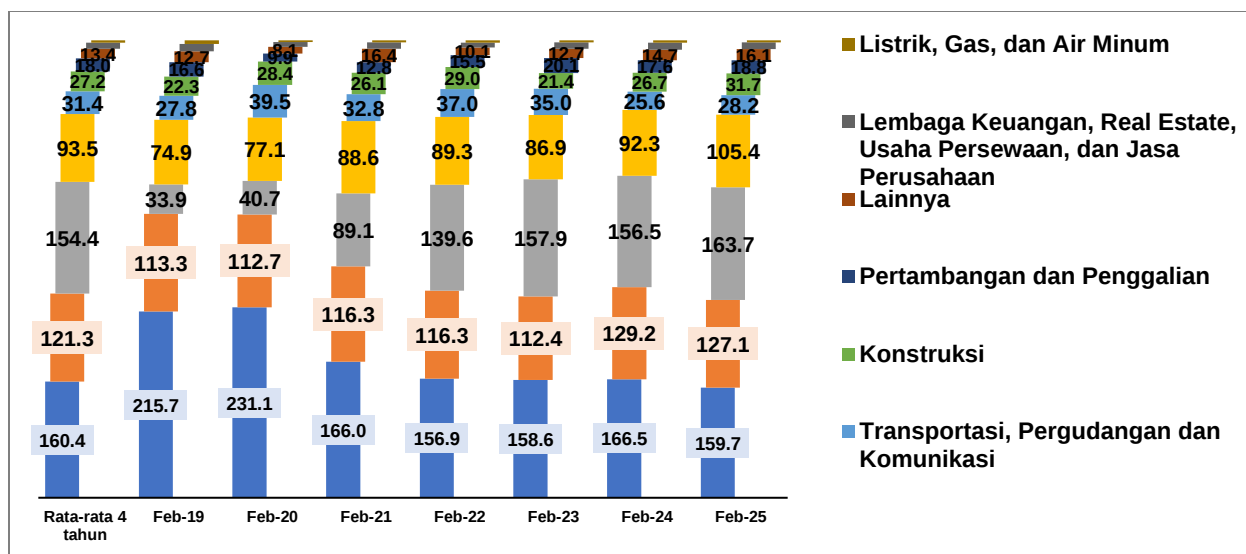
Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, diolah

Grafik 6.1 Perkembangan TPT dan TPAK Maluku Utara

Tercatat bahwa pada posisi bulan Februari 2025 dipantau secara sektoral, sektor industri pengolahan menjadi sektor dengan serapan tenaga kerja tertinggi yakni sebesar 163,65 ribu orang atau sebanyak 24,66% dari total angkatan kerja. Kemudian disusul oleh sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan total tenaga kerja sebanyak 159,68 ribu orang atau sebanyak 24,06% dari total angkatan kerja, serta oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran dengan total tenaga kerja sebanyak 83,32 ribu orang atau sebanyak 12,56% dari total angkatan kerja. Ketiga sektor tersebut menjadi penyerap tenaga kerja tertinggi dengan kontribusi sebesar 61,28% dari total tenaga kerja di Maluku Utara.

Provinsi Maluku Utara mengalami *shifting* tenaga kerja yang cukup besar dari sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan ke Sektor Industri Pengolahan. Hal ini tercermin

dari penurunan signifikan dari 235,8 ribu orang pada periode Agustus 2020 menjadi 159,68 ribu orang pada Februari 2025. Di lain sisi, terjadi peningkatan jumlah tenaga kerja cukup signifikan pada sektor industri pengolahan yaitu dari 31,5 ribu orang pada periode Agustus 2020 menjadi 163,65 ribu orang pada Februari 2024. Peningkatan penyerapan ini menyebabkan sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tidak lagi menjadi sektor utama dalam penyerapan tenaga kerja di Maluku Utara, melainkan sektor industri pengolahan. Penyerapan tenaga kerja di industri pengolahan ini sejalan dengan program hilirisasi nikel yang diterapkan Pemerintah dalam rangka meningkatkan nilai tambah dan ekspor nikel. Demikian juga dengan LU Pertambangan dan Penggalan yang mengalami peningkatan dari 15,3 ribu pekerja pada Agustus 2020 menjadi 18,78 ribu pekerja pada Februari 2025.



Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, diolah

Grafik 6.2 Jumlah Tenaga Kerja pada Lapangan Pekerjaan Utama (Ribu Jiwa)

6.2 Tingkat Kesejahteraan Daerah

Pada triwulan II 2025 Nilai Tukar Petani (NTP) tercatat meningkat. NTP triwulan II 2025 tercatat rata-rata sebesar 107,26, meningkat dibandingkan rata-rata triwulan sebelumnya sebesar 105,21. Peningkatan NTP ini terutama didorong oleh peningkatan Indeks Harga yang Diterima Petani (It).

Pada triwulan II 2025, Indeks Harga yang Diterima Petani (It) di Provinsi Maluku Utara sebesar 134,64 meningkat sebesar 4,80% dibandingkan triwulan I 2025. Peningkatan ini lebih tinggi dibandingkan kenaikan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) yang meningkat sebesar 1,05%.

Kesejahteraan petani di Maluku Utara tercatat relatif masih dalam kondisi baik yang

tercermin dari indikator NTP Maluku Utara masih berada di atas *baseline* 100. Hal ini mengindikasikan bahwa pendapatan yang diperoleh petani lebih tinggi dibandingkan pengeluarannya. Di wilayah kawasan Sulampua, NTP Maluku Utara pada triwulan II 2025 berada pada peringkat ke-8 (delapan) dari 14 (empat belas) provinsi (Tabel 6.2). Adapun *progress* pertumbuhan NTP Provinsi Maluku Utara ditampilkan pada Grafik 6.3.

Pembobotan terhadap NTP dibagi menjadi 5 (lima) subsektor, yaitu subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan rakyat, peternakan, dan perikanan. Pada triwulan II 2025, subsektor Hortikultura tercatat mengalami peningkatan tertinggi yaitu meningkat sebesar 6,96% (qtd) dibandingkan triwulan I 2025. Secara tahunan, nilai indeks subsektor Hortikultura pada triwulan II 2025 tercatat juga sebagai subsektor yang

mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 13,14% (yoy). Peningkatan NTP pada subsektor hortikultura terutama disumbang oleh Indeks Harga yang Diterima oleh Petani (Lt) untuk kelompok sayur-sayuran. Hal ini sejalan dengan peningkatan harga komoditas hortikultura seperti cabai rawit dan cabai rawit terutama disebabkan terbatasnya pasokan

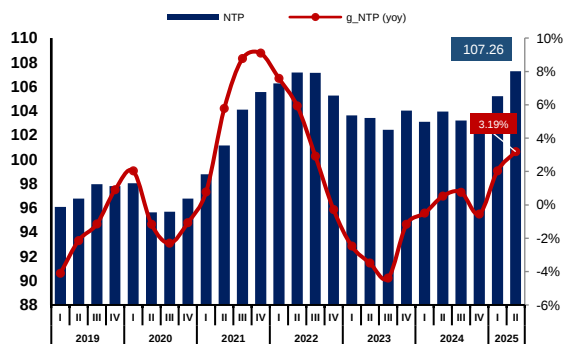
dari daerah sentra produsen akibat tingginya curah hujan.

Selain itu, nilai semua indeks subsektor triwulan II 2025 tercatat meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (*q tq*). Secara agregat, gabungan kelima subsektor di Maluku Utara mengalami peningkatan sebesar 1,22% (*q tq*) (Grafik 6.4).

Tabel 6.2 Nilai Tukar Petani (NTP) Rata-rata Sulampua

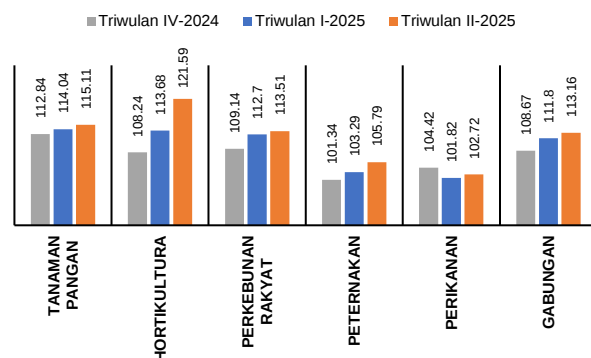
Apr-25			Mei 2025			Juni 2025		
NO.	PROVINSI	NTP	NO.	PROVINSI	NTP	NO.	PROVINSI	NTP
1	SULAWESI BARAT	138,19	1	SULAWESI BARAT	139,51	1	SULAWESI BARAT	137,03
2	SULAWESI UTARA	126,19	2	SULAWESI UTARA	131,14	2	SULAWESI UTARA	130,35
3	SULAWESI SELATAN	121,64	3	SULAWESI SELATAN	122,54	3	SULAWESI SELATAN	121,83
4	SULAWESI TENGAH	115,43	4	SULAWESI TENGAH	118,17	4	GORONTALO	115,84
5	GORONTALO	114,07	5	GORONTALO	115,82	5	SULAWESI TENGAH	115,21
6	SULAWESI TENGGARA	113,02	6	SULAWESI TENGGARA	113,94	6	PAPUA SELATAN	111,93
7	PAPUA SELATAN	110,59	7	PAPUA SELATAN	112,05	7	SULAWESI TENGGARA	110,70
8	MALUKU UTARA	106,50	8	MALUKU UTARA	107,94	8	MALUKU UTARA	107,53
9	PAPUA	104,18	9	PAPUA	105,45	9	PAPUA	105,09
10	MALUKU	101,42	10	MALUKU	102,01	10	PAPUA BARAT	101,17
11	PAPUA TENGAH	99,85	11	PAPUA BARAT DAYA	100,98	11	PAPUA TENGAH	100,39
12	PAPUA BARAT	99,41	12	PAPUA BARAT DAYA	100,98	12	MALUKU	99,42
13	PAPUA PEGUNUNGAN	98,07	13	PAPUA TENGAH	100,45	13	PAPUA BARAT DAYA	98,67
14	PAPUA BARAT DAYA	97,96	14	PAPUA PEGUNUNGAN	97,57	14	PAPUA PEGUNUNGAN	97,89
Nasional		121,06	Nasional		121,15	Nasional		121,72

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah



Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah

Grafik 6.3 Perkembangan NTP Maluku Utara



Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah

Grafik 6.4 NTP per Subsektor di Maluku Utara

Tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah juga dapat diukur melalui indikator kesenjangan pendapatan masyarakat yaitu

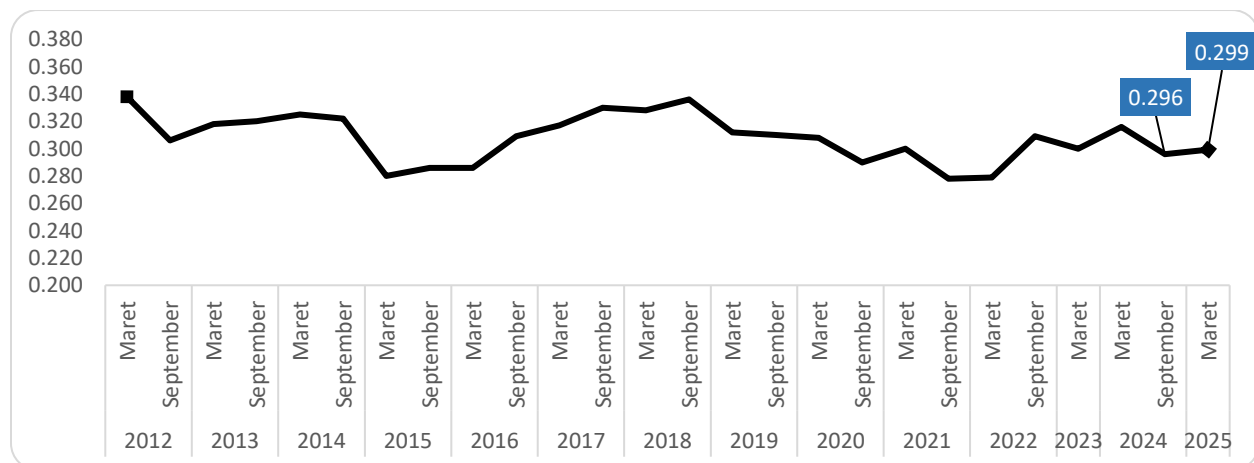
indeks Gini Rasio. Koefisien/indeks Gini Rasio menunjukkan tingkat ketidakmerataan atau ketimpangan agregat distribusi pendapatan

penduduk. Indeks gini rasio Provinsi Maluku Utara semester I 2025 (periode pencatatan bulan Maret) tercatat meningkat sebesar 0,03 basis poin dibandingkan semester II 2024 menjadi 0,299. Meningkatnya indeks tersebut mengindikasikan terjadinya penurunan tingkat kesenjangan pendapatan penduduk Maluku Utara. Hal ini disinyalir sejalan dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja baik dari sektor formal maupun informal yang tercermin dari penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sejak Februari 2023 hingga periode Agustus 2024 sehingga berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan.

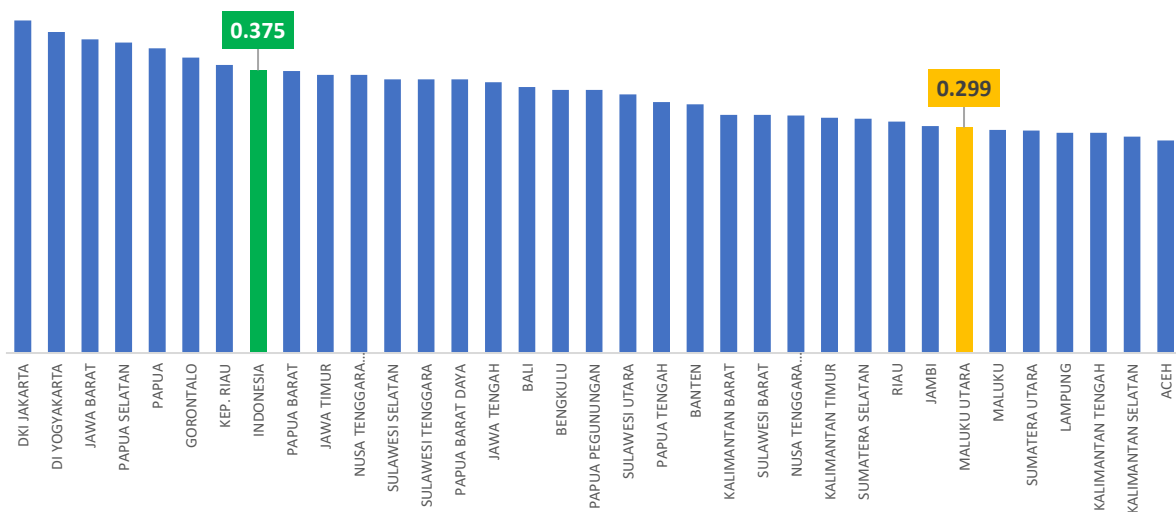
Indeks Gini Rasio Provinsi Maluku Utara pada tahun 2025 periode Semester I

2025 (Maret 2025) sebesar 0,299, nilai ini lebih tinggi dibandingkan dengan periode semester II 2024 (September 2024) sebesar 0,296. Indeks Gini Rasio Provinsi Maluku Utara relatif rendah dan berada pada urutan ke-28 dari 38 provinsi di Indonesia dengan indeks di bawah Gini Rasio Indonesia yang tercatat sebesar 0,375 pada semester I 2025. Dengan demikian, Provinsi Maluku Utara dapat dikategorikan berada dalam kategori ketimpangan rendah serta kesenjangan pendapatan masyarakat berada dalam taraf rendah.

Agregat Gini Rasio masing-masing wilayah di Indonesia dapat dilihat pada Grafik 6.5.



Grafik 6.5 Pertumbuhan Gini Rasio Provinsi Maluku Utara selama 12 Tahun Terakhir



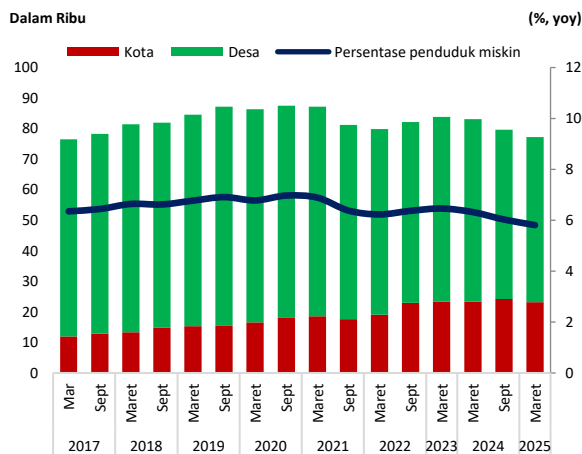
Grafik 6.6 Perbandingan Gini Ratio Provinsi di Indonesia untuk Periode Semester I 2025

6.3 Profil Kemiskinan Daerah

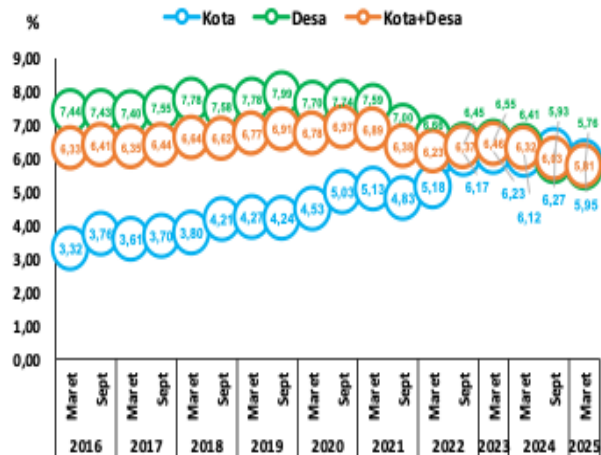
Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin di Maluku Utara pada periode semester I tahun 2025 (Maret 2025) tercatat sebanyak 77,27 ribu jiwa, dengan persentase penduduk miskin sebesar 5,81%. Jumlah penduduk miskin mengalami penurunan dibandingkan semester I 2024 (Periode Maret 2024) yang tercatat sebanyak 83,09 ribu orang dengan persentase penduduk miskin sebesar 6,32%. Persebaran penduduk miskin di Maluku Utara sepanjang semester I 2025 yaitu 70,07% adalah penduduk yang berada di pedesaan serta 29,93% adalah penduduk yang berada di perkotaan. Persebaran penduduk miskin di wilayah perkotaan meningkat dibandingkan

periode semester I 2024, sementara itu persebaran penduduk miskin di wilayah pedesaan menurun dibandingkan periode semester I 2024. Peningkatan penduduk miskin di perkotaan terjadi sejalan peningkatan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di wilayah perkotaan. Pada semester I tahun 2025, TPT wilayah perkotaan tercatat sebesar 3,79% atau lebih tinggi dibandingkan semester I tahun 2024 sebesar 3,66%.

Berdasarkan data yang dihimpun dari BPS, persentase penduduk miskin di kota menurun dari 6,27% pada semester II 2024 (September 2024) menjadi 5,95% pada semester I 2025 (Maret 2025). Adapun, persentase jumlah penduduk miskin di desa mengalami penurunan dari 5,93% pada semester II 2024 (September 2024) menjadi 5,76% pada semester I 2025 (Maret 2025).



Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah
Grafik 6.7 Jumlah Penduduk Miskin



Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah

Grafik 6.8 Persentase Jumlah Penduduk Miskin Desa dan Kota

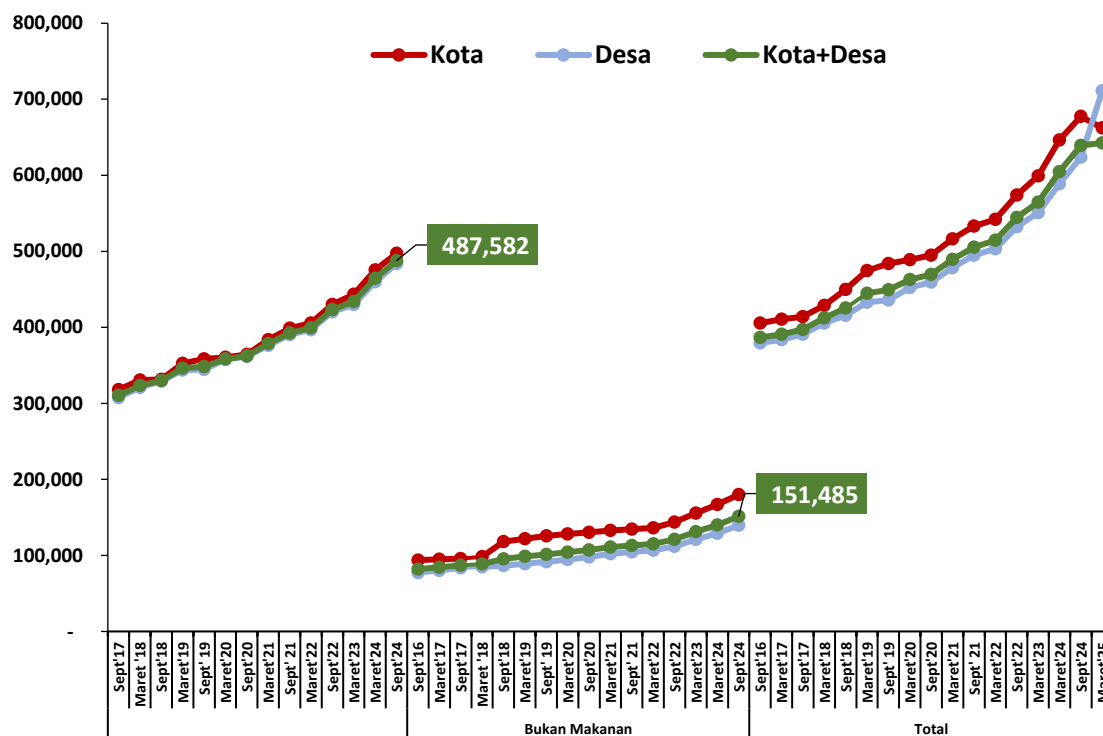
Selanjutnya, garis kemiskinan Provinsi Maluku Utara pada semester I 2025 (Maret 2025) sebesar Rp662.397/kapita per bulan, meningkat dari semester I 2024 (Maret 2024) yaitu sebesar Rp604.460/kapita per bulan yang disebabkan oleh komoditas beras dan rokok filter. Pengeluaran untuk komoditas makanan memperoleh bobot alokasi pengeluaran yang paling besar yaitu 74,26% dari *spending* di perkotaan dan 77,80% dari *spending* di pedesaan untuk garis kemiskinan Maluku Utara. Hal ini turut mengkonfirmasi bahwa kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi kelompok dengan tingkat volatilitas inflasi paling tinggi di Maluku Utara.

Sepanjang periode Maret 2024 – Maret 2025 komoditas makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada garis kemiskinan perkotaan maupun pedesaan secara umum

belum berubah dari periode pemantauan sebelumnya, yaitu komoditas beras, rokok kretek filter, dan tongkol/tuna/cakalang. Ketiga bahan pangan ini menjadi komoditas utama yang dikonsumsi oleh kelompok masyarakat yang berada di area garis kemiskinan di Maluku Utara. Komoditas beras menyumbang garis kemiskinan di perkotaan sebesar 25,10% dan di pedesaan sebesar 29,78% pada Maret 2025. Beras menjadi sumber utama karbohidrat masyarakat di Maluku Utara dengan harga yang juga mengalami peningkatan sejalan dengan relaksasi HET. Selain itu, kondisi Provinsi Maluku Utara yang hidup berdampingan dengan wilayah perairan menjadikan komoditas ikan sebagai bahan pangan utama nya karena harga relatif terjangkau dan mudah diperoleh. Namun, komoditas rokok filter tercatat pada urutan

kedua komoditas konsumsi prioritas oleh masyarakat kategori miskin di Maluku Utara. Hal ini menunjukkan betapa sulitnya masyarakat melepaskan diri dari rokok yang menjadi konsumsi utama bagi pekerja, terutama kaum buruh. Adapun, untuk komoditas bukan makanan, komoditas perumahan menjadi komponen dengan

alokasi pengeluaran yang paling tinggi untuk daerah pedesaan dan perkotaan. Adapun, untuk wilayah perkotaan disusul oleh komoditas bensin, dan listrik. Sedangkan, untuk wilayah pedesaan disusul oleh alokasi untuk pendidikan dan bensin. Rangkuman indeks P1 dan P2 pada semester I 2025 terangkum pada Tabel 6.3.



Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah

Grafik 6.9 Garis Kemiskinan Makanan dan Bukan Makanan Desa dan Kota

Tabel 6.3 Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Keparahan Kemiskinan (P2) di Maluku Utara

Tahun	Periode	P1 (%)			P2 (%)		
		Kota	Desa	Kota+Desa	Kota	Desa	Kota+Desa
2018	Maret'18	0,69	0,97	0,89	0,19	0,19	0,19
	Sept'18	0,62	1,50	1,25	0,23	0,45	0,39
2019	Maret'19	0,53	1,03	0,89	0,09	0,24	0,20
	Sept'19	0,25	1,41	1,08	0,03	0,41	0,30
2020	Maret'20	0,38	1,16	0,94	0,06	0,26	0,21
	Sept'20	0,65	1,26	1,09	0,11	0,28	0,23
2021	Maret'21	0,97	0,97	0,97	0,25	0,19	0,21
	Sept'21	0,97	0,94	0,94	0,28	0,17	0,20
2022	Maret'22	0,55	1,06	0,91	0,11	0,24	0,20
	Sept'22	0,58	1,49	1,23	0,12	0,43	0,34
2023	Maret'23	1,05	1,10	1,08	0,24	0,22	0,23
2024	Maret'24	0,94	0,87	0,89	0,19	0,19	0,19
	Sept'24	1,16	0,73	0,85	0,29	0,13	0,18
2025	Maret'25	1,17	0,86	0,95	0,29	0,19	0,22

Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, diolah

Sepanjang periode Maret 2024 – Maret 2025, Indeks kedalaman kemiskinan (P_1) mengalami peningkatan. Indeks kedalaman kemiskinan mengalami peningkatan dari 0,89 pada Maret 2024 menjadi 0,95 pada Maret 2025. Peningkatan ini mengindikasikan rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Maluku Utara semakin menjauhi garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin semakin melebar. Hal tersebut diiringi pula dengan penurunan indeks keparahan kemiskinan (P_2). Indeks P_2 naik dari 0,19 pada Maret 2024 menjadi 0,22 pada Maret 2025. Hal ini mengindikasikan bahwa ketimpangan pengeluaran antar penduduk kategori ekonomi rendah cenderung semakin meningkat.

6.4 Profil Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia yang dicerminkan oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Maluku Utara mengalami peningkatan. IPM Provinsi Maluku Utara pada tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 1,21% (yoy) dengan nilai sebesar 71,84, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya dengan indeks sebesar 70,98. Adapun, IPM Provinsi Maluku Utara tercatat lebih rendah dibandingkan rata-rata kawasan sulampua yang sebesar 72,60 pada periode yang sama. Kondisi ini berbeda dibandingkan tahun sebelumnya, dimana IPM Provinsi Maluku Utara berada di atas rata-rata kawasan Sulampua. Berdasarkan kategori, IPM Maluku Utara masuk pada kategori tinggi, yaitu

diantara 70 dan 80. Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara tercatat sebagai provinsi di wilayah Sulampua yang memiliki IPM Tinggi.

Provinsi	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Sulawesi Utara	71,66	72,20	72,99	73,67	74,03	74,52	75,04	75,68
Sulawesi Selatan	70,34	70,90	71,66	73,08	73,38	73,96	74,60	75,18
Sulawesi Tenggara	69,86	70,61	71,20	71,61	71,82	72,38	72,94	73,62
Sulawesi Tengah	68,11	68,80	69,50	70,31	70,54	71,01	71,66	72,24
Maluku	68,19	68,87	69,45	71,34	71,55	72,04	72,75	73,40
Gorontalo	67,01	67,71	68,49	69,51	69,82	70,62	71,25	72,01
Maluku Utara	67,20	67,76	68,70	69,30	69,56	70,26	70,98	71,84
Sulawesi Barat	64,30	65,10	65,73	68,40	68,64	69,19	69,80	70,46
Papua Barat	62,99	63,74	64,70	65,94	66,11	66,72	67,47	67,69
Papua	59,09	60,06	60,84	61,22	61,40	62,16	63,01	73,83
Sulampua	66,88	67,58	68,33	69,44	69,69	70,29	70,95	72,60
Indonesia	70,81	71,39	71,92	72,81	73,16	73,77	74,39	75,02

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah

Sumber: Bank Indonesia, diolah

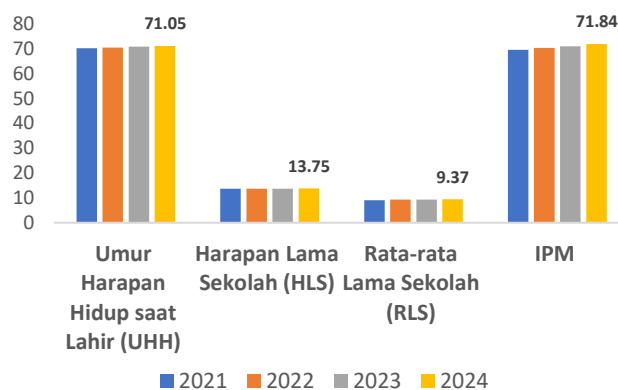
Grafik 6.11 IPM KTI Menurut Provinsi dan Status Pembangunan Manusia

Meningkatnya IPM Maluku Utara terjadi pada seluruh komponen. Bayi yang lahir pada tahun 2024 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 71,05 tahun. Anak-anak yang pada tahun 2023 berusia 7 tahun memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 13,75 tahun (Diploma II). Sementara itu, penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 9,37 tahun. Dimensi untuk mengukur kemampuan masyarakat untuk hidup layak dilihat dari pengeluaran per kapita. Pada tahun 2024 terjadi peningkatan pengeluaran per kapita masyarakat dari Rp8,83 juta per tahun menjadi Rp9,32 juta per tahun. Hal tersebut mendorong terjadinya peningkatan IPM Provinsi Maluku Utara pada tahun 2025.

Sebaliknya Kabupaten Pulau Taliabu menjadi wilayah dengan pencatatan IPM

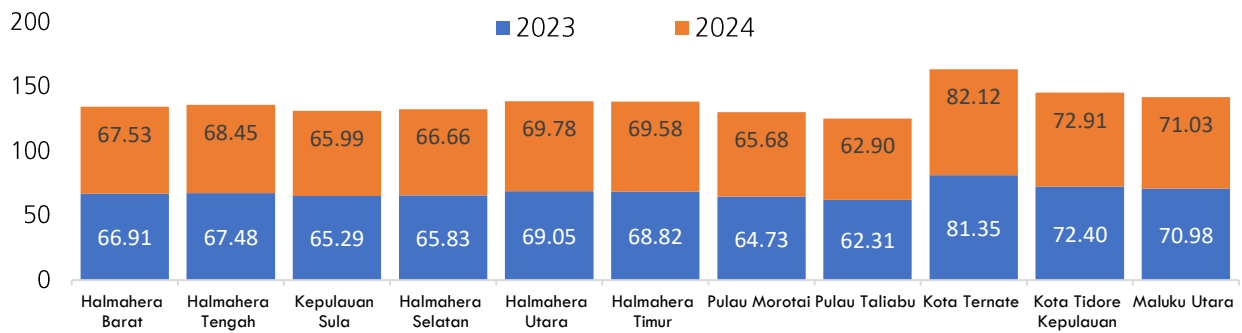
terendah dengan nilai 62,90, meningkat dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 62,31. Kondisi ini mengindikasikan bahwa dimensi standar hidup layak dari dari fasilitas infrastruktur maupun sosial di Kota Ternate lebih baik dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Maluku Utara. Dengan demikian, diperlukan adanya upaya pembangunan infrastruktur maupun sosial yang merata di daerah lainnya, terutama untuk kabupaten/kota yang masih di bawah nilai IPM Provinsi Maluku Utara sehingga kualitas hidup rakyat Maluku Utara semakin meningkat, mulai dari Umur Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, dan Rata-Rata Lama Sekolah.

Secara spasial terlihat bahwa pada tahun 2023 Kota Ternate masih mencatatkan IPM tertinggi untuk Provinsi Maluku Utara dengan nilai 82,12, meningkat dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 81,35.



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 6.12 IPM KTI Menurut Provinsi dan Status Pembangunan Manusia



Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah

Grafik 6.10 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Maluku Utara, 2023-2024

BAB 7 PROSPEK PEREKONOMIAN

“Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2025 Mengalami Akselerasi dan Inflasi Tetap Terjaga”



RINGKAS

Perekonomian Provinsi Maluku Utara pada tahun 2025 diproyeksikan tetap tumbuh tinggi dan mengalami akselerasi dibanding tahun 2024. Pertumbuhan ekonomi ditopang oleh industri pengolahan nikel serta konsumsi masyarakat yang meningkat. Dari sisi pengeluaran, perekonomian pada tahun 2025 didorong oleh pertumbuhan ekspor luar negeri yang dipengaruhi oleh proses hilirisasi tingkat lanjut produk olahan nikel. Dari sisi LU, sektor industri pengolahan serta pertambangan dan penggalian diperkirakan masih menjadi sektor utama yang menopang pertumbuhan ekonomi pada tahun berjalan.

Inflasi Maluku Utara pada tahun 2025 diperkirakan akan berada dalam rentang target inflasi nasional walaupun di tengah berbagai faktor risiko seperti ketidakseimbangan kuota bahan bakar rumah tangga dan curah hujan tinggi di daerah sentra produsen. Adapun, beberapa faktor seperti kebijakan efisiensi anggaran oleh Pemerintah dan transisi fenomena La Nina lemah menuju netral diperkirakan dapat menahan laju inflasi lebih tinggi.

**Proyeksi Ekonomi
Tahun 2025
28,06% - 34,06%**

**Proyeksi Inflasi
Tahun 2025
Meningkat**

7.1 Prospek Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Provinsi Maluku Utara pada tahun 2025 diproyeksikan tetap tumbuh tinggi dan mengalami akselerasi dibanding tahun 2024. Apabila dilihat dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 diproyeksikan masih didorong oleh tingginya aktivitas ekspor LN. Aktivitas ini sejalan dengan masih tingginya kebutuhan dunia akan produk nikel sebagai bahan baku industri besi dan baja serta baterai kendaraan listrik. Hal ini juga dipengaruhi oleh optimalisasi produksi *smelter* pirometalurgi dan hidrometalurgi eksisting, serta realisasi hilirisasi olahan nikel yang memiliki nilai jual lebih tinggi. Realisasi pembangunan *smelter* yang akan memasuki fase *commissioning* pada tahun 2025 akan berdampak positif pada naiknya angka ekspor Maluku Utara secara keseluruhan.

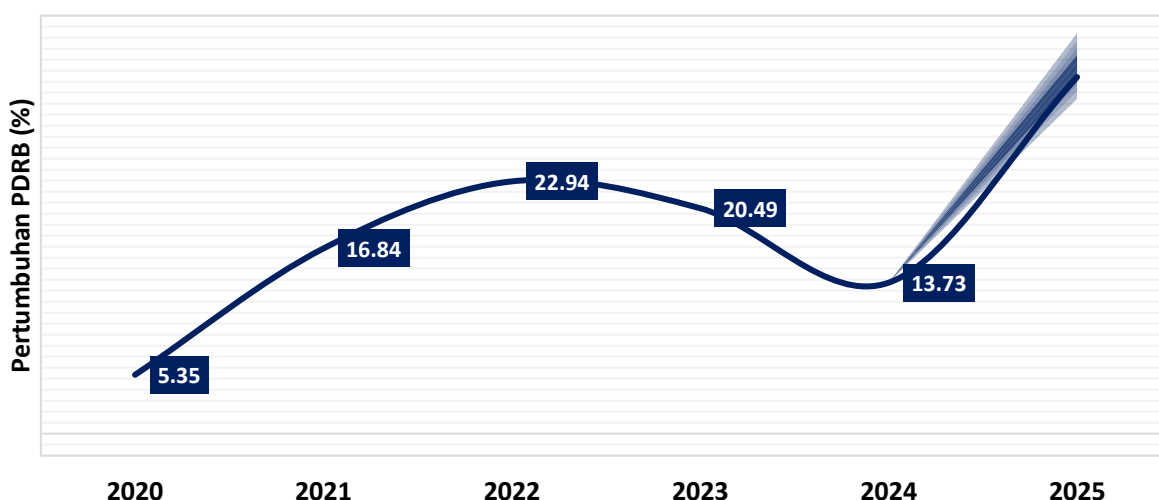
Komponen konsumsi rumah tangga diperkirakan akan mengalami penurunan pertumbuhan dibandingkan tahun 2024 sejalan dengan normalisasi pasca Pemilu dan Pilkada serta rencana efisiensi anggaran belanja pemerintah. Kendati demikian, adanya kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 di Maluku Utara yang mengalami peningkatan sebesar 6,5% diperkirakan menjadi faktor pendorong konsumsi rumah tangga pada tahun 2025.

Dari sisi PMTB, komponen ini diperkirakan akan tetap tumbuh pada tahun 2025 kendati mengalami penurunan pertumbuhan dibanding 2024. Hal ini dipengaruhi oleh realisasi pembangunan *smelter* baru dan penambahan lini produksi pada tahun 2025 yang tidak sebanyak tahun – tahun sebelumnya. Sejalan dengan hal tersebut, impor untuk bahan modal seperti mesin dan pesawat mekanik sebagai pendukung pembangunan *smelter* diperkirakan mengalami tren penurunan pada tahun 2025. Di sisi lain, menurut info dari pelaku industri adanya risiko pelemahan permintaan domestik industri besi dan baja di Tiongkok serta ketergantungan akan permintaan dari Tiongkok diperkirakan akan sangat mempengaruhi kinerja industri pengolahan maupun ekspor LN. Selain itu, adanya perang dagang yang memanas antara Amerika Serikat dan Tiongkok dapat menjadi penahan laju pertumbuhan perekonomian Maluku Utara lebih lanjut.

Apabila dilihat dari sisi Lapangan Usaha, industri pengolahan dan pertambangan masih akan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi sejalan dengan kinerja produksi produk olahan nikel di Maluku Utara yang semakin optimal. Realisasi ekspansi dan konversi produk olahan nikel yang memiliki nilai jual tinggi sebagai bahan baku baterai kendaraan listrik, serta realisasi *smelter* hidrometalurgi yang akan memasuki fase *commissioning* pada tahun 2025 diperkirakan

akan mendorong industri pertambangan dan pengolahan kembali tumbuh seiring masih tingginya kebutuhan bahan baku pembuatan baterai untuk keperluan kendaraan listrik. Lebih lanjut, lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan diperkirakan akan tetap tumbuh positif namun mengalami penurunan pertumbuhan seiring kondisi cuaca dan tinggi gelombang laut yang tidak menentu

selama beberapa periode pada tahun 2025.. **Dengan demikian, pada tahun 2025 perekonomian Maluku Utara diproyeksikan tetap tumbuh tinggi dengan rentang pertumbuhan sebesar 28,06% - 34,06% (yoy).** Kurva proyeksi pertumbuhan ekonomi Maluku Utara pada tahun 2025 ditunjukkan pada gambar 7.1.



Grafik 7.1 Perkembangan PDRB Maluku Utara dan Proyeksinya

7.1.1 Sisi Pengeluaran

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 dari sisi pengeluaran diproyeksikan akan tetap tumbuh dan ditopang oleh Ekspor dan PMTB. Ekspor barang dan jasa pada tahun 2025 diperkirakan tetap tumbuh dan mengalami akselerasi dibandingkan dengan tahun 2024. Akselerasi ekspor terjadi seiring dengan normalisasi pertambangan dan pengolahan nikel pasca mengalami

keterlambatan selama beberapa periode pada tahun 2024. Kendati demikian, rencana penambahan lini produksi pada *smelter* hidrometalurgi yang tidak sebanyak tahun – tahun sebelumnya diperkirakan menjadi faktor penahan pertumbuhan PMTB pada tahun 2025. Sementara itu, optimalisasi smelter eksisting dengan produk MHP menjadi nikel sulfat dan kobalt sulfat turut memberikan nilai jual lebih tinggi bagi produk olahan nikel di

Maluku Utara. Selain produk tersebut, realisasi konversi *smelter* pirometalurgi dengan produk feronikel menjadi *nickel matte* turut mendorong pertumbuhan ekspor di Maluku Utara. Realisasi konversi yang sudah memasuki produksi dan ekspor memberikan nilai tambah bagi produk olahan nikel di Maluku Utara. Begitu pula pemanfaatan nikel kadar rendah juga menjadi semakin tinggi. Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi lebih lanjut diperkirakan akan tertahan dipengaruhi oleh ketergantungan akan permintaan dari industri besi baja dan baterai EV di Tiongkok yang sangat memengaruhi kinerja industri pengolahan maupun ekspor LN.

Selanjutnya, konsumsi rumah tangga diperkirakan akan tumbuh positif namun mengalami penurunan pertumbuhan dibanding tahun 2024. Penurunan pertumbuhan ini antara lain diperkirakan karena adanya efisiensi anggaran belanja pemerintah yang mulai berlangsung sejak akhir tahun 2024 serta normalisasi pasca

Pemilu dan Pilkada pada tahun 2024 lalu. Pendapatan masyarakat selama tahun 2025 juga diperkirakan akan meningkat sejalan dengan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024 di Maluku Utara yang mengalami peningkatan sebesar 6,5%. Adanya rencana program Bantuan Subsidi Upah (BSU) dari pemerintah disinyalir dapat mendorong kinerja konsumsi.

Dari sisi konsumsi pemerintah, pertumbuhan diperkirakan akan mengalami penurunan seiring realokasi anggaran belanja pemerintah yang diperkirakan akan berdampak pada sejumlah proyek – proyek pembangunan maupun revitalisasi infrastruktur. Selain itu, berakhirnya momen Pemilu dan Pilkada pada tahun 2024 lalu disinyalir menjadi faktor penahan pertumbuhan konsumsi pemerintah. Kendati demikian, adanya rencana kenaikan gaji ASN pada tahun 2025 disinyalir menjadi faktor pendorong pertumbuhan konsumsi pemerintah.

7.1.2 Sisi Lapangan Usaha

Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara pada tahun 2025 diperkirakan masih tetap tumbuh sejalan dengan optimalisasi produksi *smelter* nikel di Maluku Utara. Hilirisasi nikel yang masih berlanjut mendorong peningkatan nilai tambah produk olahan nikel di Maluku Utara. Ekspor perdana produk MHP dari *smelter* hidrometalurgi di

Halmahera Tengah pada Oktober 2023 serta realisasi ekspansi produksi *smelter* hidrometalurgi dari produk akhir MHP menjadi nikel sulfat dan kobalt sulfat akan memberikan nilai tambah yang lebih tinggi dengan harga jual yang lebih mahal sehingga berpengaruh kepada kinerja LU Industri Pengolahan. Selain itu rencana *comissioning* *smelter* pirometalurgi pada tahun 2025 turut

mendorong kinerja ke depan. Hal ini disinyalir akan mendorong pertumbuhan lapangan usaha industri pengolahan pada tahun 2025. Proses ekspansi *smelter* tersebut akan mendorong terbentuknya ekosistem produksi baterai kendaraan listrik. Namun demikian, pertumbuhan lebih lanjut berpotensi tertahan seiring dengan adanya risiko *delay commissioning smelter* yang direncanakan akan berproduksi pada tahun 2025.

Tingginya pertumbuhan LU industri pengolahan akan diikuti oleh pertumbuhan pada LU pertambangan dan penggalian khususnya pertambangan bijih nikel kadar rendah dan tinggi untuk memenuhi kebutuhan *smelter* hidrometalurgi dan pirometalurgi. Serapan tenaga kerja yang cukup tinggi dan terus bertambah seiring pembangunan *smelter* baru akan meningkatkan LU perdagangan dan LU akomodasi, makan dan minum mengingat pendapatan masyarakat akan meningkat cukup signifikan. Di samping itu, semakin meningkatnya mobilitas masyarakat serta peningkatan UMP tahun 2025 sebesar 6,5% disinyalir akan mendorong peningkatan pola konsumsi masyarakat dan aktivitas perdagangan di Maluku Utara.

LU pertanian, perkebunan dan perikanan diperkirakan masih akan tetap mengalami pertumbuhan pada tahun 2025. Kinerja sektor perikanan pada tahun 2025 diperkirakan akan tumbuh positif sejalan dengan kondisi cuaca dan tinggi ombak yang berangsur – angsur mulai membaik pada

Maret 2025. Kemudian upaya pemerintah Kota Ternate melalui program Jalur Rempah diperkirakan akan meningkatkan hasil produksi komoditas rempah, seperti pala dan cengkeh di Maluku Utara. Namun terdapat faktor penahan pertumbuhan lebih lanjut yaitu beralihnya fungsi lahan, dimana hal tersebut tercermin dari luas panen dan produktivitas hasil pertanian yang menurun. Adanya tren *shifting* tenaga kerja dari agraris menjadi industri yang telah terjadi sejak tahun 2021 disinyalir masih akan berlanjut pada tahun 2025 seiring rencana pembangunan *smelter* yang masih terus berlangsung. Kemudian, kondisi anomali cuaca yang masih berlanjut disinyalir berpengaruh terhadap tingkat produktivitas LU Pertanian dan perikanan pada tahun 2025.

7.2 Outlook Inflasi Daerah

Tekanan inflasi Maluku Utara pada tahun 2025 diproyeksikan akan berada di sasaran target inflasi Nasional pada rentang 2,5% ± 1 % (yoy). Hal tersebut dipengaruhi oleh tekanan inflasi pada kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga dan Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau.

Peningkatan harga bahan bakar rumah tangga disebabkan adanya permasalahan distribusi yaitu ketidakseimbangan kuota pasokan minyak tanah dengan jumlah penerima. Provinsi Maluku Utara masih memiliki ketergantungan

tinggi terhadap penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis minyak tanah dibandingkan gas untuk keperluan sehari-hari. Berdasarkan data BPS tahun 2023, persentase rumah tangga di Maluku Utara dengan bahan bakar minyak tanah untuk memasak sebesar 53,39 persen. Dimana persentase rumah tangga yang menggunakan bahan bakar jenis gas/elpiji sebesar 1,67 persen.

Tekanan inflasi kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau diperkirakan berasal dari komoditas hortikultura yang disebabkan faktor cuaca buruk terutama di daerah sentra produksi yang menyebabkan adanya gangguan pasokan komoditas hortikultura. Berdasarkan prediksi BMKG, pada triwulan III 2025 diperkirakan terjadi kemunculan bibit siklon tropis yang menyebabkan curah hujan tinggi terutama di daerah sentra produksi komoditas cabai rawit, cabai merah, tomat, dan bawang merah yaitu di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara.

Peningkatan harga emas dunia juga diperkirakan menjadi salah satu faktor pendorong utama tekanan inflasi di Maluku Utara, yaitu berdampak kepada komoditas emas perhiasan. Hal ini terjadi seiring dengan meningkatnya ketidakpastian perekonomian global diakibatkan eskalasi ketegangan geopolitik. Sepanjang tahun 2025, eskalasi ketegangan geopolitik terutama dipicu oleh kebijakan perdagangan proteksionis oleh Amerika Serikat berupa penerapan tarif impor

ke sejumlah negara. Selain itu, konflik bersenjata di Kawasan Timur Tengah antara Iran dan Israel juga menjadi pemicu peningkatan permintaan terhadap emas yang dianggap sebagai aset *safe haven*.

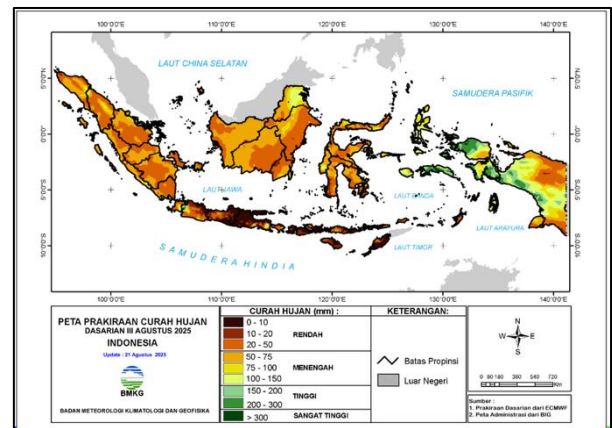
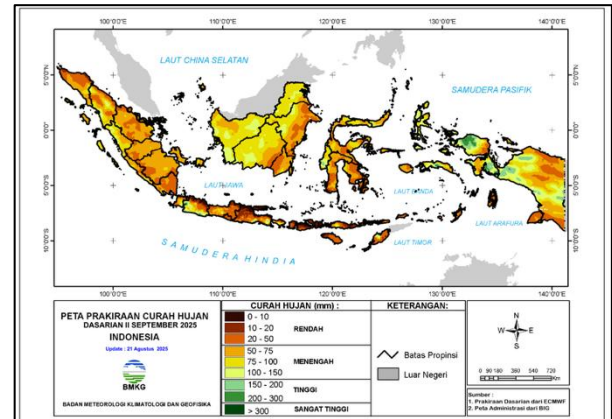
Selain itu, tekanan inflasi juga berasal dari komoditas rokok sejalan dengan kebijakan Pemerintah untuk meningkatkan Harga Jual Eceran (HJE) pada hampir seluruh produk tembakau yang mulai berlaku 1 Januari 2025 sebagaimana PMK Nomor 97 Tahun 2024 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun Atau Klobot, dan Tembakau Iris.. Hal ini berdampak kepada meningkatnya harga komoditas rokok akibat penyesuaian secara gradual oleh pelaku usaha sepanjang tahun 2025.

Adapun, tekanan inflasi lebih tinggi diperkirakan tertahan oleh penyesuaian ke bawah harga BBM nonsubsidi jenis Pertamina dan Dexlite yang sejalan dengan penurunan harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah yang relatif lebih stabil. Selama triwulan II 2025, Pemerintah tercatat telah beberapa kali melakukan penyesuaian harga ke bawah untuk komoditas bensin nonsubsidi untuk jenis Pertamina dan Dexlite.

Kendati demikian, guna memitigasi potensi adanya tekanan inflasi ke depan. TPID Provinsi Maluku Utara, beserta TPID Kabupaten/Kota di Maluku Utara terus melakukan koordinasi dan sinergi dalam pengendalian inflasi di Provinsi Maluku Utara.

Pengendalian inflasi melalui aspek 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif).

Koordinasi dengan pihak eksternal dalam rantai produksi dan distribusi pun dilakukan antara lain dengan otoritas klimatologi, otoritas meteorologi, geofisika, kelompok tani, serta asosiasi pedagang pasar. Pada aspek ketersediaan pasokan, TPID Maluku Utara melalui KPwBI Maluku Utara menginisiasi program pemberdayaan petani dan program *greenhouse* pesantren sebagai bentuk dukungan terhadap stabilitas pasokan komoditas hortikultura seperti bawang dan cabai rawit. Dari sisi kelancaran distribusi, inovasi pengendalian inflasi oleh TPID Maluku Utara berupa mobil inflasi dan kapal inflasi untuk mempermudah masyarakat untuk memperoleh bahan baku pasokan terutama untuk masyarakat yang tinggal di daerah pesisir dan pegunungan. Selain itu, pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota juga dilakukan untuk mendukung keterjangkauan harga pangan. Selain itu, seluruh TPID Maluku Utara menjaga aspek komunikasi efektif melalui kampanye *belanja bijak* di berbagai kanal komunikasi untuk tidak belanja berlebihan, serta pelaksanaan *capacity building* TPID.



Sumber: Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika

Gambar 7. 1 Perkiraan Curah Hujan Triwulan III 2025

Berdasarkan informasi prakiraan curah hujan dari Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG), terdapat kemunculan bibit siklon tropis di wilayah Indonesia. Hal ini didukung dengan indikator gelombang Madden-Julian Oscillation (MJO) dan gelombang frekuensi rendah (*Low Frequency*). Fenomena ini membentuk awan hujan yang menyebabkan terjadinya peningkatan curah hujan walaupun sedang dalam musim kemarau. Hal ini menimbulkan ketidakpastian bagi petani yaitu dapat mengganggu pola tanam.

Peningkatan curah hujan di daerah sentra produsen seperti Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara diperkirakan dapat memengaruhi ketersediaan pasokan komoditas hortikultura seperti cabai rawit, cabai merah, tomat, dan bawang merah. Selain itu, kondisi cuaca buruk juga berpotensi mengurangi kualitas komoditas hortikultura pada saat proses pengiriman dari daerah sentra produsen.

Dengan mempertimbangkan kondisi terkini serta beberapa potensi dan risiko tersebut, inflasi *whole year* 2025 diproyeksikan mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2024. Inflasi pada tahun 2025 diperkirakan akan berada dalam rentang target inflasi nasional. Inflasi pada tahun 2025 terjadi sejalan dengan adanya peningkatan

harga yang diatur pemerintah seperti penyesuaian Harga Jual Eceran (HJE) rokok. Penyesuaian tersebut diperkirakan akan berpengaruh secara gradual kepada peningkatan harga komoditas sigaret kretek. Selain itu, ketidakseimbangan kuota minyak tanah di masyarakat juga menjadi salah satu faktor pendorong inflasi di tahun 2025. Selain itu, tingginya tingkat ketergantungan Maluku Utara terhadap pasokan bahan pangan strategis dari luar provinsi. Kemudian, inflasi juga diproyeksikan meningkat seiring dengan semakin tingginya jumlah tenaga kerja yang memasuki wilayah Maluku Utara, baik tenaga kerja asing maupun tenaga kerja nasional, sehingga berpotensi meningkatkan aktivitas berbelanja maupun kebutuhan bahan pangan.

DAFTAR ISTILAH

Administered price

Harga barang yang diatur oleh pemerintah, misalnya harga bahan bakar minyak dan tarif dasar listrik.

APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan setujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

BI 7 Days Reverse Repo Rate

Suku bunga referensi kebijakan moneter dan ditetapkan dalam Rapat Dewan Gubernur setiap bulannya.

BI-RTGS

Bank Indonesia Real Time Gross Settlement, yang merupakan suatu penyelesaian kewajiban bayar-membayar (*settlement*) yang dilakukan secara *on-line* atau seketika untuk setiap instruksi transfer dana.

Bobot inflasi

Besaran yang menunjukkan pengaruh suatu komoditas terhadap tingkat inflasi secara keseluruhan yang diperhitungkan dengan melihat tingkat konsumsi masyarakat terhadap komoditas tersebut.

Dana Pihak Ketiga (DPK)

Simpanan pihak ketiga bukan bank yang terdiri dari giro, tabungan dan simpanan berjangka (*deposito*).

Ekspor dan Impor

Dalam konteks PDRB adalah mencakup perdagangan barang dan jasa antar negara dan antar provinsi.

Financing to Deposit Ratio (FDR) atau Loan to Deposit Ratio (LDR)

Rasio pembiayaan atau kredit terhadap dana pihak ketiga yang diterima oleh bank, baik dalam rupiah dan valas. Terminologi FDR untuk bank syariah, sedangkan LDR untuk bank konvensional.

Imported Inflation

Salah satu disagregasi inflasi, yaitu inflasi yang berasal dari pengaruh perkembangan harga di luar negeri (*eksternal*)

Indeks Ekspektasi Konsumen

Salah satu pembentuk IKK, indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap ekspektasi kondisi ekonomi 6 bulan mendatang dengan skala 1 – 100.

Indeks Kondisi Ekonomi

Salah satu pembentuk IKK, indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen

terhadap kondisi ekonomi saat ini dengan skala 1 – 100.

Indeks Keyakinan Konsumen (*Consumer Confidence*)

Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi kondisi ekonomi enam bulan mendatang dengan skala 1 – 100.

Inflasi IHK

Kenaikan harga barang dan jasa dalam satu periode yang diukur dengan perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK), yang mencerminkan perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat luas.

Inflasi Inti

Inflasi IHK setelah mengeluarkan komponen *volatile foods* dan *administered prices*.

Inflow

Uang yang diedarkan aliran masuk uang kartal ke Bank Indonesia.

Investasi

Kegiatan meningkatkan nilai tambah suatu kegiatan produksi.

Kredit

Penyediaan uang atau tagihan yang sejenis, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, termasuk:

- Pembelian surat berharga nasabah yang dilengkapi dengan *Note Purchase Agreement* (NPA)
- Pengambilan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang.

Loan to Deposit Ratio (LDR) atau Financing to Deposit Ratio (FDR)

Rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga yang diterima oleh bank. Terminologi FDR untuk bank syariah, sedangkan LDR untuk bank konvensional.

Loan to Funding Ratio (LFR)

Rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga dan surat berharga yang diterbitkan bank.

Liaison

Kegiatan pengumpulan data/statistik dan informasi yang bersifat kualitatif dan kuantitatif yang dilakukan secara periodik melalui wawancara langsung kepada pelaku ekonomi mengenai perkembangan dan arah kegiatan ekonomi dengan cara yang sistematis dan didokumentasikan dalam bentuk laporan.

mtm

Month to month. Perbandingan antara data satu bulan dengan bulan sebelumnya.

Net Inflow

Uang yang diedarkan *inflow* lebih besar dari *outflow*.

Non Performing Financing (NPF) atau Non Performing Loan (NPL)

Rasio pembiayaan atau kredit macet terhadap total penyaluran pembiayaan atau kredit oleh bank, baik dalam rupiah dan valas, Terminologi NPF dan pembiayaan untuk bank syariah, sedangkan NPL dan kredit untuk bank konvensional. Kriteria NPF atau NPL adalah (1) kurang lancar, (2) diragukan dan (3) macet.

Omset

Nilai penjualan bruto yang diperoleh dari satu kali proses produksi.

Outflow

Aliran keluar uang kartal dari Bank Indonesia.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas ekonomi suatu daerah seperti hasil pajak daerah, redistribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah.

qta

Quarter to quarter. Perbandingan antara data satu Triwulan dengan triwulan sebelumnya.

Real Time Gross Settlement (RTGS)

Sistem transfer dana elektronik yang penyelesaian setiap transaksinya dilakukan dalam waktu seketika.

Smelter

Fasilitas pengolahan hasil tambang yang berfungsi meningkatkan kandungan logam seperti timah, nikel, tembaga, emas, dan perak hingga mencapai tingkat yang

memenuhi standar sebagai bahan baku produk akhir.

- **Hidrometalurgi**

Proses pengolahan nikel (umumnya kadar rendah, bertipe limonit) dengan menggunakan asam sulfat untuk mengekstraksi pada tekanan yang tinggi.

- **Pirometalurgi**

Proses pengolahan nikel (umumnya kadar yang lebih tinggi, bertipe saprolite) dengan cara dibakar pada temperatur tinggi hingga 1500-1600⁰ celcius.

Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)

Sistem pertukaran data keuangan elektronik dan/atau warkat antar peserta kliring baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu.

Volatile Food

Salah satu disagregasi inflasi, yaitu untuk komoditas yang perkembangan harganya sangat bergejolak karena faktor-faktor tertentu khususnya komoditas bahan makanan.

yoy

Year on year. Perbandingan antara data satu tahun dengan tahun sebelumnya.

DAFTAR SINGKATAN

APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BBM	Bahan Bakar Minyak
BBNKB	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
BKPM	Badan Koordinasi Penanaman Modal
BLUD	Badan Layanan Umum Daerah
BPS	Badan Pusat Statistik
BUKU	Bank Umum Kelompok Usaha
CIF	Cost, Insurance and Freight
DAU	Dana Alokasi Umum
DAK	Dana Alokasi Khusus
DER	Debt Equity Ratio
DOF	Derajat Otonomi Fiskal
DPK	Dana Pihak Ketiga
DSR	Debt Service Ratio
FGD	Focus Group Discussion
FOB	Free on Board
FTV	Financing to Value
IHK	Indeks Harga Konsumen
IKK	Indeks Keyakinan Konsumen
IPR	Indeks Penjualan Riil
JISDOR	Jakarta Interbank Spot Dollar Rate
KI	Kredit Investasi
KK	Kredit Konsumsi
KKB	Kredit Kendaraan Bermotor
KMK	Kredit Modal Kerja
KPA	Kredit Pemilikan Apartemen
KPR	Kredit Pemilikan Rumah
LDR	Loan to Deposit Ratio
LFR	Loan to Funding Ratio
LNPRIT	Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga
LTV	Loan to Value

<i>mtm</i>	Month to month
NPF	Non Performing Financing
NPL	Non Performing Loan
NTN	Nilai Tukar Nelayan
NTP	Nilai Tukar Petani
PAD	Pendapatan Asli Daerah
PDRB	Produk Domestik Regional Bruto
PLN	Perusahaan Listrik Negara
PMA	Penanaman Modal Asing
PMDN	Penanaman Modal Dalam Negeri
PMTB	Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto
PPBKB	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
<i>qtq</i>	Quarter to Quarter
RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RTGS	Real Time Gross Settlement
SBT	Saldo Bersih Tertimbang
SITC	Standard International Trade Classification
SKDU	Survei Kegiatan Dunia Usaha
SKNBI	Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia
SPE	Survei Penjualan Eceran
TPAK	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
TPID	Tim Pengendalian Inflasi Daerah
TPK	Tingkat Penghunian Kamar
TPT	Tingkat Pengangguran Terbuka
TTL	Tarif Tenaga Listrik
UMKM	Usaha Mikro Kecil Menengah
UTLE	Uang Tidak Layak Edar
<i>yoy</i>	Year on Year



**KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA
PROVINSI MALUKU UTARA**

Jl. Yos Sudarso No. 1 Ternate

Telp. (0921) 3121217 - Fax. (0921) 3124017

<http://www.bi.go.id>